

**PERAN INKLUSI KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH
TERHADAP KINERJA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)**

DESERTASI



Muh. Awal Satrio Nugroho

Nomor Mahasiswa : 13931029

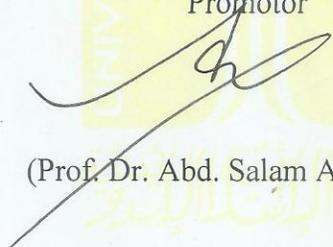
PROGRAM DOKTORAL (S3) ILMU EKONOMI
PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN

Yogyakarta, 11 JANUARI 2021

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Promotor



(Prof. Dr. Abd. Salam Arief, MA.)

Co Promotor I



(Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D.)

Co Promotor II



(Abdul Hakim, SE., M.Ec., Ph.D.)

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh Awal Satrio Nugroho
NIM : 13931029
Tahun terdaftar : TA 2013/2014
Program studi : Manajemen
Fakultas : Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Disertasi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis disitasi dalam dokumen ini.

Dengan demikian, saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila dokumen ilmiah Disertasi ini di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Desember 2010



Muh Awal Satrio Nugroho

13931029

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GRAFIK.....	vi
DAFTAR PETA.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perbankan Syariah.....	3
1.3. Peran Perbankan Syariah.....	7
1.4. Inklusi Keuangan Perbankan Syariah.....	8
1.5. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia.....	11
1.6. Rumusan Masalah	16
1.7. Pertanyaan Penelitian	18
1.8. Tujuan Penelitian.....	18
1.9. Kontribusi Hasil Penelitian.....	19
BAB II KAJIAN PUSTAKA	20
2.1. Bank Syariah	20
2.2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	25
2.3. Inklusi Keuangan.....	35
2.4. Eksklusi Sosial dan Eksklusi Keuangan.....	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	55
3.1. Ruang Lingkup Penelitian	55
3.2. Populasi dan sampel	56
3.3. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data	57
3.4. Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian.....	57
3.5. Analisis Data	60
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	65
4.1. Analisis Deskriptif.....	66
4.2. Analisis Regresi: dengan variabel dependen jumlah UMKM dan variabel independen 6 variabel.	68
4.3. Analisis Regresi: dengan variabel dependen jumlah tenaga kerja pada UMKM dan 6 variabel independen.....	74

4.4. Analisis regresi dengan jumlah UMKM sebagai variabel dependen dan 9 variabel independen.....	81
4.5. Analisis regresi dengan jumlah tenaga kerja pada UMKM sebagai variabel dependen dan 9 variabel independen.....	88
4.6. Pembahasan	103
BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI.....	110
Kesimpulan.....	110
Implikasi	111
Strategi Bank Syariah	114
DAFTAR PUSTAKA	116



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Jumlah Bank Syariah di Indonesia	6
Tabel 1. 2. Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (dalam milyar rupiah)	7
Tabel 1.3. Pembiayaan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Kepada UMKM Tahun 2006-2017	8
Tabel 1. 4. Inklusi Keuangan Syariah Indonesia Tahun 2010 - 2015	10
Tabel 1. 5. Jumlah UMKM Indonesia tahun 2000-2017	12
Tabel 1. 6. Jumlah UMKM di berbagai pulau di Indonesia tahun 2016	13
Tabel 1. 7. Kontribusi UMKM dalam Penyediaan Kesempatan Kerja Beberapa Negara di Asia	14
Tabel 1. 8. Kontribusi UMKM Terhadap GDP di Beberapa Negara Asia	14
Tabel 2. 1. Penelitian Terdahulu tentang Inklusi Keuangan dan UMKM.....	44
Tabel 4. 1. Hasil Analisis Deskriptif Masing-masing Variabel Penelitian	66
Tabel 4. 2. Hasil Analisis Regresi Random Effect dengan variabel dependen jumlah UMKM dan variabel independen 6 variabel.	70
Tabel 4. 3. Nilai Koefisien <i>Cross Effect</i> dengan variabel dependen jumlah UMKM dan variabel independen 6 variabel.	71
Tabel 4. 4. Nilai Koefisien <i>Period Effect</i> dengan variabel dependen jumlah UMKM dan variabel independen 6 variabel.	72
Tabel 4. 5. Hasil Regresi <i>Fixed Effect</i> dengan variabel dependen jumlah tenaga kerja pada UMKM dan 6 variabel independen.	76
Tabel 4. 6. Nilai Koefisien <i>Cross Effect</i> dengan variabel dependen jumlah tenaga kerja pada UMKM dan 6 variabel independen.	77
Tabel 4. 7. Nilai Koefisien <i>Period Effect</i> dengan variabel dependen jumlah tenaga kerja pada UMKM dan 6 variabel independen.	78
Tabel 4. 8. Hasil Analisis Regresi dengan jumlah UMKM sebagai variabel dependen dan 9 variabel independen.	83
Tabel 4. 9. Nilai Koefisien <i>Cross Effect</i> dengan jumlah UMKM sebagai variabel dependen dan 9 variabel independen.	84
Tabel 4. 10. Nilai Koefisien <i>Period Effect</i> dengan jumlah UMKM sebagai variabel dependen dan 9 variabel independen.	85
Tabel 4. 11. Hasil Regresi <i>Random Effect</i> dengan jumlah tenaga kerja pada UMKM sebagai variabel dependen dan 9 variabel independen.	90
Tabel 4. 12. Nilai Koefisien <i>Cross Effect</i> dengan jumlah tenaga kerja pada UMKM sebagai variabel dependen dan 9 variabel independen.	91
Tabel 4. 13. Nilai Koefisien <i>Period Effect</i> dengan jumlah tenaga kerja pada UMKM sebagai variabel dependen dan 9 variabel independen.	92
Tabel 4. 14. Uji Wald.....	96
Tabel 4. 15. Uji Wald.....	97
Tabel 4. 16. Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test	98
Tabel 4. 17. Uji Newey-West.....	99
Tabel 4. 18. Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey	99

Tabel 4. 19. Uji Huber White.....	100
Tabel 4. 20. Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test	101
Tabel 4. 21. Uji Newey-West.....	102
Tabel 4. 22. Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey	102



DAFTAR GRAFIK

Grafik 4 1. Koefisien <i>Cross Effect</i> pada berbagai kabupaten/kota	71
Grafik 4 2. Nilai Koefisien <i>Period Effect</i> dengan variabel dependen jumlah UMKM dan variabel independen 6 variabel.	73
Grafik 4 3. Nilai Koefisien <i>Cross Effect</i> dengan variabel dependen jumlah tenaga kerja pada UMKM dan 6 variabel independen.	77
Grafik 4 4. Nilai Koefisien <i>Period Effect</i> dengan variabel dependen jumlah tenaga kerja pada UMKM dan 6 variabel independen.	79
Grafik 4 5. Nilai Koefisien <i>Cross Effect</i> dengan jumlah UMKM sebagai variabel dependen dan 9 variabel independen.	84
Grafik 4 6. Nilai Koefisien <i>Period Effect</i> dengan jumlah UMKM sebagai variabel dependen dan 9 variabel independen.	86
Grafik 4 7. Nilai Koefisien <i>Cross Effect</i> dengan jumlah tenaga kerja pada UMKM sebagai variabel dependen dan 9 variabel independen.	91
Grafik 4 8. Nilai Koefisien <i>Period Effect</i> dengan jumlah tenaga kerja pada UMKM sebagai variabel dependen dan 9 variabel independen.	93



DAFTAR PETA

Peta 4 1. Sebaran Jumlah UMKM di Sumatera Barat dan Jawa.....	72
Peta 4 2. Sebaran Jumlah Tenaga Kerja UMKM di Sumatera Barat dan Jawa	78
Peta 4 3. Sebaran Jumlah UMKM di Sumatera Barat dan Jawa.....	85
Peta 4 4. Sebaran Jumlah Tenaga Kerja UMKM di Sumatera Barat dan Jawa	92



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Inklusi keuangan (*financial inclusion*) akhir-akhir ini menarik perhatian banyak negara di dunia. Pentingnya inklusi keuangan diakui secara luas di dunia, bahkan inklusi keuangan telah dipakai sebagai fokus utama kebijakan pemerintah di beberapa negara di dunia sejak tahun 2000-an. *The World Bank 2014 Global Financial Development Report* telah melaporkan bahwa lebih dari lima puluh negara di dunia telah memasang target tertentu dalam hal inklusi keuangan (Naceur et al., 2015). Inklusi keuangan diyakini mempermudah alokasi sumber daya produktif secara lebih efisien dan akan mengurangi tumbuh suburnya pembiayaan dari sumber kredit informal, misalnya para rentenir, yang biasanya menyalurkan pinjaman secara eksploitatif. Dalam beberapa penelitian yang dilakukan *The World Bank* terungkap bahwa inklusi keuangan berperan penting dalam upaya pengentasan kemiskinan, mengurangi disparitas pendapatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pittsburg bulan September 2009, para pemimpin G20 meluncurkan *G20 Financial Inclusion Experts Group* (FIEG) dan menyepakati model *Small and Medium Enterprise* (SME) untuk mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan serta memperkuat regulasi *financial inclusion* dan perlindungan konsumen. Selanjutnya pada KTT Toronto bulan Juni 2010 para pemimpin G20 menegaskan kembali komitmen mereka untuk meningkatkan akses layanan keuangan bagi masyarakat miskin dan meluncurkan *G20 SME Finance Challenge*. Pada KTT Toronto sektor swasta juga dihimbau ikut andil dalam mewujudkan *financial inclusion*. Hasil kesepakatan dalam KTT negara G20 menetapkan *financial inclusion* sebagai pilar penting dalam pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di negara negara anggotanya. Di India, inklusi keuangan digunakan untuk memastikan bahwa akses masyarakat terhadap jasa keuangan telah memadai bagi masyarakat miskin dengan biaya yang terjangkau (Rangrajan Committee, 2013). Indonesia juga menganggap pentingnya inklusi keuangan. Pemerintah Indonesia telah merumuskan Strategi Nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui distribusi pendapatan yang merata, penurunan kemiskinan dan stabilitas sistem keuangan, sejak tahun 2013. Adalah hak setiap individu untuk dapat mengakses seluruh jasa keuangan dengan biaya

terjangkau. Kebijakan ini sangat memperhatikan masyarakat miskin berpendapatan rendah, pekerja migran dan masyarakat yang hidup di daerah terpencil (Bank Indonesia, 2014). Tanpa menghilangkan *financial barriers* terhadap layanan jasa keuangan, masyarakat miskin akan tetap menjadi miskin secara terus menerus. Kelompok sasaran keuangan inklusif yang disebutkan dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif adalah tiga kategori penduduk, yaitu orang miskin berpendapatan rendah, orang miskin bekerja dan orang yang hampir miskin. Selain itu juga meliputi tiga lintas kategori, yaitu pekerja migran, perempuan dan penduduk daerah tertinggal (Bank Indonesia, 2014).

Inklusi keuangan menggambarkan aksesabilitas jasa keuangan oleh masyarakat. Berdasarkan definisi dari Rangarajan Committee, yang dimaksud dengan inklusi keuangan adalah proses yang menjamin akses pada jasa keuangan secara tepat waktu, dan kecukupan kredit yang diperlukan oleh kelompok yang rentan miskin seperti orang-orang yang lebih lemah secara ekonomi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah dengan biaya yang terjangkau (Rangarajan Committee, 2008). Hastak dan Gaikwad (2015) berpendapat bahwa inklusi keuangan mengacu kepada akses yang universal dan rentang yang luas dari jasa keuangan dengan biaya yang layak. Menurut Nengsih (2015), inklusi keuangan adalah proses untuk memberikan akses keuangan formal bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah/*unbankable people*.

Berdasarkan laporan PBB, 2,5 milyar orang di seluruh dunia tidak mempunyai akses pada jasa keuangan formal, seperti tabungan, kredit, asuransi, dan jasa-jasa pembayaran yang lain. Di negara-negara yang sudah mapan ekonominya tingkat eksklusi keuangan cenderung rendah. Misalnya di Jerman, eksklusi diperkirakan hanya 4% dari populasi penduduk, sedangkan di Amerika Serikat 9% dari populasi penduduknya tidak mempunyai akses ke jasa keuangan formal. Sedangkan di Amerika Latin, Asia, atau Afrika diperkirakan 80% dari populasi penduduk yang tidak mempunyai akses ke jasa keuangan formal (Yorulmaz, 2013). Berdasarkan hal ini, maka di negara-negara berkembang, inklusi keuangan menjadi sangat penting untuk menjadi perhatian bagi para pengambil kebijakan.

Menurut Yorulmaz (2013), tujuan dari inklusi keuangan adalah untuk mendorong masyarakat yang pada mulanya tidak punya akses ke jasa keuangan, bisa mempunyai akses ke jasa keuangan, dan juga tersedianya berbagai jasa keuangan dengan biaya yang terjangkau bagi rumah tangga dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Rendahnya akses industri kecil terhadap lembaga-lembaga kredit formal menyebabkan mereka cenderung

menggantungkan pembiayaannya pada modal sendiri atau bahkan modal dari rentenir. Pada umumnya di negara-negara yang sedang berkembang, masalah utama yang berkaitan dengan akses jasa keuangan adalah masalah agunan/ *collateral* (Yorulmaz, 2013).

Berdasarkan penelitian Bank Dunia yang dilakukan pada tahun 2012, ternyata hanya 32% penduduk Indonesia yang memiliki akses ke perbankan. Akses yang dimaksudkan disini adalah mempunyai simpanan dan pinjaman. Kondisi ini mendorong suburnya pertumbuhan lembaga keuangan non formal yang biasa disebut dengan Rentenir (World Bank, 2014). Makin maju suatu negara, inklusi keuangan makin tinggi. Di negara-negara berkembang sebagian besar inklusi keuangannya masih rendah, hal ini menyebabkan masyarakat atau UMKM terjebak dalam jeratan rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi.

Menurut Rosengard dan Prasetyantoko (2011), sektor keuangan Indonesia mempunyai dua paradoks yaitu: meskipun Indonesia telah menjadi pemimpin global dalam keuangan mikro selama 25 tahun terakhir, tetapi akses terhadap jasa keuangan mikro menurun. Selain itu, perbankan Indonesia yang *likuid, solvent* dan *profitable* dan perekonomian Indonesia yang tumbuh baik selama satu dasa warsa terakhir, namun pada sisi yang lain UMKM menghadapi permasalahan kredit. Para pengusaha UMKM sering mengeluhkan makin sulitnya mereka mendapatkan kredit dari perbankan untuk keperluan usaha mereka, karena sebagian besar kredit yang disalurkan oleh bank-bank besar di Indonesia lebih banyak ditujukan kepada perusahaan-perusahaan besar daripada ke UMKM.

Penelitian yang terkait dengan inklusi keuangan telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Onaolopo (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh inklusi keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Nigeria tahun 1982 sampai tahun 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inklusi keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Nigeria. Solo (2008), melakukan penelitian dengan mengambil tema dampak eksklusi keuangan di Amerika Latin terhadap biaya sosial dari orang miskin di perkotaan. Eksklusi keuangan merupakan lawan dari inklusi keuangan. Hasilnya adalah eksklusi keuangan berpengaruh positif terhadap biaya sosial masyarakat.

1.2. Perbankan Syariah

Munculnya bank syariah, yang dalam operasionalnya tidak mengenakan bunga menjadi suatu alternatif bagi UMKM untuk mendapatkan pembiayaan. Berkembangnya bank

syariah dalam tiga dekade terakhir adalah wujud komitmen masyarakat untuk menerapkan prinsip syariah dalam perbankan yang mewujudkan kesetaraan, kejujuran dan keadilan melalui sistem bagi hasil, dimana hal ini tidak dijumpai dalam perbankan konvensional. Berkembangnya bank syariah juga dapat diartikan sebagai tumbuhnya kesadaran keberagaman masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

Dalam kehidupan perekonomian suatu negara, perbankan merupakan salah satu agen pembangunan (*agent of development*), karena fungsi utama dari perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Peran intermediasi bank merupakan amanah yang harus dijalankan dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Dalam sistem perbankan modern, operasionalisasi perbankan selalu dikaitkan dengan bunga, baik ketika menghimpun dana dari masyarakat, maupun ketika menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Disebabkan karena interdependensinya dengan berbagai variabel ekonomi lainnya, maka setiap gejolak yang terjadi pada bunga akan mengakibatkan pula ketidakstabilan ekonomi.

Bank syariah tampil menawarkan alternatif pembiayaan yang tidak berbasis bunga, tetapi dengan sistem bagi hasil. Pengusaha UMKM dapat memanfaatkan pembiayaan usaha mereka dari bank syariah, tanpa ada kekhawatiran munculnya gejolak pada bunga pinjaman usaha mereka. Krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia pada tahun 1997-1998 membuktikan bahwa bank syariah relatif lebih tahan terhadap gejolak krisis ekonomi dibandingkan dengan bank konvensional. Pada saat krisis tersebut terjadi, 16 bank konvensional dilikuidasi pemerintah, dan 51 bank konvensional lainnya dibekukan pada tanggal 1 Nopember 1997, 13 bank diambil alih (BTO). Langkah ini mengurangi jumlah bank yang semula 237 pada akhir Juni 1997 menjadi 151 bank pada akhir Desember 2000 (Kristanto, 2006). Pada saat bank-bank konvensional terpuruk karena krisis, satu satunya bank syariah yang beroperasi saat itu adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) tetap tegak berdiri. Meskipun BMI sempat menderita kerugian pada tahun 1998, namun pada tahun berikutnya bisa pulih dan meraih untung (Kristanto, 2006). Kenyataan ini menunjukkan bukti bahwa perbankan syariah relatif lebih tahan terhadap krisis dibandingkan dengan bank konvensional. Krisis keuangan tidak berdampak pada kemampuan pengusaha untuk membayar kewajibannya di bank syariah. Hal ini disebabkan karena tingkat margin pada

pembiayaan bank syariah tidak berubah selama krisis berlangsung, berbeda dengan bank konvensional yang bunga kreditnya bisa berubah setiap saat (Sudarsono, 2009).

Eksistensi perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang lebih mengakomodasi dan memberi peluang bagi perkembangan perbankan syariah. Kehadiran undang-undang tersebut diperkuat lagi dengan lahirnya Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang secara tegas mengakui eksistensi dari perbankan syariah dan membedakannya dengan sistem perbankan konvensional. Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Menurut jenisnya, bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Semua kegiatan operasional di bank syariah dan kontrak keuangan yang ada di dalamnya harus sesuai dengan syariah Islam dan semuanya bertujuan untuk memenuhi tujuan diterapkannya hukum Islam (Ayub, 2007; Ngalim dan Ismail, 2015). Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudhârabah*), penyertaan modal (*musyârahah*), jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murâbahah*), sewa murni tanpa pilihan (*ijârah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijârah wa iqtinâ*), akad *salam*, akad *istithnâ*, sewa-menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan (*ijârah al-muntahiya bi al-tamlîk*), dan prinsip lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Melihat ruang lingkup kegiatan usahanya dapat dinyatakan bahwa produk perbankan syariah lebih variatif dibandingkan dengan produk bank konvensional. Bank syariah memiliki *unique product*, yang tidak dipunyai oleh bank konvensional berupa pembiayaan bagi hasil yang dikembangkan dalam produk pembiayaan *mushârahah (joint venture)* dan *mudhârabah* (Huda, 2012). Dengan adanya produk pembiayaan ini bank syariah dapat memberikan dampak yang besar terhadap pertumbuhan sektor riil khususnya UMKM. Hal ini dikarenakan pola *mudhârabah* dan *musyârahah* merupakan pola investasi langsung pada sektor riil. Hal ini memungkinkan produk bank syariah memberi peluang yang lebih luas dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah deposan maupun debitur sesuai dengan kebutuhan nyata mereka.

Indonesia dapat dikatakan terlambat dalam memulai praktek perbankan syariah dibanding Malaysia, namun secara perlahan tapi pasti perbankan syariah Indonesia tumbuh secara bertahap. Bertambahnya perbankan syariah yang semakin pesat dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi syariah yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan mulai mendapatkan posisi dalam hati masyarakat Indonesia. Perkembangan perbankan syariah yang pesat ini merupakan peluang yang besar bagi pertumbuhan ekonomi sebagai alternatif dari kegagalan sistem ekonomi konvensional. Data jumlah bank syariah di Indonesia dalam kurun waktu 2011-2018 dapat dilihat pada Tabel 1.1

Tabel 1. 1. Jumlah Bank Syariah di Indonesia

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bank Umum Syariah	11	11	11	12	12	13	13	14
Unit Usaha Syariah	24	24	23	22	22	21	21	20
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	155	158	163	163	161	166	167	167

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

Pada tabel 1.1 di atas diketahui bahwa jumlah Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah relatif tidak banyak berubah. Bahkan untuk Unit Usaha Syariah mengalami penurunan yang disebabkan karena beberapa Unit Usaha Syariah mengalami konversi menjadi Bank Umum Syariah. Meski jumlah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah tidak banyak berubah, namun jika dilihat jumlah pembiayaan yang dikeluarkan menunjukkan penambahan yang signifikan seperti terlihat pada tabel 1.2. Adapun jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah cenderung juga bertambah dari tahun ke tahun.

Pada tabel 1.2 dapat dilihat bahwa pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat dari Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dari tahun ke tahun bertambah. Pada tabel 1.2 tersebut dapat diketahui bahwa ada tiga skema pembiayaan bank syariah yang paling banyak dikeluarkan, yaitu *murobahah*, *musyarokah*, dan *mudhorobah*. Skema *murobahah* adalah skema dengan prinsip jual beli merupakan skema yang paling banyak dilakukan di bank syariah. Bank syariah banyak menggunakan skema *murobahah* karena dengan skema ini, bank syariah mendapatkan kepastian, baik kepastian *cashflow* maupun kepastian waktu angsuran. Dengan demikian hal ini akan mengurangi resiko ketidakpastian bisnis yang akan dihadapi oleh bank syariah jika bank syariah menggunakan akad *mudhorobah* atau *musyarokah* yang berdasarkan prinsip bagi hasil. Skema *musyarokah* dan *mudhorobah* adalah

skema dengan prinsip bagi hasil, menempati urutan kedua dan ketiga dalam pembiayaan di bank syariah. Skema bagi hasil tidak memberikan kepastian, baik kepastian *cashflow* maupun kepastian waktu angsuran. Skema ini lebih beresiko dibanding dengan skema *murobahah*.

Tabel 1. 2. Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (dalam milyar rupiah)

Akad	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Mudhorobah	10.229	12.023	13.628	14.354	14.820	15.292	17.090	15.866
Musyarokah	18.960	27.667	39.874	49.336	60.713	78.421	101.561	129.641
Murobahah	56.365	88.004	110.565	117.371	122.111	139.536	157.814	164.088
Qordh	12.937	12.090	8.995	5.965	3.951	4.731	6.349	7.674
Istisna	326	376	582	633	770	878	1.189	1.609
Ijarah	3.839	7.345	10.481	11.620	10.631	9.150	9.230	10.597
Salam	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

Kedadaan ini tidak hanya terjadi pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, tetapi juga terjadi pada pembiayaan syariah yang disalurkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

1.3. Peran Perbankan Syariah

Peranan perbankan sebagai salah satu sumber pembiayaan ekonomi di Indonesia masih menjadi hal yang utama, karena dominasi perbankan dalam sistem keuangan Indonesia. Peran perbankan, khususnya perbankan syariah di Indonesia menjadi sangat vital, hal ini karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Kehadiran bank syariah menjadi alternatif bagi masyarakat yang menghendaki pembiayaan bebas riba. Dengan adanya konsep bagi hasil di dalam salah satu jasa perbankan syariah dapat mendorong pembangunan ekonomi melalui pembagian pendapatan yang sama mempercepat terciptanya keadilan sosial dan pertumbuhan dalam jangka panjang. Nazreen dan Abduh (2012) menyatakan bahwa pembiayaan perbankan syariah memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi, baik secara jangka panjang, maupun jangka pendek. Dengan alasan itu pula pengembangan perbankan syariah dijadikan sebagai salah satu kebijakan pemerintah Bangladesh. Hal ini diperkuat oleh pendapat Abdalla yang menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara bank syariah dan pembangunan ekonomi (Abdalla, 2013). Diharapkan

bank syariah dapat meningkatkan kontribusinya dalam pembangunan ekonomi, selain mencapai tingkat sosial pembangunan kerjasama, solidaritas, dan persaudaraan antara anggota masyarakat, depositan dan investor.

Dalam kaitannya dengan UMKM, perbankan syariah telah menunjukkan perhatiannya dalam pengembangan UMKM. Berdasarkan jumlah dana yang disalurkan untuk pembiayaan UMKM mengalami peningkatan yang cukup signifikan, seperti terlihat pada Tabel 1.3. Misalnya pada tahun 2006, pembiayaan yang disalurkan 3,27 milyar. Sepuluh tahun kemudian naik menjadi 147,5 milyar rupiah. Menurut Soekarni (2014), bank syariah selama ini lebih banyak mengalokasikan pembiayaan kepada UMKM dibandingkan dengan pembiayaan selain UMKM, sekitar 73% dari dana yang disalurkan. Pembiayaan kepada UMKM terbagi ke dalam 2 kelompok besar, yaitu pembiayaan dengan akad penyertaan modal dan jual beli. Pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dilakukan dalam akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Sedangkan pembiayaan dalam akad jual beli sebagian besar dalam bentuk *murabahah*.

Tabel 1.3. Pembiayaan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Kepada UMKM Tahun 2006-2017

Tahun	Pembiayaan
2006	3.276.650
2007	5.530.167
2008	11.489.933
2009	15.231.942
2010	20.444.907
2011	27.944.311
2012	38.194.974
2013	46.886.000
2014	68.181.000
2015	102.655.000
2016	147.505.000
2017	184.122.000

Sumber: Data OJK, 2017

1.4. Inklusi Keuangan Perbankan Syariah

Inklusi keuangan perbankan syariah menunjukkan aksesabilitas, keterjangkauan, dan penggunaan jasa keuangan perbankan syariah oleh masyarakat. Penelitian terkait dengan inklusi keuangan perbankan syariah juga pernah dilakukan oleh Naceur et al. (2015), yang meneliti inklusi keuangan perbankan syariah di negara-negara yang tergabung dalam

Organization for Islamic Corporation (OIC) dengan hasil masih rendahnya inklusi keuangan di negara –negara tersebut, termasuk Indonesia.

Beberapa peneliti Indonesia yang mengadakan penelitian berkaitan dengan inklusi keuangan diantaranya adalah Widarwati et al.(2019), yang meneliti dampak inklusi keuangan terhadap stabilitas bank syariah di Indonesia pada tahun 2012-2016 dengan mengambil sampel 5 bank syariah di Indonesia. Hasilnya adalah inklusi keuangan berpengaruh positif terhadap stabilitas keuangan bank syariah. Prastowo (2019) meneliti pengaruh keuangan inklusi perbankan syariah terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Penelitian dilakukan di 33 propinsi dari tahun 2014 sampai tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inklusi keuangan perbankan syariah memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan.Fahmy et al.(2016) melakukan penelitian keuangan inklusif terhadap kredit yang disalurkan pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah Indonesia. Penelitian dilakukan di 33 propinsi di Indonesia pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013. Hasilnya adalah inklusi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredit yang disalurkan pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Selanjutnya penelitian lain yang dilakukan oleh Putri (2016), yang melakukan penelitian terhadap 163 *Islamic Rural Banks* dengan 402 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia pada tahun 2015, mendapatkan temuan bahwa *Islamic Rural Bank* (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah/ BPRS) mempunyai kontribusi besar dalam inklusi keuangan, bahkan jauh sebelum program inklusi keuangan itu sendiri digulirkan.

Data tentang inklusi keuangan syariah di Indonesia dari berbagai propinsi cukup variatif seperti terlihat pada tabel 1.4 berikut ini. Berdasarkan pada tabel 1.4 dapat dilihat bahwa lima propinsi yang rerata inklusi keuangan syariahnya tertinggi adalah Bangka Belitung, D I Yogyakarta, Bengkulu, Aceh, dan Sumatra Barat. Bangka Belitung adalah propinsi dengan rerata inklusi keuangan syariah tertinggi sebesar 0,702. Adapun lima propinsi yang terendah adalah Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat. Dari tahun 2010 sampai tahun 2013 rerata inklusi keuangan syariah cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 cenderung mengalami penurunan. Data dalam lima tahun ini menunjukkan bahwa beberapa propinsi dengan inklusi keuangan syariah rendah adalah propinsi-propinsi yang ada di Nusa Tenggara, pulau Sulawesi, pulau Kalimantan, dan Papua,. Propinsi-propinsi di Jawa rerata inklusi keuangan syariahnya relatif diatas propinsi-propinsi tersebut.

Tabel 1. 4. Inklusi Keuangan Syariah Indonesia Tahun 2010 - 2015

Inklusi Keuangan Syariah Provinsi di Indonesia							
Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Average
KEP. BANGKA BELITUNG	0,7260	0,6990	0,6970	0,6970	0,6970	0,6960	0,7006
DI YOGYAKARTA	0,5290	0,5410	0,5590	0,5460	0,5590	0,5620	0,5522
BENGKULU	0,3490	0,3530	0,4000	0,3410	0,3060	0,2810	0,3263
ACEH	0,3790	0,3250	0,3150	0,3100	0,3150	0,3170	0,3242
SUMATERA BARAT	0,2710	0,2730	0,2690	0,2540	0,2500	0,2440	0,2567
BANTEN	0,2180	0,2070	0,1960	0,1960	0,2060	0,1910	0,2009
NUSA TENGGARA BARAT	0,1630	0,1760	0,1800	0,1770	0,1900	0,1740	0,1775
LAMPUNG	0,1260	0,1520	0,1730	0,1950	0,1960	0,2130	0,1835
JAWA BARAT	0,1770	0,1650	0,1740	0,1850	0,1740	0,1700	0,1735
JAWA TIMUR	0,1520	0,1430	0,1480	0,1540	0,1580	0,1500	0,1514
KEP. RIAU	0,1070	0,0990	0,1630	0,2130	0,1700	0,0980	0,1375
SULAWESI SELATAN	0,1660	0,1210	0,1210	0,1450	0,1540	0,1410	0,1425
JAWA TENGAH	0,1220	0,0910	0,1360	0,1410	0,1430	0,1430	0,1328
KALIMANTAN TENGAH	0,0180	0,0000	0,2560	0,0600	0,0620	0,2830	0,1349
SUMATERA UTARA	0,1100	0,1220	0,0990	0,0950	0,0950	0,0940	0,1005
PAPUA BARAT	0,0000	0,0000	0,1680	0,1690	0,1670	0,0000	0,0787
RIAU	0,1170	0,1130	0,0620	0,0520	0,0610	0,0840	0,0800
PAPUA	0,0750	0,0490	0,0460	0,0480	0,0770	0,0480	0,0576
KALIMANTAN SELATAN	0,0460	0,0400	0,0560	0,0530	0,0500	0,0490	0,0491
MALUKU UTARA	0,0010	0,0010	0,0430	0,0410	0,0490	0,1550	0,0651
KALIMANTAN TIMUR	0,0540	0,0430	0,0410	0,0400	0,0460	0,0460	0,0453
BALI	0,0490	0,0430	0,0420	0,0390	0,0370	0,0380	0,0404
DKI JAKARTA	0,0440	0,0420	0,0420	0,0420	0,0430	0,0300	0,0391
MALUKU	0,0000	0,0000	0,0000	0,2400	0,0000	0,0000	0,0300
SUMATERA SELATAN	0,0240	0,0220	0,0210	0,0210	0,0210	0,0210	0,0215
KALIMANTAN BARAT	0,0010	0,0010	0,0020	0,0020	0,0020	0,0020	0,0018
GORONTALO	0,0020	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0011
JAMBI	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010
SULAWESI BARAT	0,0000	0,0000	0,0010	0,0050	0,0000	0,0000	0,0008
SULAWESI TENGAH	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010
SULAWESI TENGGARA	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010
SULAWESI UTARA	0,0000	0,0000	0,0010	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001
NUSA TENGGARA TIMUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Average Total	0,1220	0,1160	0,1340	0,1350	0,1280	0,1280	0,1275

Sumber : Umar,2017

1.5. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia

Sektor ekonomi di Indonesia secara nyata dan secara mayoritas didukung oleh sektor UMKM. UMKM mempunyai peranan positif dalam memelihara keseimbangan ekonomi dan pembangunan sosial, menurunkan pengangguran, menciptakan peluang kerja, dan dengan fleksibilitas produksinya dapat mengikuti perubahan kondisi pasar secara efektif (Elasrag, 2016). UMKM menjadi pemain ekonomi yang tidak bisa diremehkan perannya. Dalam pengembangan ekonomi daerah yang sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka pengembangan UMKM lokal yang sesuai potensinya menjadi sangat penting. UMKM memiliki posisi yang strategis dalam pengembangan ekonomi daerah.

Di negara-negara maju maupun negara industri baru (*Newly Industrialized Countries*) UMKM berperan dalam peningkatan ekspor, sedangkan di negara-negara yang berkembang peranan UMKM sering dihubungkan dengan permasalahan sosial suatu negara, misalnya peran UMKM dalam membantu pemerintah mengurangi kemiskinan, menyerap tenaga kerja serta mengurangi pengangguran, dan pemerataan pendapatan. Jumlah UMKM Indonesia menunjukkan kecenderungan yang menaik.

Berdasarkan Tabel 1.5 berikut ini, dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun jumlah UMKM, jumlah tenaga kerja di dalamnya, dan kontribusi UMKM terhadap ekspor cenderung yang terus meningkat. Hal ini disebabkan karena tumbuhnya UMKM yang berorientasi ekspor. Jumlah UMKM meningkat rata-rata 4,5% per tahun, sedangkan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada UMKM meningkat rata-rata 3% per tahun.

Tabel 1. 5. Jumlah UMKM Indonesia tahun 2000-2017

Tahun	Jumlah UMKM (unit)	Jumlah tenaga kerja (orang)	Nilai Ekspor (dalam Rp.Miliar)
2000	39.784.036	72.704.416	75.448,610
2001	39.964.080	74.687.428	80.846,520
2002	41.944.494	77.807.897	87.290,030
2003	43.460.242	81.942.353	77.096,710
2004	44.777.387	80.446.600	95.548,240
2005	47.017.062	83.586.616	110.338,06
2006	49.021.803	87.909.598	123.767,87
2007	50.145.800	90.491.930	140.363,84
2008	51.409.612	94.024.278	178.008,28
2009	52.764.603	96.211.332	162.254,52
2010	53.823.732	99.401.775	175.894,89
2011	55.206.444	101.722.458	187.441,82
2012	56.534.592	107.657.509	166.626,50
2013	57.895.721	114.144.082	182.112,70
2014	59.192.943	118.168.043	197.484,90
2015	60.490.165	122.192.963	212.857,11
2016	61.787.387	126.215.963	228.229,32
2017	62.922.617	116.673.416	298.208,70

Sumber: Kementrian Negara Koperasi dan UMKM, 2017

Sebaran UMKM di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1.6, sebagian besar UMKM berada di pulau Jawa yaitu sebesar 60,74 %, padahal luas pulau Jawa hanya sekitar 7% dari seluruh wilayah Indonesia. Pulau Sumatra menempati urutan kedua dengan jumlah UMKM sebesar 18,67%, disusul Sulawesi 8,09%, Bali dan Nusa Tenggara sebesar 5,88%, Kalimantan di urutan berikutnya dengan jumlah UMKM 5,16%, Maluku dan Papua 1,72%.

Tabel 1. 6. Jumlah UMKM di berbagai pulau di Indonesia tahun 2016

Pulau	Jumlah UMKM	Distribusi (%)
Sumatra	4.897.457	18,61
Jawa	15.931.889	60,74
Bali dan Nusa Tenggara	1.495.526	5,68
Kalimantan	1.352.324	5,16
Sulawesi	2.134.579	8,09
Maluku dan Papua	451.874	1,72
Jumlah	26.263.649	100

Sumber: BPS (2017)

Dalam tatanan pembangunan nasional, UMKM adalah bagian integral dunia usaha berupa kegiatan ekonomi rakyat yang kedudukan, potensi, dan perannya sangat strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian yang semakin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi. UMKM berperan penting dalam perekonomian suatu negara, bahkan menjadi instrumen utama dalam perekonomian pada kebanyakan negara maju dan negara berkembang (Islam et al., 2014; Mohammed, 2015), serta mendapat perhatian utama pemerintah dan penentu kebijakan ekonomi (Inyang, 2013; Bazza, Maiwada dan Daneji, 2014). Menurut Kementerian Negara Koperasi dan UKM (2005), peran UMKM dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari: (1) kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, (2) penyedia lapangan kerja yang terbesar, (3) pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, (4) pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta (5) sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor.

Terdapat lima argumen yang relevan mengenai peran UMKM dalam pembangunan ekonomi regional, yaitu (1) menciptakan lapangan kerja, (2) memiliki kemampuan memunculkan industri-industri kecil baru lainnya yang bersifat fleksibel dan bervariasi serta memunculkan enterpreuner baru yang berani menanggung resiko, (3) memiliki kemampuan mendorong terjadinya persaingan secara intensif antar UMKM, yang sangat penting untuk mendorong lingkungan usaha yang kondusif, (4) mendorong inovasi, dan (5) mampu meningkatkan hubungan industrial dan menyediakan lingkungan kerja yang baik dengan para buruhnya (Sulistiyastuti, 2004).

Di negara- negara maju, UMKM memberikan kontribusi dalam peningkatan ekspor dan sebagai subkontraktor yang menyediakan berbagai input bagi dunia usaha yang berskala

besar, sedangkan di negara-negara berkembang UMKM berperan membantu pemerintah dalam hal pengurangan pengangguran, pemberantasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan (Sulistiyastuti, 2004). Menurut Beaver and Prince (2004), kontribusi UMKM yang paling penting adalah menciptakan lapangan kerja, inovasi, bidang ekspor dan produksi sektor swasta. Kementerian Koperasi dan UMKM menyebutkan bahwa usaha mikro dan kecil menjadi pondasi perekonomian nasional Indonesia (Muharam, 2017). Kontribusi UMKM terhadap penyediaan kesempatan kerja di Indonesia sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara Asia yang lain, seperti terlihat pada Tabel 1.7.

Tabel 1. 7. Kontribusi UMKM dalam Penyediaan Kesempatan Kerja Beberapa Negara di Asia

Negara	Persentase Lapangan Kerja
Indonesia	97,2 %
Jepang	70,2 %
India	77,4 %
Pakistan	70 %
Filiphina	61 %
Bangladesh	40 %

Sumber: Malaysia World's Islamic Finance Market Place, 2016

Selain itu UMKM berperan penting dalam pertumbuhan GDP di negara berkembang (Huda, 2012). Kontribusi UMKM terhadap GDP di beberapa negara Asia dapat dilihat pada Tabel 1.8 . Pada tabel 1.8 berikut ini dapat dilihat bahwa UMKM Indonesia berkontribusi besar terhadap GDP Indonesia. Bahkan dibandingkan dengan beberapa negara Asia lainnya kontribusi UMKM Indonesia terhadap GDP paling tinggi.

Tabel 1. 8. Kontribusi UMKM Terhadap GDP di Beberapa Negara Asia

Negara	Kontribusi UKM terhadap GDP
Indonesia	57,8
Jepang	50
Republik Korea	49,4
Vietnam	40
Thailand	38,7
Filiphina	35,7
Malaysia	31,9
Pakistan	30
Bangladesh	22,5

Sumber: Malaysia World's Islamic Finance Market Place, 2016

Pada saat krisis ekonomi, banyak perusahaan besar yang bangkrut, namun UMKM mampu bertahan terhadap guncangan perekonomian dan krisis ekonomi (Amah, 2013). Beberapa alasan yang sering disebutkan yang membuat UMKM tetap bertahan adalah sebagian besar modal berasal dari milik pribadi, UMKM dapat dikembangkan pada semua sektor usaha, usahanya bersifat fleksibel, merupakan industri padat karya, produk yang dihasilkan merupakan kebutuhan primer masyarakat, sesuai dengan kehidupan pada tingkat bawah. Sektor UMKM mempunyai keunggulan dan sangat potensial untuk lebih dikembangkan melalui suatu kebijakan yang tepat dan dukungan dari lembaga yang tepat pula. Berdasarkan kenyataan bahwa untuk memajukan dan meningkatkan peran usaha kecil dan menengah, haruslah dilakukan dengan segala daya upaya dan sepenuh hati, oleh karena itu sangat dimungkinkan dan perlunya peninjauan kembali fungsi perbankan yang mungkin belum berperan optimal didalam membantu pengusaha kecil dan menengah untuk memperoleh pembiayaan untuk usaha UMKM. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan pengusaha besar yang mempunyai kesempatan untuk memperoleh pelayanan dan kemudahan dalam pembiayaan usahanya.

Kajian yang berkaitan dengan UMKM telah banyak dilakukan. Penelitian Susilo (2010) mendapatkan kesimpulan bahwa UMKM menghadapi berbagai kendala untuk berkembang, yaitu: terbatasnya akses permodalan, terbatasnya akses pasar, dan terbatasnya akses informasi mengenai sumber daya dan teknologi. Beberapa kendala lain yang dihadapi dalam pengembangan usaha mikro kecil di Indonesia diantaranya adalah adanya pungutan liar mulai dari proses perijinan sampai pengadaan barang dan ekspor barang tersebut, kebijakan makro pemerintahan yang kurang mendukung, dan permasalahan pembiayaan yang prosesnya lama dan bunga yang tinggi dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya (Hariyati, 2010). Peneliti lain menyatakan bahwa masalah utama yang dihadapi oleh UMKM adalah kesulitan akses terhadap lembaga keuangan formal (Ayyagari, Kunt dan Maksimovic, 2008).

Dibandingkan dengan perusahaan besar, UMKM menghadapi hambatan lebih besar dalam mengakses lembaga keuangan (Beck dan Kunt, 2006). Sektor UMKM mengalami kesulitan dalam memperoleh modal dari bank. Salah satu sebabnya adalah tingkat suku bunga kredit yang tinggi dan diharuskan adanya jaminan kebendaan (*collateral minded*) dalam memperoleh kredit yang sulit dipenuhi. Susilo dan Sutarta (2004), menyatakan bahwa permasalahan dalam hal akses pembiayaan perbankan bagi UMKM dikarenakan pada umumnya UMKM tidak *bankable*, pada hal pembiayaan ini diperlukan untuk investasi

peralatan dan modal usaha. Beck dan Kunt (2006), juga menyatakan bahwa hambatan utama UMKM dalam meraih kesuksesan adalah akses permodalan, selain pemasaran dan teknologi. Demikian pula hasil penelitian dari Mukumba (2014) mendapatkan suatu kesimpulan bahwa salah satu faktor utama yang berpengaruh terhadap kesuksesan UMKM adalah modal yang cukup dan pinjaman kredit yang sesuai keperluan. Tentu saja pinjaman kredit dari bank dapat diperoleh oleh UMKM jika UMKM mempunyai hubungan yang erat dengan pihak perbankan. Hal ini juga diperkuat oleh hasil penelitian dari Kemayel (2015) yang menyatakan bahwa hubungan UMKM dengan bank menjadi salah satu faktor penting penunjang kesuksesan UMKM. Di Indonesia pada umumnya UMKM sulit mendapatkan pendanaan dari perbankan karena bank pada umumnya lebih suka mendanai perusahaan besar (Rosengard dan Prasetyantoko, 2011). Haneef (2010) menyatakan bahwa salah satu faktor yang menghambat pertumbuhan UMKM adalah suku bunga yang tinggi dan kesulitan UMKM dalam mengakses kredit.

Dalam persaingan yang sangat kompetitif ini, UMKM mau tidak mau harus bersaing dengan usaha besar. Hal ini merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh UMKM, sebab untuk bisa bersaing pada umumnya diperlukan sumber dana dan daya yang tidak sedikit. Dalam persaingan seperti ini, biasanya UMKM selalu berada pada pihak yang tidak diuntungkan. Oleh karena itu UMKM harus mencari sumber pembiayaan dari lembaga keuangan alternatif selain bank konvensional. Perbankan syariah menjadi pilihan alternatif bagi UMKM untuk mendapatkan pembiayaan bagi pengembangan usaha mereka. Dengan melihat sejarah dari peristiwa krisis ekonomi yang membuktikan ketangguhan bank syariah dan UMKM, maka sudah sepantasnya perbankan syariah dan UMKM bisa bersinergi untuk menggerakkan perekonomian negara. Kehadiran bank syariah dapat memberikan dampak yang besar terhadap pertumbuhan dan kinerja UMKM. Dengan semaraknya perkembangan sektor perbankan syariah maka diharapkan dapat membantu perkembangan UKM secara optimal.

1.6. Rumusan Masalah

Inklusi keuangan menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia terbukti dengan dirumuskannya Strategi Nasional Keuangan Inklusif untuk menghilangkan *financial barriers* terhadap layanan jasa keuangan. Kehadiran perbankan syariah bisa menjadi alternatif bagi UMKM untuk mendapatkan pembiayaan, dikarenakan sulitnya mendapatkan kredit dari perbankan konvensional. Hal ini dikarenakan tersedianya produk-produk khusus bank

syariah yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik UMKM dan berdasarkan prinsip bagi hasil. Sebagaimana diketahui hambatan utama yang dihadapi oleh UMKM adalah minimnya akses terhadap jasa keuangan formal (Ayyagari, Kunt dan Maksimovic,2008). Melihat demikian pentingnya peranan UMKM dalam perekonomian nasional, UMKM perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan juga lembaga keuangan, termasuk bank syariah yang ada, agar bisa berkembang lebih cepat lagi pada masa yang akan datang.

Sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1.1 sebelumnya bahwa jumlah bank syariah secara keseluruhan makin bertambah dari waktu ke waktu, demikian pula pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat, khususnya *murabahah*, *musyarokah*, dan *mudhorobah* makin besar dari tahun ke tahun, baik pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah (BUS), maupun Unit Usaha Syariah (UUS) seperti terlihat pada tabel 1.2, Pada sisi yang lain jumlah UMKM makin bertambah sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1.5, namun demikian UMKM menghadapi permasalahan kredit, disebabkan karena perbankan lebih suka mendanai usaha besar daripada mendanai UMKM (Rosengard dan Prasetyantoko, 2011; Shah et al.2013). Penyebab yang lain sulitnya UMKM mendapatkan pendanaan adalah karena bunga pinjaman yang tinggi (Haneef,2010). Kesenjangan faktual terjadi karena kehadiran perbankan syariah ternyata tidak serta merta dapat menjadi alternatif bagi pengusaha UMKM dalam mendapatkan pembiayaan. Padahal operasional bank syariah yang pada beberapa produknya memiliki karakteristik berbeda dengan bank konvensional di dalam hal pembiayaan sebenarnya bisa menjadi solusi pendanaan bagi UMKM.

Meskipun penelitian tentang inklusi keuangan, penelitian perbankan syariah, dan penelitian tentang UMKM telah banyak dilakukan, tetapi penelitian yang mengkaitkan antara inklusi keuangan, perbankan syariah, dan UMKM belum banyak dilakukan, oleh karena alasan itulah penelitian ini dilakukan. Apalagi indikator untuk mengukur inklusi keuangan perbankan syariah menggunakan indikator inklusi keuangan yang disarankan oleh Sarma (2012) yang meliputi tiga dimensi inklusi keuangan, yaitu *banking penetration*, *availability of banking service*, dan *usage* sejauh ini belum banyak dilakukan. Uraian fakta, kajian empiris sebagaimana diuraikan sebelumnya memotivasi dilakukannya penelitian mengenai peran inklusi keuangan syariah terhadap kinerja UMKM.

1.7. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh *banking penetration* bank syariah terhadap kinerja UMKM ?
2. Bagaimana pengaruh *availability of banking service* bank syariah terhadap kinerja UMKM?
3. Bagaimana pengaruh *usage* bank syariah terhadap kinerja UMKM?

Selain variabel utama yang berupa inklusi keuangan, juga dianalisis beberapa variabel kontrol seperti tersebut di bawah ini,

4. Bagaimana pengaruh *banking penetration* bank konvensional terhadap kinerja UMKM?
5. Bagaimana pengaruh *availability of banking service* bank konvensional terhadap kinerja UMKM?
6. Bagaimana pengaruh *usage* bank konvensional terhadap kinerja UMKM?
7. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja UMKM?
8. Bagaimana pengaruh infrastruktur terhadap kinerja UMKM?
9. Bagaimana pengaruh dukungan pemerintah terhadap kinerja UMKM?

1.8. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu kepada latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh inklusi keuangan perbankan syariah terhadap kinerja UMKM. Dikarenakan dimensi inklusi keuangan perbankan syariah meliputi *banking penetration*, *availability of banking service*, dan *usage*, maka tujuan penelitian dapat dirinci sebagai berikut:

1. untuk menganalisis pengaruh *banking penetration* bank syariah terhadap kinerja UMKM.
2. untuk menganalisis pengaruh *availability of baking service* bank syariah terhadap kinerja UMKM.
3. untuk menganalisis pengaruh *usage* bank syariah terhadap kinerja UMKM.

1.9. Kontribusi Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ekonomi dan keuangan Islam, khususnya berkenaan dengan inklusi keuangan perbankan syariah dan pengaruhnya terhadap kinerja UMKM. Penelitian yang telah dilakukan selama ini lebih banyak berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan pertumbuhan jumlah UMKM secara umum. Kalaupun ada yang meneliti tentang hubungan bank dengan UMKM, bank yang dijadikan obyek penelitian adalah bank konvensional, bukan bank syariah. Demikian pula penelitian yang berkaitan inklusi keuangan, pada umumnya yang diteliti adalah inklusi keuangan perbankan konvensional, bukan perbankan syariah. Kalau ada penelitian tentang inklusi keuangan perbankan syariah, indikator untuk menilai inklusi keuangan biasanya menggunakan indikator keuangan yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Sejauh ini belum ada suatu penelitian yang mengkaji peranan perbankan syariah, khususnya inklusi keuangan perbankan syariah terhadap UMKM dengan menggunakan dimensi inklusi keuangan dari Sarma (2012). Dengan penelitian ini bisa diketahui apakah inklusi keuangan perbankan syariah berpengaruh dalam meningkatkan kinerja UMKM.

Kebaruan dalam penelitian ini adalah memasukkan variabel independen yaitu inklusi keuangan, yang terdiri dari *banking penetration*, *availability of banking service*, dan *usage*, yang disarankan oleh Sarma (2012). Penggunaan variabel inklusi keuangan ini dipandang perlu untuk melihat sejauh mana inklusi keuangan perbankan syariah dapat meningkatkan kinerja UMKM. Dengan melibatkan tiga dimensi inklusi ini diharapkan hasil yang diperoleh lebih komprehensif untuk mengukur inklusi keuangan.

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi dalam pengambilan kebijakan otoritas perbankan Indonesia untuk lebih mengoptimalkan peranan perbankan syariah sebagai salah satu lembaga keuangan formal yang diakui keberadaannya secara hukum di Indonesia. Makin besar peran bank syariah di Indonesia, makin meningkatkan kinerja UMKM, yang merupakan bagian terbesar usaha di Indonesia.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Bank Syariah

Bank syariah adalah sistem perbankan yang dalam usahanya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam dengan mengacu kepada Al Qur'an dan Hadits. Maksud dari sistem yang sesuai syariah Islam ialah beroperasi mengikuti tata cara bermuamalat secara Islam dan menjauhi praktik yang mengandung unsur-unsur riba dan melakukan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil pembiayaan (Siamat, 2005). Bank syariah muncul sebagai alternatif bagi masyarakat yang ingin menghindarkan diri dari sistem bunga yang diberlakukan di bank konvensional. Bank syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan mempunyai peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia.

Tonggak perkembangan perbankan syariah/Islam di dunia dimulai dengan didirikannya *Islamic Development Bank* (IDB) pada tahun 1975 yang berpusat di Jeddah. Bank pembangunan yang menyerupai Bank Dunia (World Bank) itu dibentuk oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang anggota-anggotanya adalah negara-negara Islam, termasuk Indonesia. Berdirinya IDB ini kemudian memicu berdirinya bank-bank syariah / bank Islam di seluruh dunia, termasuk di kawasan Timur Tengah, misalnya Dubai Islamic Bank (1975), Kuwait Finance House (1977). Di kawasan Asia Tenggara perbankan Islam dimulai dengan didirikannya Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) pada tahun 1983. Di Indonesia bank syariah pertama adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang didirikan pada tahun 1992. Meskipun perkembangannya agak lambat dibanding negara muslim lainnya, bank syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan. Pelaku perbankan syariah di Indonesia terdiri atas tiga jenis, yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dengan jumlah 13 bank, Unit Usaha Syariah (UUS) 21 bank, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebanyak 167 bank (OJK, 2017) dengan total aset seluruhnya per akhir September 2017 sekitar Rp 405,30 triliun dan telah mencapai 5,57% dari aset perbankan di Indonesia.

Perbedaan utama antara bank konvensional dan bank syariah adalah tidak diberlakukannya sistem bunga di bank syariah, baik dalam hal imbalan kepada nasabah yang menempatkan dananya di bank syariah, maupun dalam hal nasabah sebagai peminjam dalam pembiayaan di bank syariah. Pada dasarnya produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah,

untuk bank umum syariah, dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu produk penyaluran dana, produk penyimpanan dana, dan produk jasa (Peraturan Bank Indonesia No 6 / PBI / 2004). Produk penyaluran dana yang disalurkan kepada nasabah dibedakan menjadi pembiayaan dengan prinsip jual beli (*murabahah, istisna*'), pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah, musyarakah*), pembiayaan dengan prinsip sewa (*ijarah dan ijarah mutahia bittamlik*), dan jasa pelayanan (*wakalah, hawalah, kafalah, rahn*). Produk penghimpunan dana meliputi giro dan tabungan dengan prinsip *Wadiah* dan tabungan dengan prinsip *Mudhorobah*.

Adapun kegiatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) meliputi penghimpunan dana dan penyaluran dana. Kegiatan penghimpunan dana terdiri dari tabungan dengan prinsip *wadiah* dan atau *mudharabah*, dan deposito berjangka dengan prinsip *mudharabah*. Sedangkan kegiatan penyaluran dana terdiri dari: transaksi jual beli dengan prinsip *murabahah*, jual beli dengan prinsip *istisna*, jual beli dengan prinsip *salam*, pembiayaan bagi hasil dengan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa menyewa dengan prinsip *ijarah*, dan pinjam meminjam dengan prinsip *qardh*. Keberadaan bank syariah tersebut dengan berbagai produk yang berbeda dengan bank konvensional tersebut bisa menjadi pilihan bagi masyarakat yang karena keyakinan agamanya ragu menempatkan dana atau mendapatkan pinjaman dari bank konvensional. Terlebih dengan telah keluarnya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia bahwa bunga bank termasuk riba.

2.1.1. Pembiayaan *murabahah*

Secara sederhana *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. *Murabahah* berasal dari kata "*ribhu*" (keuntungan) adalah transaksi jual beli dimana bank menyebutkan jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*). Secara istilah *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Karim, 2006). Dikarenakan dalam definisinya disebut adanya "keuntungan yang disepakati", karakteristik *murabahah* adalah penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.

2.1.2. Pembiayaan salam

Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Akad *salam* atau *salaf* adalah penjualan sesuatu yang akan datang dengan imbalan sesuatu yang sekarang atau menjual sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan (Zuhaili, 2007). Maksudnya modal diberikan di awal dan menunda barang hingga tenggat waktu tertentu. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh, sedang pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, nasabah sebagai penjual. Dalam akad salam, pembeli disebut *rabbus salam* atau *muslim*, penjual disebut *al muslim ilaih*, barang yang dipesan disebut *muslam fih*, dan harga barang atau modal disebut *ra's maal* *salam*. Dalam praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau cicilan. Harga jual yang ditetapkan bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal bank menjualnya secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan (*bridging finance*), sedangkan dalam hal bank menjualnya secara cicilan, kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.

2.1.3. Pembiayaan *istishna'*

Secara bahasa, *istishna'* berarti *thalabus shun'ah* (meminta dibuatkan barang). Dalam istilah para *fuqaha*, *istishna'* didefinisikan sebagai akad meminta seseorang untuk membuat sebuah barang tertentu dalam bentuk tertentu (Zuhaili, 2007). Didalam fatwa DSN – MUI, dijelaskan bahwa jual beli *istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*). Pada dasarnya pembiayaan *istishna'* merupakan transaksi jual beli cicilan dimana barang diserahkan di belakang, uang dibayar secara cicilan (Karim, 2006). Pembiayaan *istishna'* ini seperti pembiayaan *salam*, tapi dalam *istishna'*, pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (*termin*) pembayaran. Dalam *istishna'* bahan baku dan pembuatan dari pengrajin. Jika bahan baku berasal dari pemesan, maka akad yang dilakukan adalah akad *ijarah* (sewa) bukan *istishna'*.

2.1.4. Pembiayaan bagi hasil.

Menurut Karim (2006), ada empat akad prinsip bagi hasil yaitu: *musyarakah*, *muzara'ah*, *musaqah*, dan *mukhabarah*. *Mudharabah* hanya merupakan salah satu jenis dari

musyarakah. Prinsip bagi hasil yang sering dipakai di dalam perbankan syariah adalah *musyarakah* dan *mudharabah*. Pembiayaan bagi hasil adalah kerjasama antara kedua belah pihak, yaitu bank syariah dan nasabah untuk bekerjasama membiayai suatu kegiatan usaha, jika dari kegiatan usaha tersebut mendapatkan keuntungan, maka keuntungan akan dibagi bersama berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat. Jika kegiatan usaha tersebut mengalami kerugian, kerugian akan ditanggung bersama oleh pihak-pihak yang berserikat dengan pembagian kerugian didasarkan pada porsi modal masing-masing pihak yang berserikat. Perbedaan penetapan ini disebabkan karena adanya perbedaan kemampuan menyerap untung dan rugi. Untung sebesar berapapun dapat diserap oleh pihak mana saja. Jika rugi, tidak semua pihak mempunyai kemampuan yang sama dalam menanggung kerugian, maka besarnya kerugian yang ditanggung disesuaikan dengan besarnya modal yang diinvestasikan ke dalam kegiatan usaha bersama tersebut.

Bentuk umum dari prinsip bagi hasil adalah *musyarakah*. Menurut Hadiyati (2013), pembiayaan *musyarakah* adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh sumber daya, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan, kewiraswastaan, kepandaian, kepemilikan, peralatan, atau *intangible assets*, kepercayaan, dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

Akad *musyarakah* mempunyai lima variasi (Karim, 2006), yaitu *mufawadhah*, *'inan*, *wujuh*, *abdan*, dan *mudharabah*. Dalam *syirkah mufawadhah* para pihak yang berserikat mencampurkan modal dalam jumlah yang sama besar. Pada *syirkah 'inan* para pihak yang berserikat mencampurkan modal dalam jumlah yang tidak sama besarnya. Pada *syirkah wujud* terjadi percampuran antara modal dengan reputasi / nama baik seseorang. Pada *syirkah abdan* terjadi percampuran jasa-jasa diantara orang yang berserikat, sehingga disini tidak terjadi percampuran modal dalam bentuk uang, tetapi yang terjadi adalah percampuran keahlian/ketrampilan dari pihak-pihak yang berserikat. Pada *syirkah mudharabah* terjadi percampuran antara modal dan jasa (keahlian/ketrampilan) dari pihak-pihak yang berserikat.

Dalam *syirkah mufawadhah*, karena porsi modal pihak-pihak yang berserikat besarnya sama, maka besarnya jumlah keuntungan maupun kerugian yang diterima bagi masing-masing sama jumlahnya. Dalam *syirkah 'inan*, karena jumlah porsi modal yang ditempatkan oleh masing-masing pihak berbeda jumlahnya, maka jumlah keuntungan yang diterima berdasarkan kesepakatan nisbah. Jika usaha mengalami kerugian, maka masing-

masing pihak akan menanggung kerugian sebesar proporsi modal yang diinvestasikan dalam kegiatan usaha tersebut.

Dalam *syirkah wujuh*, jika usaha mendapatkan keuntungan, maka akan dibagi berdasarkan kesepakatan nisbah antara masing-masing pihak. Jika usaha rugi, maka hanya pemilik modal saja yang akan menanggung resiko kerugian dalam bentuk uang. Pihak yang memberikan kontribusi dalam hal reputasi tidak perlu menanggung kerugian dalam bentuk uang. Namun demikian pada dasarnya ia tetap menanggung kerugian, yaitu jatuhnya nama baik yang bersangkutan.

Dalam *syirkah abdan* demikian pula. Jika usaha mendapatkan keuntungan, maka keuntungan akan dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Jika terjadi kerugian, maka kedua pihak menanggung kerugian berupa hilangnya jasa yang mereka sumbangkan.

Dalam *syirkah mudharabah*, jika usaha memperoleh keuntungan, akan dibagi menurut nisbah bagi hasil yang disepakati. Jika rugi pemilik modal akan menanggung kerugian berupa kerugian keuangan, sedangkan pihak yang berkontribusi jasa (*mudharib*) akan menanggung kerugian dalam hal waktu dan usaha yang tidak menghasilkan imbalan apapun. *Mudharabah* dalam sistim perekonomian modern khususnya perbankan melibatkan tiga pihak, yaitu pihak yang menyimpan dana (depositor), pihak yang memerlukan dana atau pengusaha (debitur), dan pihak yang mempertemukan antara keduanya (bank).

2.1.5. Prinsip ijarah (sewa)

Transaksi *ijarah* (sewa) dilandasi adanya perpindahan manfaat. Pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli, perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Pada prinsip jual beli transaksinya barang, pada ijarah transaksinya jasa. Pada akhir masa sewa bank dapat menjual barang yang disewakannya kepada nasabah, sehingga dikenal *ijarah muntahiya bit tamlik*, yaitu sewa yang diikuti dengan perpindahan kepemilikan barang. Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

2.1.6. Jasa pelayanan

Jasa pelayanan ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, bank dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini.

Hiwalah adalah pengambil alihan piutang, ditujukan untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapatkan ganti biaya atas jasa pemindahan piutang.

Wakalah dipergunakan jika nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukaan *letter of credit*, *inkaso*, atau transfer uang. Atas hal tersebut bank mendapatkan pengganti biaya berdasarkan kesepakatan bersama.

Rahn adalah gadai untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan harus milik nasabah sendiri, jelas ukuran, sifat, dan nilainya, dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.

Kafalah adalah jasa adalah garansi bank, yang dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Untuk jasa ini bank mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan.

2.2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mempunyai peran vital dalam perekonomian suatu negara, baik di negara maju maupun negara berkembang. Keberadaan UMKM sangat penting, bukan hanya bagi pemerintah, tetapi juga bagi perusahaan besar, maupun komunitas lokal. Bagi pemerintah, UMKM sumber lapangan kerja dan pencipta kemakmuran. UMKM berkontribusi terhadap stabilitas sosial dan juga menghasilkan pendapatan dari pajak. Bagi perusahaan besar UMKM merupakan sumber pemasok lokal. UMKM biasanya mempunyai pengetahuan yang lebih mendalam terhadap sumber daya lokal, pola pasokan, dan mengetahui kecenderungan pembelian konsumen. Dengan bekerja sama dengan UMKM perusahaan besar dapat menumbuhkembangkan basis pelanggan baru. Bagi komunitas lokal UMKM menyediakan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan penduduk setempat dengan harga yang terjangkau (Fouad, 2013).

UMKM merupakan mayoritas usaha di dunia, berdasarkan perkiraan jumlahnya mencapai lebih dari 95% dari total perusahaan yang ada dunia, menjadi pendorong utama pembangunan kewirausahaan (Osakwe et al., 2015), dan mampu menyerap 80-90% tenaga kerja di negara-negara berkembang (Elasrag, 2016). Di negara maju UMKM mempunyai peran dalam mendorong ekspor dan sebagai subkontraktor, sedangkan di negara berkembang peran UMKM lebih dikaitkan dengan penyerapan tenaga kerja, pengurangan kemiskinan

ataupun pemerataan pendapatan (Sulistiyastuti, 2004). Selain menciptakan lapangan kerja, UMKM juga menjadi bibit untuk tumbuhnya perusahaan besar dan menjadi bahan bakar mesin perekonomian nasional (Abor and Quartey, 2010).

UMKM juga mempunyai keunggulan dalam hal fleksibilitasnya untuk bisa menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di pasar secara efektif (Elasrag, 2016). Di Thailand, jumlah usaha kecil mencapai 76%, usaha menengah 17,8% dari seluruh perusahaan manufaktur yang ada dengan jumlah tenaga kerja yang ada didalamnya 868.000 pekerja (Chittithaworn, et al. 2011). Di Ghana UMKM menyumbang 70% GDP Ghana, sedangkan di Afrika Selatan UMKM memberikan kontribusi sekitar 52-57% dari GDP Afrika Selatan dan menyerap 61% tenaga kerja, dan 91% bisnis formal di Afrika Selatan adalah usaha mikro kecil dan menengah (Abor and Quartey, 2010). Berdasar data dari Chinese National Bureau of Statistics, di China jumlah UMKM mencapai 99,4% dari seluruh perusahaan pada tahun 2012 dan memberikan kontribusi 59% dari GDP China (Wang, 2016). Di Lahore Pakistan, jumlah UMKM mencapai hampir 90% dari seluruh perusahaan dan berkontribusi terhadap 40% GDP negara (Haneef, 2010). Berdasarkan data yang ada di Kementerian Industri dan Perdagangan Republik Czech jumlah UMKM mencapai 99,8% dari seluruh perusahaan yang ada, berkontribusi terhadap sepertiga GDP Czech (Osakwe et al. 2015).

Definisi tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sampai sekarang belum ada kesatuan pendapat yang universal. Ada perbedaan definisi antara suatu negara dengan negara yang lain, antara organisasi satu dengan organisasi lain. Pengelompokan usaha ke dalam mikro, kecil, dan menengah di beberapa negara bisa didasarkan pada penjualan, jumlah tenaga kerjanya, investasi modal, pangsa pasar, atau nilai asetnya (Alhabashi, 2015). Bank Dunia mendefinisikan suatu usaha termasuk ke dalam usaha kecil dan menengah apabila mempunyai maksimal 300 orang karyawan, pendapatan tahunan 15 juta dollar, dan mempunyai aset 15 juta dollar (Govori and Arbiana, 2013). Uni Eropa mempunyai kriteria sendiri untuk menetapkan suatu usaha masuk dalam kategori usaha mikro, kecil, dan menengah. Suatu usaha dikatakan usaha mikro jika mempekerjakan 0-9 tenaga kerja, usaha kecil jika mempekerjakan 10-99 tenaga kerja, dan usaha menengah jika mempekerjakan 100 – 499 tenaga kerja (Abor and Quartey, 2010).

Pengelompokan usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Pada pasal 1 UU

Nomor 20 Tahun 2008 menyebutkan bahwa: *pertama*, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang-perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang undang. *Kedua*, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. *Ketiga*, usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung, maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Pada pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 disebutkan kriteria masing-masing usaha tersebut. Kriteria usaha mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Kriteria usaha kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Kriteria usaha menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

UMKM memainkan peranan penting dalam perekonomian nasional Indonesia. Hal ini disebabkan karena UMKM memiliki beberapa karakteristik, pertama, jumlah UMKM yang sangat besar, terutama usaha mikro dan usaha kecil yang berlokasi di desa. Kedua, kontribusi UMKM yang besar pada penyediaan lapangan kerja, sehingga secara tidak langsung juga mengurangi kemiskinan. Ketiga, mayoritas UMKM menggunakan teknologi yang relatif lebih sederhana dibandingkan dengan usaha besar yang ada di perkotaan. Keempat, mayoritas UMKM bergerak di sektor yang berhubungan dengan sektor pertanian dan padat karya. Kelima, meskipun pada umumnya mereka yang tinggal di daerah pedesaan adalah

masyarakat yang berpendapatan rendah, tetapi mereka bisa menyisihkan sedikit uangnya untuk dipakai sebagai modal usaha. Keenam, UMKM mendanai kegiatan operasi mereka dari tabungan pribadi dan sebagian dari mereka mendapatkan bantuan permodalan dari teman atau pinjaman dari kenalan, atau juga dari para rentenir (Tambunan, 2011).

Mengingat pentingnya peran UMKM tersebut, maka keberadaan UMKM perlu ditumbuhkembangkan dan ditingkatkan kinerjanya. Beberapa peneliti telah mencoba mengidentifikasi faktor-faktor yang bisa meningkatkan pertumbuhan dan kinerja UMKM, yaitu karakteristik pengusaha, karakteristik UMKM, dan variabel-variabel kontekstual.

Indarti dan Langenberg (2005) menjelaskan bahwa karakteristik pengusaha terdiri dari gender, pendidikan, usia, dan pengalaman kerja. Karakteristik UKM meliputi lama waktu usaha, ukuran perusahaan, sumber modal (Indarti dan Langenberg, 2005). Selanjutnya variabel-variabel kontekstual meliputi akses permodalan, pemasaran, teknologi, akses informasi, jaringan sosial, legalitas, dukungan pemerintah, dan perencanaan bisnis. Variabel kontekstual ini disebut oleh Bouazza et al. (2015) sebagai faktor-faktor lingkungan bisnis yang meliputi: regulasi, akses pada lembaga keuangan eksternal, dan kemampuan sumber daya manusia.

2.2.1. Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja UMKM

Terdapat perbedaan pendapat tentang definisi tentang kinerja dalam bisnis. Kinerja diartikan sebagai suatu ukuran seberapa baik suatu perusahaan dapat menggunakan assetnya didalam usahanya untuk menghasilkan pendapatan. Pendapat yang berbeda menyatakan bahwa kinerja adalah hasil dari suatu aktivitas perusahaan atau investasi di dalam suatu periode waktu tertentu (Watson, 2007). Kinerja juga dapat didefinisikan sebagai suatu pencapaian sasaran bisnis tertentu yang diukur dengan standar yang disepakati, kelengkapan, dan biaya (Davis and Cobb, 2010). Menurut Harash et al. (2014), kinerja adalah hasil suatu strategi yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mencapai tujuan dan mendapatkan pasar yang dituju.

Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan indikator keuangan, misalnya *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), pertumbuhan penjualan, atau pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator non keuangan, seperti: pertumbuhan tenaga kerja, kepuasan pelanggan, dan lain-lain (Harash et al.2014; Kamunge et

al.2014). Pengukuran kinerja yang lain bisa dilihat dari beberapa aspek yaitu: unit usaha, tenaga kerja, produktivitas, nilai tambah, dan nilai ekspor (Sudiarta et al., 2014).

Beberapa peneliti terdahulu melakukan penelitian untuk mengetahui beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja UMKM. Beberapa penelitian lebih memfokuskan penelitiannya pada sejumlah variabel yang terbatas. Beberapa penelitian yang lain mencoba melakukan penelitiannya dengan melibatkan beberapa variabel yang lebih menyeluruh yang berkaitan dengan keberhasilan UMKM. Penelitian dilakukan, baik menggunakan metode survey maupun studi kasus (Chittithaworn et al., 2011).

Menurut Munizu (2010), kinerja UMKM dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor-faktor eksternal dan faktor-faktor internal. Faktor-faktor internal meliputi aspek SDM, aspek keuangan, aspek teknis produksi, dan aspek pemasaran. Sedangkan faktor-faktor eksternal meliputi kebijakan pemerintah, aspek sosial budaya dan ekonomi, serta peranan lembaga terkait seperti pemerintah, perguruan tinggi, swasta, lembaga swadaya masyarakat. Pendapat yang menyebutkan bahwa peranan pemerintah menentukan keberhasilan UMKM juga disebut oleh beberapa peneliti lainnya (Indarti dan Langenberg, 2005; Kamunge et al., 2014; Govorie and Arbiana, 2013). Pemerintah harus membina hubungan erat dengan UMKM dan mendukung penuh UMKM dengan menyediakan berbagai fasilitas dan insentif, serta menumbuhkan peluang bisnis bagi UMKM (Yusuf, 1995).

Penelitian yang dilakukan oleh Stephen Kamunge, Agnes Njeru, dan Ondabu Ibrahim Tirimba yang melakukan penelitian di Kenya mendapatkan suatu hasil, kinerja UMKM dipengaruhi oleh beberapa faktor: yaitu akses infrastruktur, pengalaman manajerial pengelola, akses keuangan, akses informasi bisnis, dan kebijakan pemerintah dan peraturan (Kamunge et al., 2014). Penelitian dilakukan dengan melibatkan 274 sampel, dengan menggunakan alat analisis regresi, metode *stratified sampling* dan *simple random sampling*, serta menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Pendapat ini diperkuat oleh Charles Mambula, yang menyebutkan bahwa lemahnya infrastruktur menjadi hambatan pertumbuhan UMKM, selain keterbatasan dana (Mambula, 2002). Kondisi infrastruktur khususnya jalan, bisa mengganggu arus lalu lintas pengiriman barang yang akan dijual ke pasar domestik atau untuk diekspor. Ruas jalan yang rusak mengakibatkan terjadinya kemacetan, sehingga menyebabkan keterlambatan pengiriman barang. Akibat lebih lanjut adalah para pengusaha UMKM sering mengalami kerugian, karena harus mengeluarkan uang lebih untuk biaya operasional transportasi yang mengalami penambahan hingga 30% dari

biasanya (Maqin, 2011). Pentingnya infrastruktur dalam meningkatkan kinerja UMKM juga disebutkan oleh Sitaram dan Hoque (Sitaram and Hoque, 2016).

Indarti dan Langenberg melakukan penelitian terhadap 100 UMKM untuk mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan UMKM (Indarti dan Langenberg, 2005). Pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling* untuk memilih responden UMKM yang ada di Yogyakarta. Kota Yogyakarta menjadi pilihan lokasi penelitian, dengan pertimbangan bahwa Yogyakarta merupakan tempat berkumpulnya masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia, baik untuk tujuan belajar maupun tujuan yang lain. Metode analisis data yang dipergunakan adalah regresi dan korelasi. Variabel independen adalah: karakteristik pengusaha, karakteristik UMKM, dan variabel kontekstual. Karakteristik pengusaha meliputi usia, gender, pengalaman kerja, dan pendidikan. Karakteristik UMKM terdiri dari: asal mula usaha, lamanya perusahaan beroperasi, ukuran perusahaan, dan sumber pendanaan. Sedangkan yang termasuk ke dalam variabel kontekstual adalah: akses permodalan, pemasaran, teknologi, akses informasi, jaringan sosial, legalitas, dukungan pemerintah, dan perencanaan bisnis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa usia pengusaha tidak berpengaruh terhadap keberhasilan UMKM. Gender tidak berpengaruh terhadap keberhasilan UMKM. Hasil ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Vivek Wadhwa yang menyimpulkan bahwa wanita dapat menjalankan bisnis lebih baik daripada laki-laki (Lupasc, 2013,) dan berbeda dengan hasil penelitian Mazzarol, Volery, Doss dan Thein yang mendapatkan hasil bahwa gender merupakan salah satu dari tiga variabel demografi yang berpengaruh terhadap pendirian usaha kecil (Mazzarol et al., 1999).

Menurut Indarti pengalaman kerja terdahulu pengusaha tidak berpengaruh secara nyata terhadap kesuksesan usaha, meskipun bidang usaha yang dijalankan sama. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Lassasi dan Hammouda di Algeria, yang menyimpulkan bahwa pengalaman kerja pada bidang yang sama, mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan usaha (Kemayel, 2015). Pendapat ini dikuatkan oleh Majumdar yang menyatakan bahwa lama usaha mempengaruhi produktivitas usaha. Perusahaan yang telah beroperasi lama akan lebih produktif (Majumdar, 1997). Demikian pula pendapat yang disampaikan oleh Pervan dan Qurak (Pervan et al.2017) dan juga pendapat Shava dan Rungani, yang menyatakan bahwa kinerja UMKM sangat kuat dipengaruhi oleh pengalaman kerja terdahulu dari pemilik usaha ataupun pengelola usaha

(Shava dan Rungani, 2016). Hasil yang mengejutkan adalah pengusaha UMKM dengan latar belakang pendidikan tinggi (sarjana) kurang sukses jika dibanding dengan pengusaha UMKM dengan pendidikan sekolah dasar dan sekolah lanjutan. Hal ini karena latar belakang pendidikan sarjana tidak memberikan bekal ketrampilan teknis yang diperlukan di dalam menjalankan usaha.

Asal mula usaha, apakah usaha tersebut benar-benar baru, ataukah diwariskan dari generasi sebelumnya. bukanlah faktor yang mempengaruhi kesuksesan. Ukuran perusahaan, dalam arti besar kecil nya jumlah karyawan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesuksesan. Sumber pendanaan usaha yang berasal dari dana pribadi ternyata lebih sukses daripada menggunakan sumber dana lain. Penjelasan yang dapat diberikan dalam hal ini adalah dengan menggunakan modal usaha dari dana pribadi mereka menghadapi resiko keuangan pribadi sehingga komitmen yang tinggi perlu dicurahkan di dalam menjalankan usaha, dan sebagai hasilnya banyak dari mereka yang lebih menuai kesuksesan. Menurut Toyin dan Tajudeen (2014), ada keterkaitan antara asset usaha dengan keuntungan perusahaan. Asset usaha meliputi: gedung, teknologi komunikasi dan informasi, mesin, tanah, dan lain-lain. Pendapat ini diperkuat oleh Mary, Okelue, dan Austin yang menyatakan bahwa asset adalah salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keuntungan usaha (Mary et al., 2012).

Variabel kontekstual yang berpengaruh terhadap kesuksesan UMKM adalah akses permodalan, pemasaran, dan teknologi. Tiga variabel ini merupakan hambatan utama para pengusaha UMKM Indonesia. Lemahnya akses pada lembaga keuangan yang ada menjadi hambatan besar bagi UMKM untuk berkembang. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Beck dan Kunt (2006). Penelitian lain yang dilakukan oleh Chuthamas Chittithaworn, Md Aminul Islam, Thiyada Keawachana, dan Dayang Hasliza Muhd Yusuf di Thailand yang meneliti faktor –faktor yang mempengaruhi kesuksesan UMKM. Faktor-faktor yang diteliti meliputi karakteristik UMKM, pengetahuan manajemen pengelola, ketrampilan menjalankan bisnis, produk dan jasa, pelanggan dan pasar, sumber daya dan keuangan, strategi, dan lingkungan luar UMKM (Chittithaworn et al., 2011). Penelitian dengan menyebarkan 200 kuesioner kepada responden yang terpilih, tetapi dari 200 kuesioner tersebut hanya 143 yang kembali kepada peneliti. Analisis data menggunakan multiple regression analysis, dan corellation analysis. Hasilnya faktor yang mempengaruhi kesuksesan UMKM adalah karakteristik UMKM, pelanggan dan pasar, ketrampilan menjalankan usaha, sumber daya

dan keuangan, dan lingkungan luar UMKM. Sedangkan pengetahuan manajemen, produk dan jasa, dan strategi tidak berpengaruh signifikan terhadap kesuksesan.

Penelitian yang sama dilakukan oleh Moorthy untuk melihat faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi Kinerja UMKM di Malaysia. Penelitian dilakukan dengan cara menyebarkan 300 set kuesioner via email kepada UMKM bidang manufaktur Malaysia yang dipilih secara random. Dari 300 kuesioner tersebut, kembali 219 set kuesioner. Analisis data menggunakan multiple linear regression. Kinerja UMKM sebagai variabel dependen dan variabel independennya adalah : kewirausahaan efektif, pengelolaan sumber daya manusia yang tepat, pemanfaatan informasi pemasaran, dan aplikasi teknologi informasi. Hasil penelitiannya adalah kewirausahaan yang efektif, penempatan sumberdaya manusia yang tepat, pemanfaatan informasi pemasaran, dan aplikasi teknologi informasi akan meningkatkan kinerja UMKM (Moorthy et al.2012). Pendapat yang lain menyatakan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap kesuksesan UMKM, adalah : tersedianya peluang usaha, kemampuan manajemen, modal yang mencukupi dan kredit, penerapan metode bisnis yang modern (Mukumba, 2014).

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Kemayel (2015), yang menyatakan bahwa faktor utama kesuksesan UMKM adalah hubungan dengan lingkungan di sekitarnya yang meliputi hubungan dengan pelanggan, pemasok, hubungan dengan bank, dan persaingan. Hal ini juga disampaikan oleh Philip (2010), yang menyebutkan bahwa lingkungan usaha merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan kesuksesan usaha, selain faktor-faktor yang lain seperti karakteristik UMKM, pengetahuan manajemen dan ketrampilan usaha, produk dan jasa, cara menjalankan usaha dan kemampuan kerjasama serta sumber daya dan keuangan.

Pendapat lainnya disampaikan oleh Al Saadi, Tamimi, dan Harash yang menyatakan bahwa faktor keuanganlah yang paling menentukan kinerja UMKM (Harash et al. 2014). Keuangan yang dimaksudkan adalah sumber modal usaha, termasuk sumber daya keuangan yang diinvestasikan oleh pemilik, uang kas yang ada di tangan, tambahan modal, persyaratan pinjaman yang ditetapkan oleh lembaga keuangan, persyaratan agunan, bunga kredit, dan kondisi lembaga keuangan yang ada.

Pembahasan tentang UMKM juga meliputi pertumbuhan UMKM. Pertumbuhan jumlah UMKM telah banyak dikaji oleh beberapa peneliti. Beberapa tolok ukur yang sering dipakai untuk melihat pertumbuhan UMKM itu diantaranya adalah bertambahnya jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan oleh UMKM (Kamunge et al. 2014). Jumlah tenaga kerja

banyak dipakai sebagai ukuran dikarenakan sulitnya mendapatkan data keuangan yang layak untuk UMKM. Selain indikator jumlah tenaga kerja, tolok ukur yang lain adalah peningkatan penjualan dan peningkatan perputaran usaha (Shah et al., 2013).

Para peneliti UMKM berbeda pendapat mereka tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pengembangan UMKM. Beberapa peneliti menyebutkan bahwa faktor utama yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan pengembangan UMKM adalah akses pada lembaga keuangan formal (Govori, 2013; Krasniqi, 2007; Mateev dan Anastasov, 2010; Baporikar et al., 2016; Abor and Quartey, 2010). Oleh karena itulah maka karena sulitnya akses terhadap lembaga keuangan formal, UMKM sering mencari bantuan keuangan dari sumber keuangan informal seperti koperasi, dan bahkan juga ke rentenir (Sudaryo dan Purnamasari, 2017). Lembaga keuangan informal lebih dikenal dan dipilih oleh UMKM dengan alasan lembaga keuangan informal lebih fleksibel, misalnya dalam hal persyaratan pinjaman dan jumlah pinjaman uang.

Menurut Haneef (2010), faktor yang menghambat pertumbuhan UMKM adalah keterbatasan modal, piutang yang melampaui batas waktunya, biaya produksi yang tinggi, suku bunga pinjaman yang tinggi, dan kesulitan dalam mengakses kredit. Pada umumnya perbankan tidak mau memberikan bantuan pendanaan kepada UMKM disebabkan karena sebagian besar UMKM tidak mempunyai jaminan (kolateral). Perbankan lebih suka mendanai perusahaan yang sudah mapan dikarenakan mereka mempunyai jaminan. Tidak aneh jika perusahaan besar sangat mudah mendapatkan pinjaman dari bank (Shah et al. 2013). Penyebab lain usaha kecil kurang mendapatkan akses pada lembaga keuangan formal adalah karena masalah asimetri informasi yang diterjemahkan dalam bentuk tingginya biaya kredit. Disisi yang lain, penyedia jasa keuangan dihadapkan pada masalah *moral hazard* yang memaksa mereka untuk meminta jaminan yang tinggi pada UMKM, sehingga menyulitkan UMKM untuk menyediakannya (Mulaga, 2013).

Selain akses pada lembaga keuangan formal, faktor lain yang berpengaruh terhadap pertumbuhan UMKM adalah pertumbuhan ekonomi (Osakwe et al. 2015), infrastruktur (Bilal et al. 2016), persaingan, korupsi, kebijakan pemerintah (Govori dan Arbiana, 2013), beban pajak, dan beban administrasi (Krasniqi, 2007). Christian Nedu Osakwe, Nahanga Verter, Vera Becvarova, Miloslava Chovancova yang melakukan penelitian di Republik Czech, menyatakan bahwa ada hubungan erat antara pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan UMKM (Osakwe et al., 2015). Hasil penelitian dari Kamunge, et al. (2014), menjelaskan

bahwa kinerja UMKM dipengaruhi oleh: infrastruktur, sumber modal dan akses pinjaman, ketersediaan air, pengalaman manajerial, akses terhadap informasi bisnis, serta peraturan pemerintah. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian Mambula (2002), yang mendapatkan kesimpulan bahwa dua faktor utama yang menghambat tumbuhnya UMKM yaitu keterbatasan dana dan infrastruktur yang buruk.

Selain infrastruktur, faktor eksternal lainnya adalah pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja UMKM. Hal ini dibuktikan dari penelitian beberapa peneliti diantaranya adalah Osakwe et al. (2015), makin tinggi pertumbuhan ekonomi, makin meningkatkan kinerja UMKM. Pendapat ini diperkuat oleh Plehn-Dujowich dan Grove (2012)), yang menyebutkan ada hubungan yang positif antara pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan UMKM.

Kebijakan dan dukungan pemerintah menjadi salah satu faktor yang ikut menentukan kinerja dan perkembangan UMKM. Dukungan bisa diwujudkan dalam berbagai hal, misalnya pelatihan kewirausahaan (Hakim, 2010), bantuan keuangan (Indarti dan Langenberg, 2005), bisa juga dalam bentuk program yang lain (Tambunan, 2005). Adapun faktor internal yang berpengaruh terhadap kinerja UMKM diantaranya adalah modal usaha, dan lama waktu usaha (Zhou dan Chen, 2008).

Abor dan Quartey (2010) berpendapat bahwa ada sejumlah faktor lain yang dapat menghambat pertumbuhan UMKM diantaranya adalah lemahnya akses terhadap teknologi tepat guna, akses yang terbatas pada pasar internasional, adanya hambatan hukum dan regulasi, lemahnya kapasitas lembaga, tiadanya penguasaan manajemen dan yang paling penting adalah masalah keuangan. Adapun masalah keuangan yang sering terjadi adalah: keterbatasan antara dana pinjaman dengan dana yang dapat diakses oleh UMKM, ketiadaan pendekatan sistematik dalam pendanaan UMKM, biaya transaksi yang lebih tinggi dikarenakan prosedur kredit yang rumit. Selain itu juga keterbatasan akses pada lembaga keuangan formal, baik disebabkan karena keterbatasan bank di suatu area wilayah tertentu maupun ketiadaan informasi yang mencukupi, bunga kredit investasi dan bunga kredit modal kerja yang tinggi, dan banyaknya UMKM yang tidak *bankable*, baik disebabkan karena ketiadaan manajemen keuangan yang transparan, ataupun ketidakmampuan manajerial dan keuangan (Sudaryo dan Purnamasari, 2017).

Didalam penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja UMKM digunakan pendekatan *profitabilitas* usaha. Didalam bisnis, kinerja suatu entitas usaha diidentikkan dengan *profit* atau keuntungan, sedangkan keuntungan sendiri diperoleh dari pendapatan usaha dikurangi biaya. Termasuk didalam pendapatan adalah variabel inklusi keuangan perbankan syariah (meliputi *banking penetration* bank syariah, *availability of banking service* bank syariah, dan *usage* bank syariah), inklusi keuangan perbankan konvensional (meliputi *banking penetration* bank konvensional, *availability of banking service* bank konvensional, dan *usage* bank konvensional), dan pertumbuhan ekonomi. Termasuk di dalam biaya adalah infrastruktur dan dukungan pemerintah.

2.3. Inklusi Keuangan

Dalam beberapa peneliti terdahulu, telah ditemukan bahwa salah satu kendala utama yang dihadapi oleh UMKM adalah akses UMKM kepada lembaga jasa keuangan formal (Kamunge et al. 2014; Beck and Kunt, 2006; Krasniqi, 2007; Govori and Arbiana, 2013; Mateev and Anastasov, 2010; Baporikar et al. 2016; Abor and Quartey, 2010; Tambunan, 2011). Aksesabilitas pada lembaga keuangan itu disebut inklusi keuangan.

The Government of India's Committee of Financial Inclusion mendefinisikan inklusi keuangan (*financial inclusion*) sebagai proses yang menjamin akses kepada jasa keuangan secara tepat waktu dan jumlah kredit yang sesuai yang diperlukan oleh kelompok yang rentan miskin seperti orang-orang yang lemah dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah dengan biaya yang terjangkau (Rangorajan Committee, 2008). Sedangkan Amidzic et al,(2014), inklusi keuangan adalah suatu keadaan dimana individu dan perusahaan tidak mengalami hambatan dalam akses terhadap jasa-jasa keuangan dasar. Sarma (2012) mendefinisikan inklusi keuangan sebagai proses yang menjamin kemudahan akses, ketersediaan dan penggunaan jasa keuangan formal kepada seluruh anggota ekonomi. Inklusi keuangan secara lebih luas didefinisikan sebagai akses secara universal pada lembaga keuangan dan jasa keuangan dengan biaya yang terjangkau (Hastak dan Gaikwad, 2015).

Sistem keuangan yang berfungsi baik akan menjadi sarana vital yang menyediakan berbagai keperluan masyarakat dalam jasa keuangan seperti: tabungan, kredit atau pinjaman modal, dan juga berbagai keperluan pembayaran lain. Sistem keuangan yang inklusif akan memungkinkan masyarakat bisa mengakses jasa keuangan sesuai keperluan mereka tanpa ada hambatan berarti, khususnya bagi masyarakat miskin, kelompok yang tidak diuntungkan, dan juga pengusaha UMKM. Tidak tersedianya akses ke jasa keuangan akan menyebabkan para

pengusaha UMKM hanya mengandalkan pendanaan usaha mereka pada tabungan mereka yang sangat terbatas, dan membuat perusahaan-perusahaan kecil hanya mendapatkan pendapatan usaha yang terbatas sehingga menghambat mereka untuk tumbuh dan berkembang. Hal ini misalnya terjadi di Afrika, banyak perusahaan kecil dan menengah menghadapi masalah utama dalam hal keuangan, dikarenakan keterbatasan mereka pada akses kredit perbankan, yang membuat mereka kesulitan untuk tumbuh (Kunt and Klapper, 2012).

Kata kebalikan dari inklusi keuangan adalah eksklusi keuangan. Eksklusi keuangan mencakup beberapa hal yang menggambarkan hambatan yang membuat seseorang tidak dapat menggunakan jasa-jasa keuangan. Hambatan-hambatan tersebut meliputi hambatan secara fisik yang disebabkan karena jauhnya jarak dengan lembaga jasa keuangan, atau hambatan berupa proses penilaian resiko pinjaman yang berbelit, atau karena seseorang secara sengaja tidak ingin menjalin relasi dengan lembaga keuangan resmi dikarenakan pernah mengalami penolakan ketika mengajukan pinjaman pada masa yang lalu, atau ada kekhawatiran pengajuan pinjamannya akan ditolak (Cnaan et al., 2011). World Bank (2014) membedakan antara *voluntary exclusion* dan *involuntary exclusion*. *Voluntary exclusion* adalah kondisi dimana individu atau perusahaan memilih untuk tidak menggunakan jasa keuangan karena merasa tidak memerlukannya atau karena alasan budaya atau alasan keagamaan. *Involuntary exclusion* adalah individu atau perusahaan tidak menggunakan jasa keuangan karena memang tidak mempunyai kecukupan pendapatan dan beresiko tinggi atau karena diskriminasi dan kegagalan dan ketidaksempurnaan pasar. Dampak dari eksklusi keuangan tidak hanya hilangnya kesempatan, tetapi juga lebih tingginya biaya modal (*cost of capital*). Hal ini terjadi di Kota Mexico dimana biaya pinjaman jangka pendek lima kali lebih banyak dibandingkan dengan pinjaman dari bank (Cnaan, 2011).

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengetahui dampak inklusi keuangan terhadap kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Burges dan Pande (2005) menyatakan bahwa ekspansi kantor cabang bank desa di India telah membantu mengurangi kemiskinan. Secara khusus, ditemukan suatu bukti yang kuat bahwa pembukaan cabang di desa yang “*unbanked*” di India ada kaitan dengan penurunan tingkat kemiskinan di area tersebut. Demikian pula Brune et al. (2011) menemukan bahwa peningkatan akses keuangan melalui rekening tabungan di desa di Malawi telah berhasil mengembangkan kesejahteraan rumah tangga miskin ketika menyediakan akses ke tabungan.

ADB juga melakukan penelitian untuk mengetahui apakah inklusi keuangan berpengaruh terhadap kemiskinan. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa makin tinggi inklusi keuangan makin rendah tingkat kemiskinan (ADB, 2015). Bahkan inklusi keuangan dipandang sebagai “*market driven solution*” untuk mengurangi kemiskinan. Peningkatan inklusi keuangan akan bisa menurunkan kemiskinan, karena makin banyak orang yang mempunyai akses pada jasa keuangan dan itu akan memudahkan kehidupan mereka. Oleh karena itu Cnaan et al. (2011) juga menyatakan bahwa inklusi keuangan merupakan pilihan kebijakan yang tepat untuk mengurangi kemiskinan. Logika yang ada adalah dengan inklusi keuangan membuat orang miskin dapat memanfaatkan akses pinjaman ke perbankan dengan tingkat bunga yang layak dan biaya yang minimal untuk membantu kehidupannya. Banarjee dan Newman (1993) menyatakan bahwa faktor utama (*critical factor*) yang memungkinkan seseorang bisa keluar dari kemiskinan adalah adanya akses pada jasa keuangan. Inklusi keuangan telah dipakai sebagai fokus utama kebijakan di banyak pemerintahan di dunia sejak tahun 2000-an. Di India, inklusi keuangan digunakan untuk memastikan bahwa akses masyarakat terhadap jasa keuangan telah memadai bagi masyarakat miskin dengan biaya yang terjangkau (Rangrajan Committee, 2013).

2.3.1. Inklusi Keuangan dan UMKM.

Binswarger dan Khand Ker (1995) menyatakan program ekspansi keuangan di pedesaan di India secara signifikan telah menurunkan angka kemiskinan di pedesaan dan meningkatkan lapangan kerja non pertanian. Eastwood dan Kohli (1999) juga menyatakan bahwa program perluasan cabang bank dan penyediaan pinjaman yang diarahkan telah dapat mengembangkan output industri kecil. Menurut Yorulmaz (2013), tujuan dari inklusi keuangan adalah untuk mendorong masyarakat yang pada mulanya tidak punya akses ke jasa keuangan, bisa mempunyai akses ke jasa keuangan, dan juga tersedianya berbagai jasa keuangan dengan biaya yang terjangkau bagi rumah tangga dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Hasil penelitian Yorulmaz di Turki, makin tinggi pendapatan per kapita suatu propinsi di Turki, makin tinggi pula inklusi keuangannya. Di Peru, Reyes (2010) mengungkapkan pentingnya perluasan akses keuangan bagi sebagian besar masyarakat terhadap portfolio produk dan jasa keuangan, seperti pinjaman, deposito, asuransi, pensiun, sistem pembayaran serta mekanisme pendidikan keuangan dan perlindungan konsumen.

Dampak dari eksklusi keuangan (sebagai lawan dari inklusi) pada orang yang termasuk kategori “*unbanked*”, jika menerima pembayaran berupa cek maka orang tersebut

harus menempuh perjalanan yang jauh untuk bisa mencairkan cek nya, hal itu tidak akan terjadi pada orang yang “banked”, karena tinggal mendepositkan cek tersebut. Ketidakterediaan jasa keuangan menyebabkan kelompok wanita tertentu, yang karena mendapatkan tekanan ekonomi yang berat, terpaksa menggunakan jasa rentenir untuk bisa membayar kembali pinjaman mereka. Hasil survei yang dilakukan oleh Kunt dan Kappler (2012) yang mengukur sejauh mana penggunaan produk keuangan, menunjukkan bahwa 50% orang dewasa di seluruh dunia telah menggunakan jasa keuangan formal dan lebih dari 2,5 milyar orang dewasa di dunia tidak memiliki akun jasa keuangan formal.

Sekarang jasa keuangan semakin dipandang sebagai barang publik yang sangat diperlukan keberadaannya oleh semua masyarakat tanpa diskriminasi dan pentingnya akses masyarakat terhadap jasa keuangan sebagaimana pentingnya air dan pendidikan dasar bagi masyarakat (Mehtotra et al. 2009). Inklusi keuangan harus berada di garis terdepan kebijakan pemerintahan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan. Hal ini berarti pemerintahan suatu negara harus membuat kebijakan yang mempermudah pengucuran kredit kepada sektor rumah tangga, khususnya pada masyarakat berpendapatan rendah dan juga kepada usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM.

Para pengusaha UMKM sering mengeluhkan makin sulitnya mereka mendapatkan kredit dari perbankan untuk keperluan usaha mereka, karena sebagian besar kredit yang disalurkan oleh bank- bank besar di Indonesia lebih banyak ditujukan kepada perusahaan-perusahaan besar daripada ke UMKM (Rosengard dan Prasetyantoko, 2011). Menurut Yorulmaz (2013), para pengusaha kecil sering menggunakan modal sendiri untuk membiayai usaha mereka, dan bahkan sebagian menggunakan pembiayaan dari rentenir. Hal ini disebabkan karena dengan rendahnya akses industri kecil terhadap lembaga-lembaga kredit formal yang ada. Ketiadaan agunan yang memadai menjadi masalah utama yang membuat para pengusaha kecil mengalami kesulitan akses pada lembaga keuangan formal. Dengan mengembangkan akses dan kualitas jasa keuangan seperti tersedianya kredit yang murah, mobilisasi tabungan, dan asuransi dapat mempermudah pertumbuhan dan produktivitas, khususnya untuk UMKM.

2.3.2. Metode Pengukuran Inklusi Keuangan

Beberapa cara pengukuran inklusi keuangan telah diusulkan oleh para peneliti diantaranya adalah Sarma (2008), Amidzic, Massara, dan Mialou (2014). Konsep yang diajukan Sarma lebih menjelaskan tentang dimensi-dimensi yang digunakan untuk pengukuran inklusi keuangan, yaitu dimensi akses, *availability* (ketersediaan) dan *usage* (penggunaan). Sarma mengusulkan indeks inklusi keuangan terdiri dari: *banking penetration* ketersediaan jasa bank/ *availability of banking service* dan penggunaan/*usage banking system*.

Banking penetration adalah jasa keuangan formal perbankan kepada masyarakat. Idealnya perbankan harus menjangkau sebanyak mungkin pengguna. Oleh karena itu sistem inklusi keuangan harus melakukan penetrasi secara luas kepada masyarakat pengguna. Ukuran “*banked*” *population* dihitung dari jumlah orang yang mempunyai rekening di bank. Indikator ini digunakan untuk mengukur penetrasi bank. Jika setiap orang mempunyai rekening, maka nilai indikator penetrasi ini adalah 1. Untuk mengukur indikator ini digunakan proporsi *banking penetration* per 1000 orang. Ketersediaan data merupakan tantangan tersendiri untuk mengukur penetrasi bank ini. Jika data indikator penetrasi bank ini tidak tersedia, untuk mengukur indeks inklusi keuangan hanya dipakai dimensi kedua (*availability of banking services*) dan dimensi ketiga (*usage*).

Dimensi kedua *availability of banking services*. Sistem inklusi keuangan harus menjamin kemudahan bagi pengguna untuk menggunakan jasa keuangan yang ada. Indikator yang dipakai adalah *availability of banking service* bank per 1000 penduduk dan atau jumlah ATM per 1000 orang, atau jumlah karyawan bank per nasabah. Oleh karena ketiadaan data tentang jumlah ATM dan jumlah karyawan bank, maka indikator yang dapat digunakan adalah jumlah kantor cabang per 1000 orang untuk mengukur dimensi *availability of banking services*.

Dimensi ketiga *usage* (pemakaian jasa bank). Menurut Kempson et al. (2004), di beberapa negara yang termasuk *highly banked countries*, sejumlah orang yang mempunyai rekening bank, namun sangat sedikit menggunakannya. Mereka disebut “*under banked*” atau “*marginally banked*”. Orang-orang yang termasuk ke dalam kategori ini meskipun mempunyai akses terhadap jasa keuangan formal, tidak mampu menggunakan jasa keuangan tersebut dikarenakan berbagai alasan, misalnya terlalu jauh tempat tinggalnya dari kantor

cabang bank yang ada atau dikarenakan suatu pengalaman yang tidak menyenangkan terkait dengan penyedia jasa. Oleh karena itu dengan hanya mengandalkan kepemilikan rekening saja tidak cukup untuk menilai suatu sistem perbankan dikatakan inklusif, tetapi juga harus dilihat bahwa jasa perbankan tersebut cukup dapat dimanfaatkan.

Penggunaan jasa bisa dalam berbagai bentuk misalnya kredit deposito, pembayaran, pengiriman uang, transfer dan lain-lain. Namun data pembayaran, penggunaan uang dan transfer sering tidak tersedia, sehingga pengukuran hanya dilakukan terhadap penggunaan kredit dan deposito, dalam bentuk volume kredit dan deposito sebagai proporsi PDB / PDRB. Data yang digunakan adalah volume kredit dan deposito sebagai proporsi PDB atau PDRB (Sarma, 2012).

Suatu pengukuran inklusi keuangan yang baik harus memenuhi beberapa kriteria (Sarma, 2008) yaitu: menggabungkan berbagai aspek (dimensi) inklusi keuangan sebanyak mungkin, mudah cara menghitungnya dan sederhana, serta dapat diperbandingkan antar negara/propinsi/kabupaten. Indeks yang diusulkan Sarma (2008) relatif memenuhi berbagai kriteria tersebut. Nilai dari *Index of Financial Inclusion* (IFI) antara 0 dan 1. Angka 0 menunjukkan inklusi keuangan paling rendah, dan 1 menunjukkan inklusi keuangan yang lengkap. Amidzic et al.,(2014), menggunakan indikator *outrreach* (penetrasi demografi dan geografi), pemakaian (deposito dan pinjaman) dan kualitas (penyelesaian sengketa, biaya pemakaian jasa). Penggunaan indikator-indikator tersebut tidak sepenuhnya bisa dilakukan karena keterbatasan data.

Camara dan Tuesta (2014) menghitung indeks inklusi keuangan dengan menggunakan tiga dimensi, yaitu: *usage* (persentase orang dewasa yang mempunyai tabungan atau pinjaman terhadap jumlah populasi), akses (Jumlah ATM atau cabang bank, per kapita per area) dan *barriers* (jarak ke cabang bank terdekat, persyaratan dokumentasi, dan kepercayaan terhadap sistim keuangan). Data yang diperlukan untuk menghitung indeks inklusi keuangan seperti yang disulkan oleh Camara dan Tuesta, sulit diperoleh, misalnya data jarak ke cabang terdekat maupun persyaratan dokumentasi. Dengan demikian dari beberapa cara pengukuran indeks inklusi keuangan tersebut, cara pengukuran yang ditawarkan oleh Sarma lebih memungkinkan untuk dilakukan.

2.4. Eksklusi Sosial dan Eksklusi Keuangan

. Untuk memahami inklusi keuangan teori yang dapat digunakan adalah teori *Social Exclusion (Eksklusi Sosial)*. Istilah *Social Inclusion/Exclusion*, pertama kali disampaikan oleh Rene Lenoir, Sekretaris Negara Untuk Urusan Aksi Sosial (Rawal,2008). Lenoir menyatakan keprihatinannya tentang adanya marjinalisasi beberapa kelompok masyarakat dari arus utama bangsa Perancis. Ia waktu itu menggambarkan ketimpangan dalam masyarakat Perancis, dimana banyak kelompok yang termarginalisasi dan tidak mendapat perhatian, karena hilangnya solidaritas bangsa Perancis, yang sebenarnya merupakan ciri budaya bangsa Perancis. Lenoir juga menyatakan 1 dari 10 orang Perancis mengalami eksklusi sosial. Dalam kelompok ini termasuk orang-orang cacat fisik dan mental, orang-orang yang berkeinginan bunuh diri, orang jompo, anak-anak salah perlakuan, orang tua tunggal, anak-anak nakal, serta orang-orang yang tidak diterima dalam pergaulan masyarakat normal. Akibat eksklusi sosial tersebut menyebabkan terjadinya deprivasi dan kemiskinan.

Pemikiran Lenoir tersebut diadopsi oleh berbagai lembaga internasional untuk memahami proses pemiskinan dan deprivasi masyarakat di berbagai negara. Pada tahun 1997, Perdana Menteri Inggris, Tony Blair menggunakan konsep eksklusi sosial sebagai pertimbangan dalam membuat kebijakan mengatasi masalah deprivasi pada masyarakat Inggris. Blair bahkan membentuk *Social Exclusion Unit (DEU)* untuk menangani eksklusi sosial. Menurut Blair (Sinclair, 2001) eksklusi sosial digambarkannya sebagai:

“a short hand label for what can happen when individuals or areas suffer from a combination of linked problems such as unemployment, poor skills, low income, poor housing, high crime environments, bad health, and family breakdown.”

Sewaktu eksklusi sosial pertama kali disebut Lenoir, hanya berkaitan dengan ketimpangan yang terjadi di Perancis. Namun setelah konsep eksklusi sosial itu diadopsi oleh negara-negara di Eropa Barat dan Amerika, eksklusi sosial berkembang dan mengalami perluasan makna, sesuai dengan kondisi masyarakat di negara-negara tersebut, baik berkenaan dengan aspek ekonomi, sosial, maupun budaya di negara yang bersangkutan. Dengan demikian eksklusi sosial dapat dipandang sebagai suatu masalah yang terdiri dari sejumlah deprivasi yang saling terkait yang membatasi peluang individu, keluarga maupun

seluruh komunitas untuk berpartisipasi di dalam arus utama kehidupan sosial kemasyarakatan. (Sinclair, 2001).

Bradshaw, J.et al. (1998) membagi dimensi eksklusi menjadi empat dimensi yaitu:

1. Kemiskinan, yaitu eksklusi terhadap kesamaan pendapatan dan sumber daya
2. Eksklusi pasar tenaga kerja, terutama berkaitan dengan pengangguran
3. Eksklusi jasa, termasuk di dalamnya adalah eksklusi jasa keuangan
4. Eksklusi dari hubungan sosial, yaitu isolasi sosial

Keterkaitan antara aspek ekonomi, sosial, maupun budaya tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Misalnya eksklusi yang terjadi pada suatu tahap kehidupan (eksklusi pendidikan, tidak mempunyai kesempatan mengikuti pendidikan pada waktu masih kecil) akan berdampak pada partisipasi sosial pada tahap kehidupan berikutnya, misalnya tidak mendapatkan kesempatan untuk memasuki lapangan kerja dan juga kemampuan untuk mengakses sumberdaya keuangan (gaji, dan lain-lain). Dikarenakan tidak mendapatkan sumber keuangan yang mencukupi, maka kesempatan untuk mengakses jasa keuangan, terutama pembiayaan atau kredit akan terbatas. Eksklusi keuangan sebagai lawan kata dari inklusi keuangan adalah merupakan salah satu jenis eksklusi sebagaimana yang disebutkan sebelumnya. Dalam ruang lingkup yang lebih sempit, eksklusi keuangan dapat didefinisikan eksklusi dari sumber-sumber pembiayaan/kredit dan jasa-jasa keuangan yang lain.

2.5. Pengembangan Hipotesis

2.5.1. Pengaruh Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Terhadap Kinerja UMKM

Inklusi keuangan telah menjadi perhatian utama dalam penentuan kebijakan di banyak negara di dunia. Tujuan utama dari inklusi keuangan adalah mendorong masyarakat yang pada mulanya tidak mempunyai akses ke jasa keuangan, bisa mempunyai akses ke jasa keuangan formal, dan juga tersedianya berbagai jasa keuangan dengan biaya yang terjangkau bagi rumah tangga dan UMKM (Yorulmaz,2013).

Ketidakterediaan jasa keuangan akan menyebabkan biaya transaksi keuangan lebih tinggi sampai lima kali lipat dari biaya transaksi biasa (Solo, 2008), Lebih parah lagi dengan tiadanya akses ke jasa keuangan menyebabkan kelompok masyarakat tertentu menggunakan jasa rentenir (Yorulmaz, 2013). Masalah utama yang sering dihadapi oleh UMKM di Indonesia adalah sulitnya mendapatkan kredit. Hal ini disebabkan karena sebagian besar

kredit perbankan yang ada di Indonesia lebih banyak disalurkan kepada perusahaan-perusahaan besar daripada kepada UMKM (Rosengard dan Prasetyantoko, 2011).

Indonesia juga menganggap pentingnya *financial inclusion* dengan dirumuskannya Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Tentu saja apa yang ditetapkan oleh pemerintah ini berlaku bagi semua lembaga keuangan, baik yang konvensional maupun yang syariah. Perbankan syariah di Indonesia perlu berperan aktif dalam program ini, dengan pertimbangan bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, jasa keuangan yang ditawarkan bebas riba, dan juga beragamnya produk dan jasa keuangan yang ditawarkan oleh bank syariah pada masyarakat. Dalam kaitannya dengan UMKM meningkatnya akses pembiayaan dari perbankan syariah diyakini bisa meningkatkan potensi kewirausahaan UMKM di negara-negara berkembang (Huda, 2012). Peningkatan inklusi keuangan makin mengurangi hambatan keuangan untuk berkembangnya UMKM (Naceur et al., 2015).

Inklusi keuangan perbankan syariah meliputi tiga dimensi yaitu: *banking penetration, availability of banking service, dan usage*. *Banking penetration* adalah keterjangkauan sistem perbankan syariah oleh masyarakat yang diukur dari jumlah rekening bank syariah per 1000 orang. *Availability of banking service* adalah tersedianya jasa pelayanan perbankan syariah pada masyarakat yang diukur dengan jumlah kantor cabang bank syariah per 1000 orang. *Usage* adalah pemanfaatan jasa perbankan syariah oleh masyarakat yang diukur dengan volume pembiayaan dan deposito sebagai proporsi produk domestik regional bruto.

Beberapa penelitian inklusi keuangan telah dilakukan. Hasil penelitian Aysan et al. (2016) yang melakukan penelitian terhadap tigapuluh enam bank konvensional dan empat bank Islam di Turki selama kurun waktu 2006 sampai dengan tahun 2014 diperoleh hasil bahwa bank Islam (dikenal dengan istilah *Participation Bank*) lebih sesuai untuk menjalankan pembiayaan terhadap UMKM dibanding dengan bank konvensional. Hal itu disebabkan karena dalam operasional bank syariah tersedia suatu layanan jasa perbankan yang berbasis kerja sama antara bank dan nasabah, misalnya skema *mudharabah* dan *musyarakah*, sehingga memungkinkan bank syariah untuk membiayai proyek dengan resiko yang relatif lebih tinggi (Huda, 2012). UMKM lebih tepat untuk menggunakan produk dan jasa perbankan syariah, karena perbankan syariah memaksimalkan keuntungan dan menjaga prinsip-prinsip utama dalam etika bisnis, dan biaya yang lebih kompetitif (Mumani, 2014).

Widarwati et al.(2019) meneliti dampak inklusi keuangan terhadap stabilitas bank syariah di Indonesia pada tahun 2012-2016 dengan mengambil sampel 5 bank syariah di

Indonesia. Hasilnya adalah inklusi keuangan berpengaruh positif terhadap stabilitas keuangan bank syariah. Prastowo (2019) meneliti pengaruh keuangan inklusi perbankan syariah terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Penelitian dilakukan di 33 propinsi dari tahun 2014 sampai tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inklusi keuangan perbankan syariah memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Fahmy et al. (2016) melakukan penelitian keuangan inklusif terhadap kredit yang disalurkan pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah Indonesia. Penelitian dilakukan di 33 propinsi di Indonesia pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013. Hasilnya adalah inklusi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredit yang disalurkan pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah.

Tabel 2. 1. Penelitian Terdahulu tentang Inklusi Keuangan dan UMKM

Peneliti	Judul	Variabel Dependen	Variabel Independen	Hasil Penelitian
Obaid M Fahmy,, M Rustam, Evi Asmayadi (2016)	Pengaruh Keuangan Inklusif Terhadap Kredit Yang Disalurkan pada Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Kredit Sektor UMKM	<ul style="list-style-type: none"> • Dimesi Akses • Dimensi Penggunaan • LDR • NPL 	Faktor yang berpengaruh terhadap jumlah kredit adalah dimensi akses, dimensi penggunaan, dan LDR
Prastowo (2018)	Analisis Regional Keuangan Inklusi Perbankan Syariah Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia	Indeks Keuangan Inklusi Perbankan Syariah	<ul style="list-style-type: none"> • Gini Indeks • PDRB • Kemiskinan • Pendidikan 	Inklusi Keuangan Perbankan Syariah berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan
Widarwati, Ester, 2019	Role of Financial Inclusion to Stability, The Case of Indonesia's Sharia Banking	Stabilitas Bank Syariah	<ul style="list-style-type: none"> • Deposito 	Inklusi Keuangan Berpengaruh Positif Terhadap Stabilitas Bank Syariah
Arbiana Govori (2013)	Factors Affecting The Growth and Development of SME's : Experiences from Kosovo	Pertumbuhan UMKM	<ul style="list-style-type: none"> • Akses lembaga keuangan • Persaingan • Kebijakan pemerintah 	Faktor yang menghambat pertumbuhan UKM: akses pada lembaga jasa keuangan
Asma Banzazoua Diabate Ardjouman Othman Abada (2015)	Establishing The Factors Affecting The Growth of Small and Medium Sized Enterprises in Algeria	Pertumbuhan UMKM	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan • Akses lembaga keuangan eksternal • Kemampuan sumber daya 	Faktor penghambat UKM: persaingan, akses ke lembaga keuangan

			<p>manusia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Karakteristik kewirausahaan • Kemampuan manajerial • Ketrampilan pemasaran • Kemampuan teknologi 	
Besnik Akrasniqi (2007)	Barriers to entrepreneurship and SME Growth in transition: The Case of Kosova	Pertumbuhan UMKM	<ul style="list-style-type: none"> • Usia usaha • Lingkungan hukum • Perpajakan • Birokrasi • Persaingan tidak sehat • Pendanaan • Lokasi 	UKM lebih memper-timbangkan hambatan yang berkaitan dengan lingkungan eksternal yaitu persaingan tak sehat dan pajak
Nurul Indarti Maria Langen Gerg	Factors Affecting Business Success Among SMES! Empirical Evidence From Indonesia	Kesuksesan bisnis	<ul style="list-style-type: none"> • Karakteristik pengusaha (umur, gender, pengalaman kerja, pendidikan) • Karakteristik UMKM (asal usaha, sumber daya keuangan, ukuran perusahaan) • Variabel kontekstual 	Akses modal, pemasaran dan teknologi adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan bisnis.
Miroslav Mateev Yanko Anastasov (2010)	Determinants of small and medium sized fast growing enterprises in control and eastern Europe: A Panel Data Analysis	Pertumbuhan UMKM	<ul style="list-style-type: none"> • Kekayaan total • Aset tidak berwujud • Aktiva lancar • Struktur keuangan • Hutang • Produktivitas tenaga kerja • Aliran kas • Jumlah karyawan • Usia perusahaan 	Pertumbuhan UKM dipengaruhi oleh struktur keuangan dan produktivitas dan memerlukan akses modal dari luar (external capital)

Leonardo Becchetti Giovani Trovato (1994)	The Determinants of Growth For Small And Medium Sized Firms. The Role of The Availability of External Finance	Pertumbuhan UMKM	<ul style="list-style-type: none"> • Industri • Lingkungan makro • Ukuran perusahaan • Kepemilikan • Ketersediaan dana dari luar • Rasio kredit • Kelayakan kredit • Ekspor 	Faktor yang menentukan pertumbuhan UKM adalah ukuran, kelahiran, tersedianya akses jasa keuangan eksternal, dan ekspor
Will Bartlett Vladimir Bukvic (1998)	Barriers to SME Growth in Slovenia	Pertumbuhan UMKM	<ul style="list-style-type: none"> • Usia perusahaan • Birokrasi • Pembayaran terlambat • Biaya kredit • Otoritas daerah 	Faktor yang menghambat UMKM adalah lambatnya pembayaran, biaya kredit yang tinggi
Azam Roomi, M Harism, P Kerridge, J.B (2009)	Women-owned Small and Medium Enterprises in England	Jumlah karyawan	<ul style="list-style-type: none"> • Efektivitas jaringan • Pemasaran yang tepat • Kemudahan akses sumber dana • Ketersediaan tenaga kerja trampil • Pelatihan kewirausahaan 	Faktor yang menghambat pertumbuhan UKM adalah akses pada modal, minimnya ketrampilan
Chittithawora, L Aminul Islam, Keawcham, Muhd Yusuf (2010)	Factors Affecting Business Success of Small and Medium Enterprises in Thailand	Kesuksesan UMKM	<ul style="list-style-type: none"> • Karakteristik pengusaha • Karakteristik perusahaan • Manajemen praktis • Produk dan jasa • Cara menjalankan bisnis • Sumber daya keuangan • Strategi • Lingkungan eksternal 	Faktor mempengaruhi keberhasilan UKM adalah lingkungan eksternal, pelanggan dan pasar, karakteristik UMKM, sumber daya dan keuangan

Untuk mengukur kinerja UMKM digunakan dua indikator yaitu jumlah unit UMKM dan jumlah tenaga kerja pada UMKM. Inklusi keuangan terdiri dari 3 dimensi, yaitu *banking penetration*, *avallability of banking service*, dan *usage*. *Banking penetration* dengan menggunakan indikator jumlah rekening berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Menurut Irmawati et al., (2013) pengusaha UMKM yang berhasil cenderung mempunyai lebih banyak rekening untuk memudahkan transaksi bisnisnya. *Availability of banking service* menggunakan indikator jumlah cabang bank syariah berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM, karena kedekatan kantor cabang dengan nasabah dan jumlah cabang akan mempermudah nasabah untuk akses jasa keuangan, sehingga bisa membantu meningkatkan kinerja UMKM (Degryse dan Ongena,2005). Selain keberadaan kantor cabang, penggunaan agen bank bisa menjadi alternatif bagi bank untuk mendekati nasabah, sebagai pengganti kantor cabang (Mwende et al., 2015). *Usage* berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM, karena dengan memanfaatkan jasa pembiayaan dari bank UMKM bisa meningkatkan kinerjanya. Problem utama yang dihadapi oleh UMKM adalah sulitnya mendapatkan bantuan pendanaan dari bank (Rosengard dan Prasetyantoko, 2011). Berdasarkan hal tersebut disusunlah suatu hipotesis sebagai berikut :

Ho : *banking penetration* perbankan syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja UMKM.

Ha₁ : *banking penetration* perbankan syariah berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM .

Ho : *Availability of banking service* bank syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja UMKM.

Ha₂ : *Availability of banking service* bank syariah berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM.

Ho : *usage* perbankan syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja UMKM.

Ha₃ : *usage* perbankan syariah berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM.

Pengaruh inklusi keuangan perbankan konvensional terhadap kinerja UMKM

Didalam penelitian ini inklusi keuangan perbankan konvensional menjadi variabel kontrol. Inklusi keuangan perbankan konvensional meliputi tiga dimensi yaitu: *banking penetration*, *availability of banking service*, dan *usage*. *Banking penetration* adalah keterjangkauan sistem perbankan konvensional oleh masyarakat yang diukur dengan jumlah rekening per 1000 orang. *Availability of banking service* adalah tersedianya jasa pelayanan perbankan konvensional pada masyarakat yang diukur dengan jumlah kantor cabang per 1000 penduduk. *Usage* adalah pemanfaatan jasa perbankan konvensional oleh masyarakat yang diukur dengan volume kredit dan deposito perbankan konvensional sebagai proporsi produk domestik regional bruto.

Ho : *banking penetration* di bank konvensional tidak berpengaruh terhadap kinerja UMKM.

Ha₄ : *banking penetration* di bank konvensional berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM.

Ho : *availability of banking service* bank konvensional tidak berpengaruh terhadap kinerja UMKM.

Ha₅ : *availability of banking service* bank konvensional berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM.

Ho : *Usage* pada bank konvensional tidak berpengaruh terhadap kinerja UMKM.

Ha₆ : *Usage* pada bank konvensional berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM.

2.5.2. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja UMKM

Beberapa peneliti menyebutkan bahwa ada pengaruh antara pertumbuhan ekonomi dan kinerja UMKM di berbagai negara. Mukorera dan Mahadea menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran dan *money supply* mempengaruhi pertumbuhan UMKM di suatu negara (Mukorea dan Mahadea, 2014). Pendapat yang sama dikemukakan oleh Plehn-Dujowich dan Grove (2012), yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi

mempengaruhi kewirausahaan, demikian pula sebaliknya kewirausahaan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Suatu penelitian dilakukan oleh Osakwe et al. (2015), untuk melihat pengaruh beberapa variabel makro ekonomi terhadap pertumbuhan UMKM di Republik Czech. Variabel makro ekonomi yang diteliti terdiri dari tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, kredit yang disalurkan oleh sektor keuangan terhadap pertumbuhan UMKM. Penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik ekonometri. Hasil yang diperoleh adalah ada hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan UMKM. Penelitian yang hampir sama dilakukan oleh Munizu, yang mengamati pengaruh faktor-faktor eksternal dan internal terhadap kinerja UMKM di Sulawesi Selatan (Munizu, 2010). Faktor eksternal yang diteliti meliputi aspek sosial budaya dan ekonomi, dimana termasuk di dalamnya pertumbuhan ekonomi, aspek kebijakan pemerintah, dan peran lembaga terkait. Faktor internal meliputi aspek SDM, keuangan, operasional, dan pemasaran. Penelitian dilakukan dengan mengambil sampel sebanyak 150 responden dari Makasar, dan 150 responden dari Kota Pare-pare. Metode sampel yang digunakan adalah *simple random sampling*. Analisa data dilakukan secara deskriptif dan dengan *Structural Equation Modelling* (SEM). Hasilnya adalah pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kinerja UMKM. Demikian pula faktor internal mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kinerja UMKM. Faktor internal lebih besar pengaruhnya dibanding faktor eksternal

Ho : Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kinerja UMKM

Ha₇ : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM

2.5.3. Pengaruh infrastruktur terhadap kinerja UMKM

Infrastruktur merupakan roda penggerak perekonomian. Ketidacukupan infrastruktur merupakan salah satu hambatan dalam kegiatan perekonomian. Infrastruktur dapat dipandang sebagai lokomotif pembangunan ekonomi nasional dan daerah. Ketersediaan infrastruktur akan sangat menentukan tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan ekonomi. Berdasarkan penelitian dari Kamunge et al. (2014), infrastruktur adalah salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kesuksesan UMKM. Ketidacukupan infrastruktur adalah penyebab utama rendahnya tingkat investasi dan ketidakpuasan (rendahnya) kinerja UMKM. Ketiadaan tanah

yang cocok bagi UMKM di kebanyakan daerah urban dan pedesaan merupakan hambatan utama terhadap pertumbuhan dan pengembangan UMKM.

Menurut Hakim (2010), salah satu cara yang paling umum untuk mendorong usaha kecil adalah dengan menyediakan infrastruktur. Pentingnya infrastruktur terhadap kinerja dan pertumbuhan UMKM juga disebutkan oleh Mambula (2002). Menurut Mambula buruknya infrastruktur, misalnya kondisi jalan yang buruk, keterbatasan persediaan air, tidak menentunya aliran listrik, keterbatasan sistem telekomunikasi mengakibatkan UMKM harus mengeluarkan biaya *overhead* yang lebih tinggi karena mereka harus mengeluarkan biaya untuk pengadaan fasilitas infrastruktur tersebut secara mandiri.

Ho : Infrastruktur tidak berpengaruh terhadap kinerja UMKM

Ha_g : Infrastruktur berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM

2.5.4. Pengaruh dukungan pemerintah terhadap kinerja UMKM

Banyak pemerintah negara di dunia telah menaruh perhatian besar terhadap pengembangan UMKM dengan tujuan untuk memperkuat ekonomi nasional. Penelitian tentang peran pemerintah terhadap UMKM ini pernah dilakukan oleh Jasra et al.(2005), yang melakukan penelitian tentang faktor penentu keberhasilan UMKM di Pakistan, dengan mengambil sampel sebanyak 520 pengusaha UMKM, dengan menggunakan alat analisis dengan regresi korelasi. Hasil penelitian yang diperoleh adalah dukungan dan peran pemerintah termasuk salah satu faktor yang secara signifikan mempengaruhi kesuksesan UMKM, selain faktor lain, seperti sumber daya keuangan, dan lain-lain.

Peran dan dukungan pemerintah terhadap kesuksesan kinerja UMKM juga diakui oleh Indarti dan Langenberg, yang menyatakan bahwa pemerintah Indonesia telah banyak menjalankan program bantuan kepada UMKM, dan program-program tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja UMKM (Indarti dan Langenberg, 2005). Pendapat bahwa dukungan pemerintah diperlukan terhadap UMKM juga diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Munizu (2010), yang melakukan penelitian di Sulawesi Selatan yang meneliti tentang pengaruh faktor-faktor eksternal dan internal terhadap kinerja UMKM. Diantara faktor eksternal yang berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja UMKM adalah kebijakan pemerintah yang mendukung. Walaupun juga harus diakui bahwa di dalam

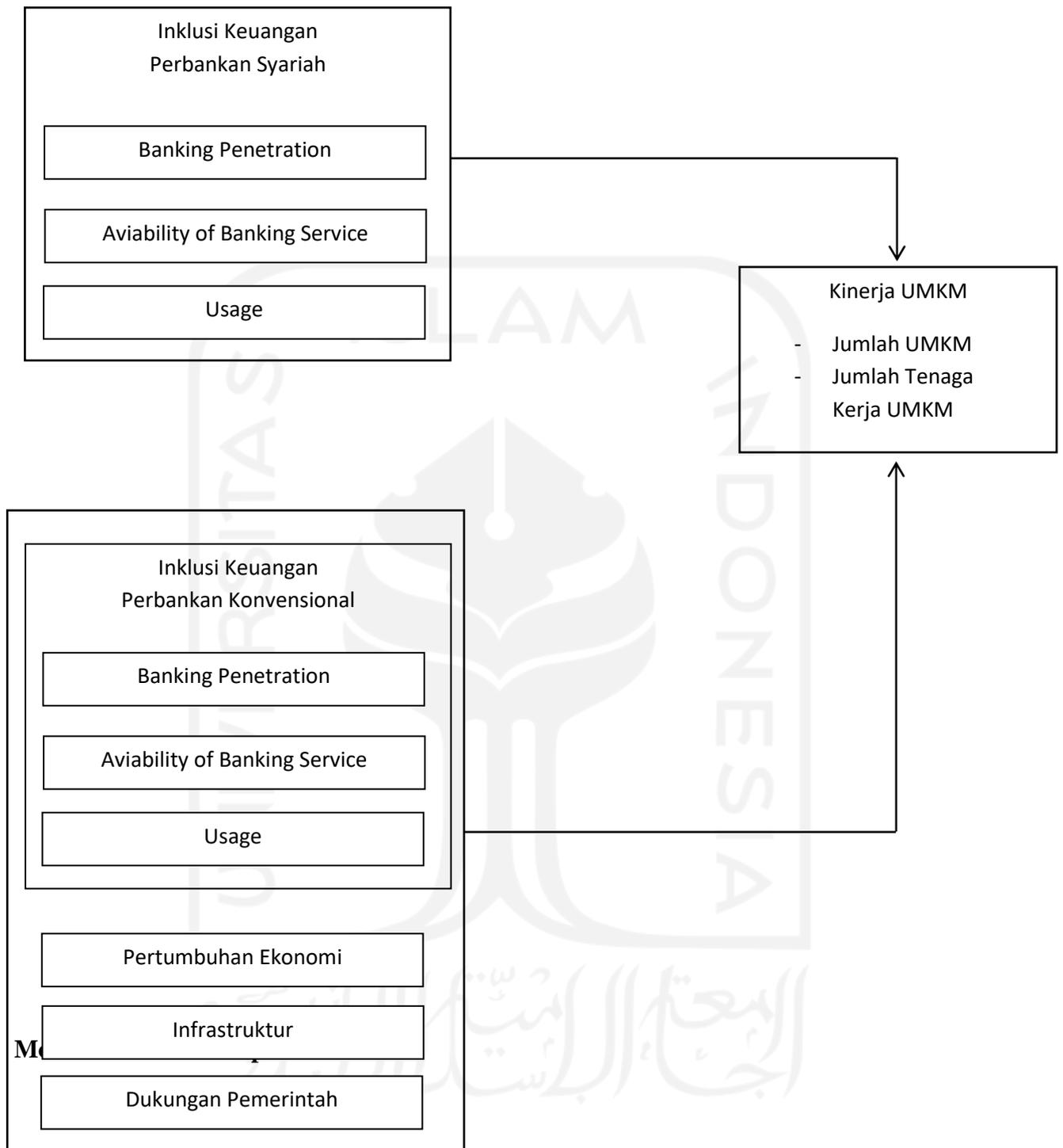
beberapa program pemerintah yang ditujukan kepada UMKM sering terjadi salah sasaran dan tidak tepat (Tambunan, 2005). Menurut Hakim (2010), peran pemerintah diperlukan untuk memberikan kesempatan bagi wirausahawan mendapatkan pengalaman bisnis dan mempraktekkan kewirausahaan dengan memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan, terutama peningkatan kecakapan bisnis, untuk meningkatkan kinerja UMKM.

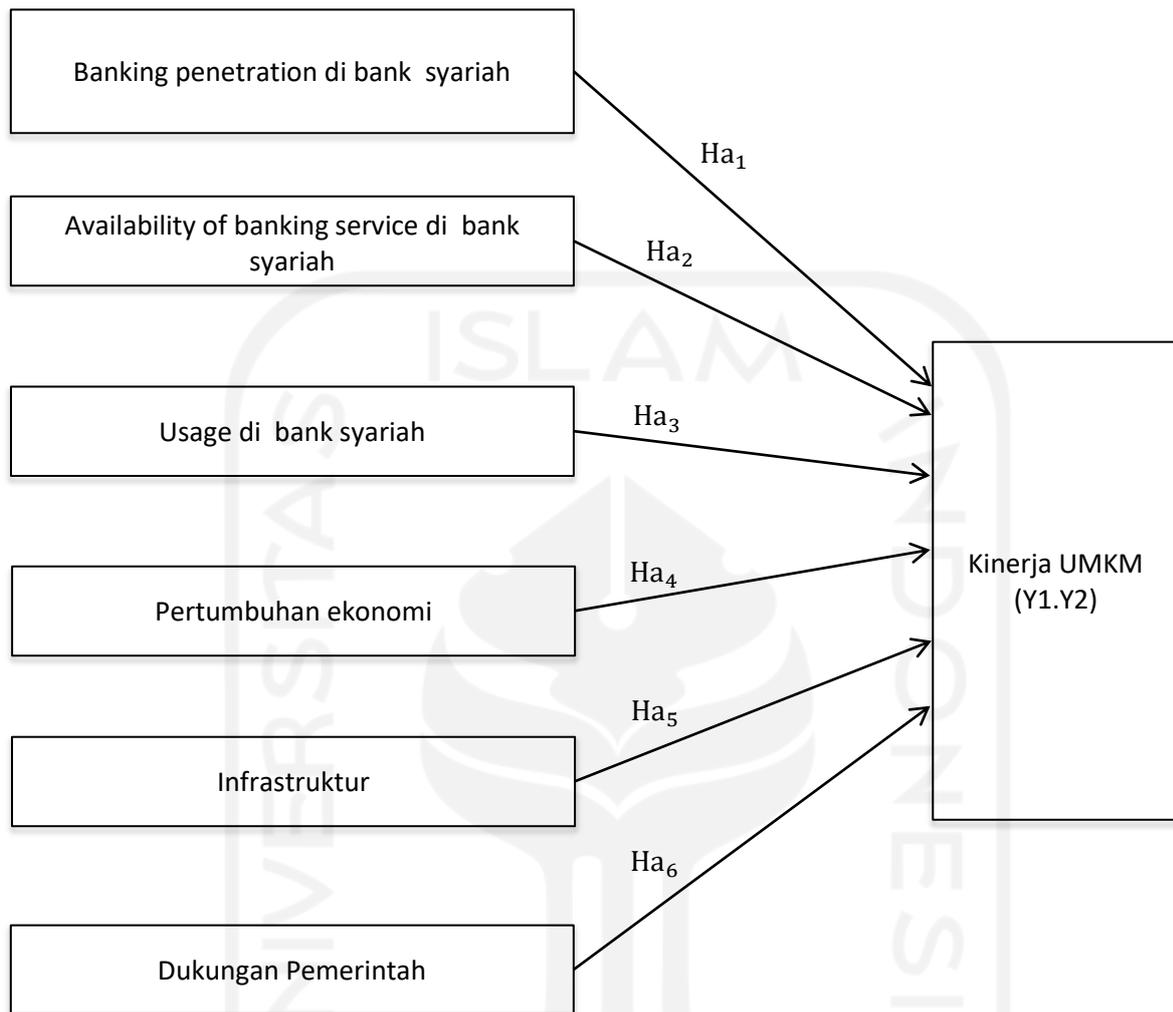
Ho : dukungan pemerintah tidak berpengaruh terhadap kinerja UMKM

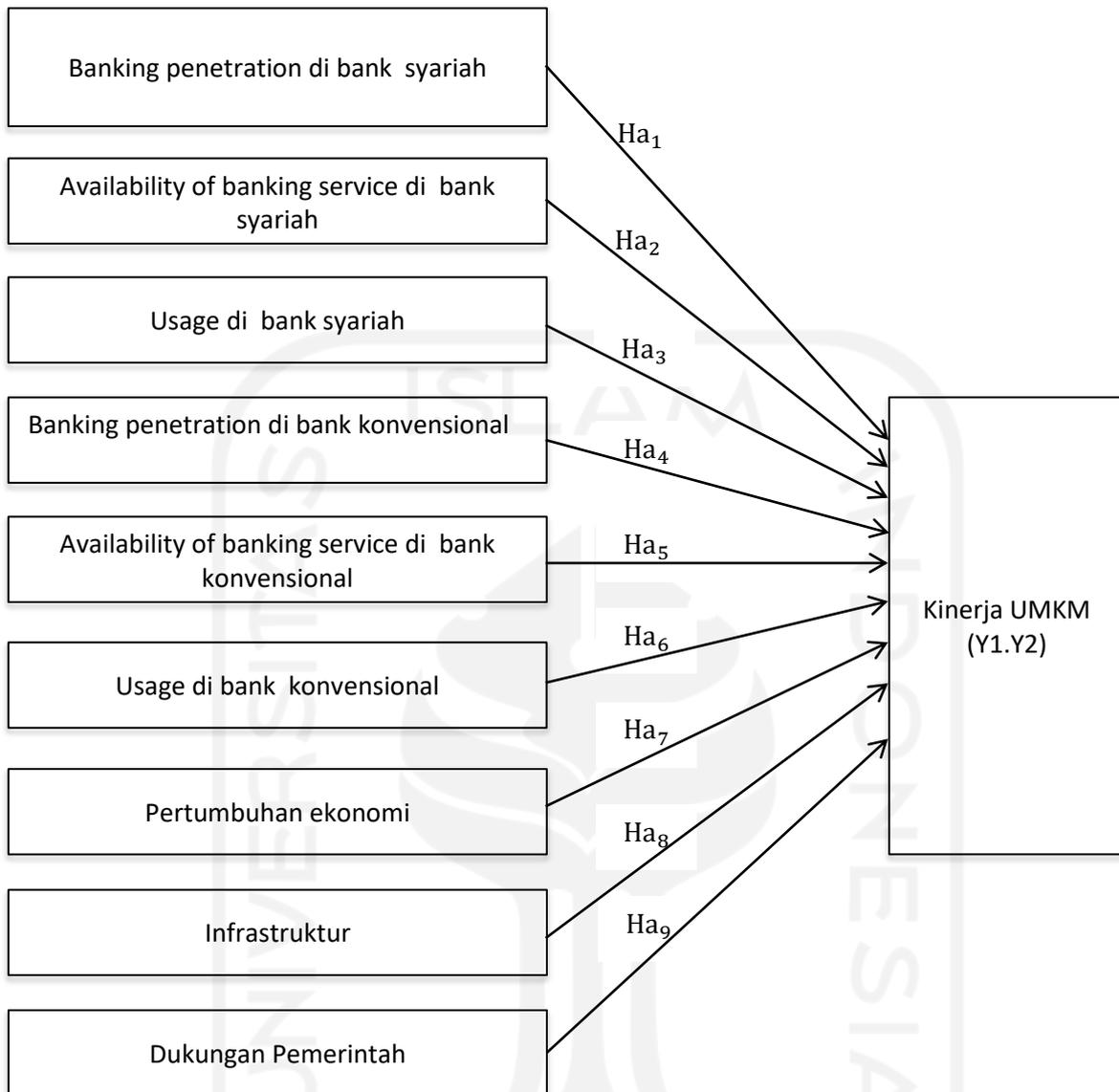
Ha₉ : dukungan pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM.



2.6. Kerangka Pemikiran Penelitian







BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membahas pengaruh inklusi keuangan perbankan syariah terhadap kinerja UMKM. Peran dan pengaruh bank syariah dilihat dari aspek inklusi keuangan perbankannya yang meliputi *banking penetration*, *availability of banking service* dan *usage*. Kinerja UMKM dilihat dari jumlah tenaga kerja pada UMKM dan jumlah UMKM. Dalam penelitian ini juga dilibatkan pengaruh beberapa variabel kontrol seperti: *banking penetration* bank konvensional, *availability of banking service* bank konvensional, *usage* bank konvensional, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan dukungan pemerintah daerah setempat. Variabel kontrol adalah variabel untuk mengontrol hubungan sebab akibat supaya didapatkan model empiris yang lebih lengkap dan lebih baik. Variabel kontrol bukan variabel utama yang akan diteliti dan diuji tetapi lebih pada variabel lain yang mempunyai efek pengaruh. (Hartono, 2004).

Untuk mengetahui apakah inklusi keuangan perbankan syariah berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja UMKM, maka dilakukan beberapa tahap analisis. *Pertama* analisis deskriptif untuk menghitung rerata data, data minimum, dan data maksimum, serta deviasi standar masing-masing variabel penelitian. *Kedua*, analisis regresi dengan variabel dependen adalah kinerja UMKM dan variabel independen terdiri dari enam variabel, yaitu tiga variabel dimensi inklusi (*banking penetration* bank syariah, *availability of baking service* bank syariah, *usage* bank syariah), dan tiga variabel kontrol yaitu PDRB, infrastruktur, dan APBD. Dikarenakan ada dua indikator kinerja UMKM, yaitu jumlah unit UMKM dan jumlah tenaga kerja pada UMKM, maka analisis pada tahap ini dilakukan dua kali, dengan menggunakan variabel dependen yang berbeda, dan variabel independen yang sama. *Ketiga*, analisis regresi dengan variabel dependen kinerja UMKM dan variabel independen sembilan variabel, terdiri dari tiga variabel dimensi inklusi keuangan perbankan syariah dan enam variabel kontrol. Variabel kontrol tersebut terdiri dari tiga variabel dimensi inklusi keuangan perbankan konvensional dan tiga variabel lain, yaitu PDRB, infrastruktur, dan APBD. Dikarenakan ada dua indikator kinerja UMKM, yaitu jumlah unit UMKM dan jumlah tenaga kerja pada UMKM, maka analisis pada tahap ini dilakukan dua kali, dengan menggunakan

variabel dependen yang berbeda, dan variabel independen yang sama. *Keempat*, melakukan *Nested Test* untuk memilih model terbaik. Menurut Widarjono (1990), untuk memilih model terbaik bisa menggunakan Uji Wald, karena sampel dalam penelitian ini berjumlah besar. Model yang terpilih dilakukan pengujian asumsi klasik.

3.2. Populasi dan sampel

Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal-hal menarik yang diinginkan oleh peneliti untuk diinvestigasi (Sekaran dan Bougie, 2017). Menurut Kuncoro (2009), populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, obyek, transaksi, atau kejadian dimana kita bisa tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi obyek penelitian. Sampel adalah bagian dari populasi yang karakteristiknya diteliti, yang diharapkan dapat mewakili populasi penelitian.

Penentuan sampel dilakukan setelah penentuan populasi. Dalam penelitian ini populasinya adalah UMKM dan bank syariah yang ada di kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Adapun metode pengambilan sampel di dalam penelitian ini dilakukan dengan *probability sampling*. *Probability sampling* adalah pengambilan sampel dimana setiap sampel dipilih berdasarkan prosedur seleksi dan memiliki peluang yang sama untuk dipilih (Kuncoro, 2009). Adapun pertimbangan pengambilan sampel dilakukan dengan *probability sampling* ini adalah kesimpulan hasil penelitian bisa digeneralisasikan. Disain *probability sampling* yang dipilih adalah *cluster sampling*. *Cluster sampling* adalah pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara membagi populasi menjadi beberapa sub kelompok berdasar kriteria tertentu. Kriteria yang sering digunakan dalam *cluster sampling* adalah sampel area (Kuncoro, 2009). *Cluster sampling* dilakukan dengan membagi populasi menjadi dua *cluster*, yaitu *cluster* Jawa dan luar Jawa (Sumatra), dengan pertimbangan bahwa mayoritas bank syariah dan UMKM ada di pulau Jawa dan Sumatra. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 40 kabupaten/kota. Pulau Jawa dibagi menjadi lima sub cluster, yaitu Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Cluster luar Jawa adalah Sumatera Barat. Semula akan diambil sampel sebanyak 10% dari jumlah populasi, yaitu 50 sampel. Ternyata beberapa kabupaten tidak lengkap datanya, sehingga akhirnya diambil 40 sampel. Hal ini didasarkan pendapat Kuncoro (2009) bahwa penelitian untuk studi korelasional minimal diperlukan 30 sampel.

3.3. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data UMKM yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UKM dan sebagian data diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Koperasi (Dsiperindagkop) di beberapa kabupaten/kota di Jawa dan Sumatera Barat dalam lima tahun terakhir. Selain itu untuk data yang berkaitan dengan bank syariah diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan data yang lain diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pertimbangan penggunaan waktu 5 tahun adalah karena sebelum tahun 2013 tidak tersedia data bank syariah di OJK. Penggunaan data sekunder dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan antara lain: lebih mudah diperoleh jika dibandingkan data primer dan biaya lebih murah. Adapun data–data literatur yang dibutuhkan dalam penelitian ini didapatkan dengan melakukan studi literatur dengan mempelajari, meneliti, dan mengkaji buku, jurnal, serta segala informasi yang berhubungan dengan topik penelitian, dalam rangka mendapatkan landasan teoritis guna melakukan analisa atas penelitian ini.

3.4. Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian

Bagian ini akan menjelaskan definisi indikator variabel, dan pengukuran variabel. Variabel yang digunakan ditentukan berdasarkan kerangka konseptual, tujuan, dan hipotesis penelitian. Adapun variabel–variabel tersebut dibedakan berdasarkan pada jenisnya, yaitu variabel independen dan variabel dependen.

3.4.1. Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat adanya variabel peubah bebas. Variabel dependen dalam model penelitian ini adalah kinerja UMKM. Kinerja UMKM dapat ditinjau dari jumlah tenaga kerja pada UMKM dan jumlah UMKM. Penggunaan indikator jumlah tenaga kerja pada UMKM ini mengacu pada indikator kinerja UMKM yang disampaikan oleh Harash et al. (2014) dan Kamunge et al.(2014). Alasannya adalah jumlah tenaga kerja menggambarkan besaran produksi UMKM, hal ini karena sebagian besar UMKM lebih bersifat padat karya. Sedangkan pemakaian jumlah unit UMKM sebagai indikator kinerja UMKM didasarkan pendapat Sudiarto et al. (2014) dengan alasan, jumlah unit UMKM menggambarkan jumlah

permintaan barang/jasa terhadap UMKM tersebut. Jumlah unit usaha yang banyak menggambarkan permintaan konsumen yang banyak.

3.4.2. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen. Variabel independen disebut juga variabel yang diduga sebagai penyebab dari variabel dependen. Variabel independen meliputi:

3.4.2.1. Inklusi Keuangan Perbankan Syariah

Inklusi keuangan perbankan syariah merupakan hal yang relatif baru di dalam dunia keuangan menunjukkan aksesabilitas masyarakat terhadap jasa keuangan pada lembaga keuangan formal atau perbankan dan tersedianya berbagai jasa keuangan dengan biaya yang terjangkau bagi rumah tangga dan usaha mikro kecil dan menengah.

Sarma (2012) menggunakan formula tertentu untuk menghitung indeks tiap dimensi inklusi keuangan yang dirumuskannya sebagai berikut :

$$d_i = \frac{A_i - m_i}{M_i - m_i}$$

A_i : nilai aktual dimensi i

m_i : nilai minimum dimensi i

M_i : nilai maksimum dimensi i

Inklusi keuangan perbankan syariah meliputi tiga hal yaitu: *banking penetration*, *availability of banking service*, dan *usage*. *Banking penetration* adalah keterjangkauan sistem perbankan syariah oleh masyarakat yang diukur dari jumlah rekening bank syariah per 1000 orang. *Availability of banking service* adalah tersedianya jasa pelayanan perbankan syariah pada masyarakat yang diukur dengan jumlah kantor cabang bank syariah per 1000 orang. *Usage* adalah pemanfaatan jasa perbankan syariah oleh masyarakat yang diukur dengan volume pembiayaan dan deposito sebagai proporsi produk domestik regional bruto.

3.4.2.2. Inklusi Keuangan Perbankan Konvensional

Inklusi keuangan perbankan konvensional menjadi salah satu variabel kontrol dalam penelitian ini. Pengukuran inklusi keuangan perbankan konvensional meliputi tiga hal yaitu:

banking penetration, availability of banking service, dan usage. *Banking penetration* adalah keterjangkauan sistem perbankan konvensional oleh masyarakat yang diukur dari jumlah rekening bank konvensional per 1000 orang. *Availability of banking service* adalah tersedianya jasa pelayanan perbankan konvensional pada masyarakat yang diukur dengan jumlah kantor cabang bank konvensional per 1000 orang. *Usage* adalah pemanfaatan jasa perbankan konvensional oleh masyarakat yang diukur dengan volume kredit dan deposito sebagai proporsi produk domestik regional bruto.

3.4.2.3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses peningkatan kapasitas produksi dalam suatu perekonomian secara terus menerus atau berkesinambungan sepanjang waktu sehingga menghasilkan tingkat pendapatan dan *output* nasional yang makin lama makin besar. Pengukuran pertumbuhan ekonomi secara konvensional dengan menghitung peningkatan persentase dari Produk Domestik Bruto (PDB). PDB adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam waktu tertentu. Dalam penelitian ini wilayah yang digunakan adalah kabupaten atau kota, sehingga digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pengukuran pertumbuhan ekonomi secara konvensional dengan menghitung peningkatan persentase dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

3.4.2.4. Infrastruktur

Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, *drainase*, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Sistem jalan yang baik memberikan kemudahan akses bagi pengusaha kecil dan menengah untuk memasarkan hasil produksinya. Dalam penelitian ini infrastruktur dihitung dari proporsi panjang jalan kabupaten/kota terhadap luas wilayah kabupaten/kota.

3.4.2.5. Dukungan pemerintah

Dukungan pemerintah dalam penelitian ini dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tiap-tiap kabupaten/kota yang dipilih sebagai sampel. Data

APBD diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data APBD yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pada pos belanja tidak langsung.

3.5. Analisis Data

Analisis data menggunakan analisis kuantitatif untuk menganalisis peran bank syariah terhadap kinerja UMKM. Dalam penelitian ini digunakan alat analisis regresi data panel. Data panel adalah gabungan antara data silang (*cross section*) dengan data runtut waktu (*time series*). Data panel adalah sebuah bentuk data longitudinal, dimana observasi atas unit-unit *cross section* terulang secara reguler. Unit-unit *cross section* bisa berupa individu-individu, perusahaan, kabupaten, propinsi, maupun negara. Observasi ulangan biasanya berupa periode waktu, misalnya tahunan, kuartalan, mingguan, harian.

Penggunaan data panel dapat menjelaskan dua macam informasi yaitu informasi antar unit (*cross section*) pada perbedaan antar subyek, dan informasi antar waktu (*time series*) yang merefleksikan perubahan pada subyek waktu. Kelebihan lain penggunaan data panel adalah ketersediaan jumlah data yang dapat dianalisis, berkurangnya *kolineritas* antar variabel-variabel penjelas, meningkatnya efisiensi dari penaksiran ekonometris, dan estimasi parameter yang lebih reliabel dan lebih stabil.

Adapun model regresi dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Pada tahap pertama ada dua model, yaitu variabel dependen jumlah UMKM dan enam variabel independen, terdiri dari tiga variabel dimensi inklusi keuangan perbankan syariah dan tiga variabel kontrol yaitu PDRB, infrastruktur dan APBD. Berikutnya variabel dependen yaitu jumlah tenaga kerja pada UMKM dan enam variabel independen yang sama.

UMKM = f (BPS, BSS, USS, PDRB, IS, APBD)

$$UMKM_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 BPS_{1it} + \alpha_2 BSS_{2it} + \alpha_3 USS_{3it} + \alpha_4 PDRB_{4it} + \alpha_5 IS_{5it} + \alpha_6 APBD_{6it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana UMKM = Jumlah UMKM ; BPS = *banking penetration* di bank syariah, BSS : *availability of banking service* perbankan syariah, USS: *usage* bank syariah, PDRB = Produk Domestik Regional Bruto ; IS = Infrastruktur; APBD = Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, α = koefisien regresi ; ε = error.

JTUMKM = f (BPS, BSS, USS, PDRB, IS, APBD)

$$JTUMKM_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 BPS_{1it} + \alpha_2 BSS_{2it} + \alpha_3 USS_{3it} + \alpha_4 PDRB_{4it} + \alpha_5 IS_{5it} \\ + \alpha_6 APBD_{6it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana JTUMKM = Jumlah tenaga kerja UMKM ; BPS= *banking penetration* di bank syariah, BSS : *availability of banking service* perbankan syariah, USS: *usage* bank syariah, PDRB = Produk Domestik Regional Bruto; IS = Infrastruktur; APBD = Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, α = koefisien regresi; ε = error.

Pada tahap kedua ada dua model, yaitu variabel dependen jumlah UMKM dan sembilan variabel independen, terdiri dari tiga variabel dimensi inklusi keuangan perbankan syariah, tiga variabel inklusi keuangan perbankan konvensional, dan tiga variabel kontrol yaitu PDRB, infrastruktur dan APBD. Berikutnya persamaan regresi dengan variabel dependen yaitu jumlah tenaga kerja pada UMKM dan sembilan variabel independen yang sama.

$$UMKM = f (BPS, BSS, USS, BPK, BSK, USK, PDRB, IS, APBD)$$

$$UMKM_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 BPS_{1it} + \alpha_2 BSS_{2it} + \alpha_3 USS_{3it} + \alpha_4 BPK_{4it} + \alpha_5 BSK_{5it} + \alpha_6 USK_{6it} \\ + \alpha_7 PDRB_{7it} + \alpha_8 IS_{8it} + \alpha_{10} APBD_{10it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana UMKM = jumlah UMKM; BPS= *banking penetration* di bank syariah, BSS : *availability of banking service* perbankan syariah, USS: *usage* bank syariah, BPK: *banking penetration* perbankan konvensional, USK: *usage* bank konvensional, PDRB = Produk Domestik Regional Bruto; IS = Infrastruktur; APBD = Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, α = koefisien regresi; ε = error.

$$JTUMKM = f (BPS, BSS, USS, BPK, BSK, USK, PDRB, IS, APBD)$$

$$JTUMKM_{it1} = \beta_0 + \beta_1 BPS_{1it} + \beta_2 BSS_{2it} + \beta_3 USS_{3it} + \beta_4 BPK_{4it} + \beta_5 BSK_{5it} + \beta_6 USK_{6it} \\ + \beta_7 PDRB_{7it} + \beta_8 IS_{8it} + \beta_{10} APBD_{10it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana JTUMKM = jumlah tenaga kerja UMKM ; BPS= *banking penetration* di bank syariah, BSS : *availability of banking service* perbankan syariah, USS: *usage* bank syariah, BPK: *banking penetration* perbankan konvensional, USK: *usage* bank konvensional , PDRB = Produk Domestik Regional Bruto; IS = Infrastruktur ;APBD = Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, α = koefisien regresi ; ε = error.

Untuk mendapatkan model yang terbaik, pertama, dilakukan uji dengan membandingkan antara metode *fixed effects* dengan *common effects* yang biasa disebut uji signifikansi *fixed effects*. Kedua, uji dengan membandingkan antara metode *fixed effects* dengan *random effects* yang biasa disebut uji Hausman. Secara umum terdapat dua pengujian yang sering digunakan untuk memilih model regresi data panel mana yang terbaik diantara model *common effects*, model *fixed effects* dan model *random effects*, yaitu uji F yang digunakan untuk memilih antara model *common effect* atau model *fixed effects*, dan uji Hausman untuk memilih antara model *fixed effects* dan model *random effect*. Terdapat tiga uji yang bisa dilakukan untuk menentukan model estimasi yang paling tepat, yaitu uji F untuk signifikansi *fixed effects*, uji LM untuk signifikansi *random effects* dan uji Hausman untuk signifikansi *fixed effects* dan *random effects*.

Memilih Model *Common Effects* atau Model *Fixed Effects*

Untuk mendapatkan model yang terbaik, dilakukan berbagai tahap pengujian. Beberapa pengujian yang dilakukan adalah uji signifikansi *fixed effect*, uji signifikansi *random effect*, dan uji signifikansi *fixed effect* dan *random effect*.

Uji signifikansi *fixed effects* digunakan untuk memutuskan apakah model dengan asumsi *slope* dan intersep tetap antar individu atau antar waktu (*common effects*), ataukah diperlukan penambahan variabel *dummy* untuk mengetahui perbedaan intersep (*fixed effects*). Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan uji statistik F. Uji F ini digunakan dengan tujuan untuk memberikan informasi model yang lebih baik diantara dua teknik regresi data panel, apakah dengan *fixed effects* atau dengan model regresi data panel tanpa variabel *dummy* (*common effects*). Proses pengujian ini dilakukan dengan uji F. Cara ini dilakukan dengan melihat nilai *residual sum of squares* (RSS) dari kedua model regresi tersebut.

Dalam uji ini akan dibandingkan antara hipotesis nol (H_0) yang menyatakan bahwa intersep dan *slope* adalah tetap (model *common effects*) dan hipotesis alternatif (H_a) yang menyatakan bahwa *slope* adalah tetap sedangkan intersep berubah-ubah (model *fixed effects*). Adapun uji F statistiknya adalah sebagai berikut:

$$F_{\text{hitung}} = \frac{(RSS_1 - RSS_2)/i - 1}{(RSS_2)/(it - i - k)}$$

Dimana RSS_1 dan RSS_2 masing-masing adalah *residual sum of squares* dari model *common effects* tanpa variabel *dummy* dan model *fixed effects* dengan variabel *dummy*;

i =jumlah individu; t : jumlah periode waktu; k : banyaknya parameter dalam model *fixed effects*.

Hipotesis nol yang digunakan adalah bahwa intersep memiliki nilai sama. Nilai F hitung yang diperoleh selanjutnya diuji berdasarkan nilai F tabel dengan df sebesar m untuk numerator dan $n-k$ untuk denominator. Jika nilai statistik F yang dihasilkan lebih besar dibandingkan nilai F -tabel pada tingkat signifikansi yang digunakan, maka menolak hipotesis nol, yang berarti asumsi koefisien intersep dan *slope* adalah tetap tidak benar, sehingga teknik regresi data panel dengan menggunakan model *fixed effects* lebih baik jika dibandingkan dengan model regresi data panel *common effects*.

Misal nilai probabilitas F -statistik sebesar 3,2%. Jika digunakan tingkat signifikansi α sebesar 5% maka dapat disimpulkan kita menolak H_0 dan menerima H_a karena $p < \alpha$. Artinya model *fixed effects* lebih baik digunakan dibandingkan menggunakan model *common effects*.

Uji Signifikansi *Random Effects*

Setelah diketahui bahwa model *fixed effects* lebih baik dari *common effects*, tahap selanjutnya adalah menguji pemilihan model antara *fixed effects* dengan *random effects*. Namun sebelum melakukan uji pemilihan model antara *fixed effects* dengan *random effects*, perlu dilakukan uji signifikansi model *random effects*. Uji signifikansi *random effects* dilakukan untuk menentukan apakah model dengan pendekatan *random effects* lebih baik dibandingkan dengan model dengan OLS pada pendekatan *common effects*. Metode yang dapat digunakan adalah

$$LM = \frac{nT}{2(T-1)} \left[\frac{\sum_{i=1}^n [\sum_{t=1}^t eit]}{\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^t eit^2} - 1 \right]^2$$

$$LM = \frac{nT}{2(T-1)} \left[\frac{\sum_{i=1}^n (T-e_i)^2}{\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^t eit^2} - 1 \right]^2$$

Hipotesis nol yang digunakan adalah varian data *cross section* bernilai nol. Nilai LM hitung lebih besar dari nilai χ^2 tabel, maka hipotesis nol ditolak sehingga model dengan pendekatan *random effects* lebih tepat untuk digunakan

Pemilihan Model *Fixed Effect* atau Model *Random Effects*

Uji Hausman merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui pilihan model yang lebih baik diantara model LSDV pada pendekatan *fixed effects* dan GLS pada pendekatan *random effects*. Uji ini dilakukan dengan mengestimasi nilai m dengan rumus berikut:

$$m = \hat{q} \text{Var}(\hat{q})^{-1} \hat{q}$$

Dimana $\hat{q} = [\hat{\beta} - \hat{\beta}_{GLS}]$ dan $\text{Var}(\hat{q}) = \text{Var}(\hat{\beta}) - \text{Var}(\hat{\beta}_{GLS})$.

Nilai Statistik dari uji Hausman mengikuti distribusi statistik χ^2 dengan df sebanyak k , yaitu jumlah variabel independen. Jika nilai hitung uji Hausman lebih besar dari nilai tabel χ^2 , maka model LSDV dengan pendekatan *fixed effects* lebih tepat digunakan. Sedangkan jika nilai hitung uji Hausman lebih kecil dari nilai tabel χ^2 , maka model GLS dengan pendekatan *random effects* lebih tepat digunakan (Greene, 2000:576-577).

Untuk mengetahui apakah model *random effects* lebih baik dibandingkan dengan model *fixed effects*, uji yang digunakan adalah uji *Hausman*.

$$W = x^2[K] = [\hat{\beta} - \hat{\beta}_{GLS}] \hat{\Sigma}^{-1} [\hat{\beta} - \hat{\beta}_{GLS}]$$

Dalam uji ini akan dibandingkan antara hipotesis nol (H_0) yang menyatakan bahwa model *random effects* lebih baik. Adapun hipotesis alternatif (H_a) menyatakan bahwa *fixed effects* model lebih baik. Hipotesis nol diterima jika nilai statistik Hausman (nilai W -hitung) lebih besar daripada nilai kritis statistik *chi-square*, atau dengan kata lain *p-value* lebih kecil dari nilai α yang digunakan. Hal ini berarti bahwa model *Random Effects* lebih baik untuk melakukan regresi data panel daripada model *Fixed Effects*.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan data panel. Data panel adalah suatu kelompok data yang merupakan gabungan dari data *time series* dan *cross section*. Metode yang digunakan dalam analisis data adalah regresi data panel dengan program Eviews 10. Untuk melihat apakah peran inklusi keuangan perbankan syariah signifikan di dalam meningkatkan kinerja UMKM, maka dalam penelitian ini dilakukan beberapa tahapan analisis.

Pertama, analisis deskriptif, untuk menghitung rerata data, data minimum, data maksimum, dan deviasi standar masing-masing variabel penelitian. Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis regresi model 1 yaitu model dengan variabel dependen jumlah UMKM sebagai indikator kinerja UMKM dan 6 variabel independen yang terdiri dari tiga dimensi inklusi keuangan syariah (*banking penetration, availability of banking service, dan usage*), dan tiga variabel kontrol (infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan dukungan pemerintah). Setelah itu dilanjutkan dengan analisis regresi model 2 yaitu variabel dependen jumlah tenaga kerja pada UMKM, sebagai indikator kinerja UMKM dan 6 variabel yang sama dengan model 1, yaitu *banking penetration, availability of banking service, dan usage*. Berhubung analisis regresi ini menggunakan data panel, maka tahap selanjutnya adalah memilih metode estimasi yang akan digunakan. Terdapat tiga model pendekatan estimasi yang dapat digunakan yaitu pendekatan dengan model *common effect, fixed effect, dan random effect*. Untuk mendapatkan model terbaik, dilakukan beberapa pengujian. Uji Chow untuk menguji dan memilih antara *common effect* atau *fixed effect*. Jika ternyata *fixed effect* yang lebih baik, dilanjutkan dengan uji berikutnya yaitu uji Hausman. Uji Hausman untuk memilih apakah *fixed effect* atau *random effect*.

Kedua, melakukan analisis regresi model 3 dengan variabel dependen jumlah UMKM sebagai indikator kinerja UMKM dan sembilan variabel independen. Kesembilan variabel independen itu terdiri dari tiga variabel inklusi keuangan syariah (*banking penetration, availability of banking service, usage*) dan enam variabel kontrol, 3 variabel inklusi keuangan

perbankan konvensional (*banking penetration, availability of banking service, usage*) dan tiga variabel kontrol lain, yaitu: PDRB, infrastruktur dan APBD. Setelah itu dilanjutkan dengan analisis regresi dengan cara yang sama, tetapi variabel dependennya adalah jumlah tenaga kerja pada UMKM dengan sembilan variabel independen yang sama dengan variabel independen pada proses sebelumnya. Tahapan berikutnya pemilihan model estimasi dengan melakukan uji Chow dan Hausman, seperti pada proses sebelumnya.

Ketiga melakukan *Nested Test* untuk memilih model yang ada dengan menggunakan uji Wald. Uji Wald dilakukan digunakan karena menggunakan sampel ukuran besar. (Widarjono, 2013).

4.1. Analisis Deskriptif

Berdasarkan hasil olah data secara deskriptif, diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4. 1. Hasil Analisis Deskriptif Masing-masing Variabel Penelitian

	JRS	KCS	PDS	JRK	KCK	KDK	PDRB	IS	APBD	JML UKM	TENAGA KERJA
Mean	15872.02	12.62500	1171.358	127975.5	144.1300	20899.75	12.51652	2.106152	60.30303	8157.910	23019.67
Maximum	99799.00	84.00000	12748.84	1295029.	1048.000	321408.0	302.2938	10.75962	784.3787	42006.00	106956.0
Minimum	346.0000	1.000000	9.408000	10102.00	8.000000	505.7811	67.60731	0.047288	0.594595	120.0000	400.0000
Std. Dev.	15962.16	15.96115	2094.504	206296.8	14.9135	46689.58	35.66272	2.472952	113.1820	8981.717	21337.78
Observations (N)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200

Keterangan:

JRS : jumlah rekening di bank syariah

KCS : jumlah kantor cabang, cabang pembantu, kantor kas bank syariah

PDS : jumlah pembiayaan dan deposito syariah (Rp milyar)

JRK : jumlah rekening di bank konvensional

KCK : jumlah kantor cabang, cabang pembantu, kantor kas bank konvensional

KDK : Jumlah kredit dan deposito di bank konvensional (Rp milyar)

PDRB : Produk domestik regional bruto (Rp milyar)

IS : Infrastruktur (km)

APBD : Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (Rp milyar)

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa rerata jumlah rekening bank syariah adalah 15.872 rekening, sedangkan jumlah rekening bank syariah terbanyak adalah 99.799 rekening di Kabupaten Sukabumi tahun 2016, dan jumlah rekening bank syariah minimum di kota Pariaman tahun 2013 sebanyak 346 rekening. Deviasi standar jumlah rekening di bank syariah 15.962,16. Rerata jumlah kantor cabang, kantor cabang bank syariah, kantor cabang pembantu bank syariah, dan kantor kas bank syariah adalah 12, sedangkan jumlah maksimum kantor cabang bank syariah, kantor cabang pembantu bank syariah, dan kantor kas bank syariah adalah 84 kantor di kota Bandung tahun 2013, dan jumlah minimum kantor cabang bank syariah, kantor cabang pembantu bank syariah, dan kantor kas bank syariah sebanyak 1 kantor di kota Blitar tahun 2013 dan 2014, kabupaten Agam, kabupaten Pesisir Selatan, kabupaten Solok Selatan, dan kota Pariaman tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Deviasi standar jumlah kantor cabang bank syariah, kantor cabang pembantu bank syariah, dan kantor kas bank syariah adalah 15,96115. Rerata jumlah pembiayaan dan deposito bank syariah adalah Rp 1.171,35 milyar, sedangkan jumlah maksimum pembiayaan dan deposito di bank syariah adalah Rp 12.748,84 milyar di kota Bandung tahun 2014, dan jumlah minimum pembiayaan dan deposito bank syariah adalah Rp 9.408,00 milyar di kabupaten Pesisir Selatan tahun 2013. Deviasi standar pembiayaan dan deposito bank syariah adalah 2.094,504.

Rerata jumlah rekening di bank konvensional adalah 127.975 rekening, sedangkan jumlah maksimum rekening di bank konvensional sebanyak 1.295.029 rekening di kota Surabaya tahun 2015, jumlah minimum rekening di bank konvensional 10.102 rekening di kota Pariaman tahun 2013. Deviasi standar jumlah rekening di bank konvensional adalah 206.296,8. Rerata jumlah kantor cabang bank konvensional, kantor cabang pembantu, dan kantor kas di bank konvensional adalah 144, sedangkan jumlah maksimum kantor cabang bank konvensional, kantor cabang pembantu bank konvensional, dan kantor kas bank konvensional 1.048 di kota Surabaya tahun 2015, sedangkan jumlah minimum kantor cabang bank konvensional, kantor cabang pembantu bank konvensional, kantor kas bank konvensional di kota Pariaman tahun 2017 sebanyak 8. Deviasi standar kantor cabang bank konvensional, kantor cabang pembantu, dan kantor kas bank konvensional adalah 194,9135. Rerata kredit dan deposito di bank konvensional adalah Rp 20.899,75 milyar. Adapun jumlah maksimum kredit dan deposito di bank konvensional adalah Rp 321.408 milyar, jumlah minimum kredit

dan deposito di bank konvensional adalah Rp 505,7811 milyar. Deviasi standar kredit dan deposito di bank konvensional adalah Rp 46.689,58 milyar.

Rerata Produk Domestik Bruto (PDRB) adalah Rp 12,51652 milyar. PDRB maksimum adalah Rp 302,2938 milyar, dan PDRB minimum adalah Rp 67,60731 milyar. Deviasi standar PDRB adalah Rp 35,66272 milyar. Rerata infrastruktur panjang jalan 2,106152 km, infrastruktur panjang jalan maksimum 10,75962 km, minimum adalah 0,047288 km. Rerata Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah Rp 60,30303 milyar, APBD maksimum adalah Rp 784, 3787 milyar, APBD minimum adalah 0,594595 milyar, dan deviasi standar Rp 113,1820 milyar. Rerata jumlah UMKM 8.157, jumlah UMKM maksimum 42.006, jumlah minimum UMKM 120, standar deviasi 8981,717. Rerata jumlah tenaga kerja pada UMKM adalah 23.019, jumlah tenaga kerja pada UMKM maksimum adalah 106.956, jumlah tenaga kerja pada UMKM minimum adalah 400, standar deviasi 21.337,78.

4.2. Analisis Regresi: dengan variabel dependen jumlah UMKM dan variabel independen 6 variabel.

Pada analisis regresi ini, variabel dependen adalah jumlah UMKM sebagai indikator kinerja UMKM. Adapun variabel independen terdiri dari enam variabel, tiga variabel merupakan dimensi inklusi keuangan bank syariah (*banking penetration, availability of banking service, usage*) dan tiga variabel kontrol yang terdiri dari PDRB, infrastruktur dan APBD. Untuk memilih model yang terbaik dilakukan uji Chow lebih dulu. Pada uji Chow dinyatakan bahwa H_0 : *common effect* dan H_a : *fixed effect*. Berdasarkan hasil uji Chow sebagaimana ada pada lampiran 3, diperoleh probability = 0,0000, lebih kecil dari α (0,05) berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian model *fixed effect* lebih baik daripada *common effect*.

Selanjutnya dilakukan uji Hausman untuk memilih apakah model *fixed effect* atau *random effect*. Pada uji Hausman dinyatakan bahwa H_0 adalah *random effect* dan H_a adalah *fixed effect*. Hasil uji Hausman seperti tertera dalam lampiran 4, diperoleh probabilitas = 0,5338, artinya lebih besar daripada α (0,05), sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. Dengan demikian model *random effect* lebih baik daripada *fixed effect*.

Proses berikutnya adalah uji Breusch Pagan untuk melihat apakah terdapat efek *cross section, period*, atau keduanya di dalam model. Terdapat 3 hipotesis yang digunakan, yaitu:

- 1) H_0 : tidak terdapat efek *cross section* dan *period*
 H_a : terdapat efek *cross section* dan *period*
- 2) H_0 : tidak terdapat efek *cross section*
 H_a : terdapat efek *cross section*
- 3) H_0 : tidak terdapat efek *period*
 H_a : terdapat efek *period*

Hasil uji Breusch Pagan dalam output “Both” sebagaimana yang bisa dilihat di dalam lampiran 5, nilai probabilitas atau p value sebesar 0,0000, berarti lebih kecil daripada 0,05 (α) sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga terdapat efek *cross section* dan *period*. Untuk melihat apakah terdapat efek *cross section* di dalam model dapat dilihat pada output “*cross section*” sebagaimana yang bisa dilihat di dalam lampiran 5, nilai probabilitas adalah 0,0000 berarti lebih kecil daripada 0,05 sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga terdapat efek *cross section* di dalam model. Untuk melihat apakah terdapat efek *period* dalam model dapat dilihat dari output “*period*” sebagaimana dalam lampiran 5, nilai probabilitas sebesar 0,3040 lebih besar daripada 0,05 sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. Berarti tidak terdapat efek *period* di dalam model. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan adalah *random effect* dengan terdapat *cross section*.

Berdasarkan hasil olah data pada uji *random effect*, semua variabel independen tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen (jumlah UMKM).

Hasil analisis model random effect

Hasil analisis regresi dengan *random effect* sebagai model terpilih dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 4. 2. Hasil Analisis Regresi Random Effect dengan variabel dependen jumlah UMKM dan variabel independen 6 variabel.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8.223.493	9.331.309	8.812.796	0,0000
BPS	-8.108.894	1.773.783	-0.457152	0.6481
BSS	4.831.141	2.810.925	1.718.702	0.0873
USS	7.242.301	1.647.710	0.439537	0.6608
PDRB	-7.750.349	6.355.809	-1.219.412	0.2242
IS	-1.114.504	2.771.818	-0.402084	0.6881
APBD	-9.056.157	6.040.884	-1.499.144	0.1355
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			8.585.820	0.923
Period fixed (dummy variables)				
Idiosyncratic random			2.479.212	0.077
Weighted Statistics				
R-squared	0.164563	Mean dependent var	8.157.910	
Adjusted R-squared	0.12036	S.D. dependent var	2.640.979	
S.E. of regression	2.476.951	Sum squared resid	1.16E+09	
F-statistic	3.722.889	Durbin-Watson stat	1.297.276	
Prob(F-statistic)	0.000141			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.052558	Mean dependent var	8.157.910	
Sum squared resid	1.52E+10	Durbin-Watson stat	0.098902	

Jumlah UMKM = 8223,493-810,8894 (banking penetration bank syariah)+ 4831,141 (availability of banking service bank syariah) + 724,2301 (usage di bank syariah)- 7,750349 (Produk Domestik Regional Bruto) -111,4504 (Infrastruktur) – 9,056157 (Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah)+Ci+ei

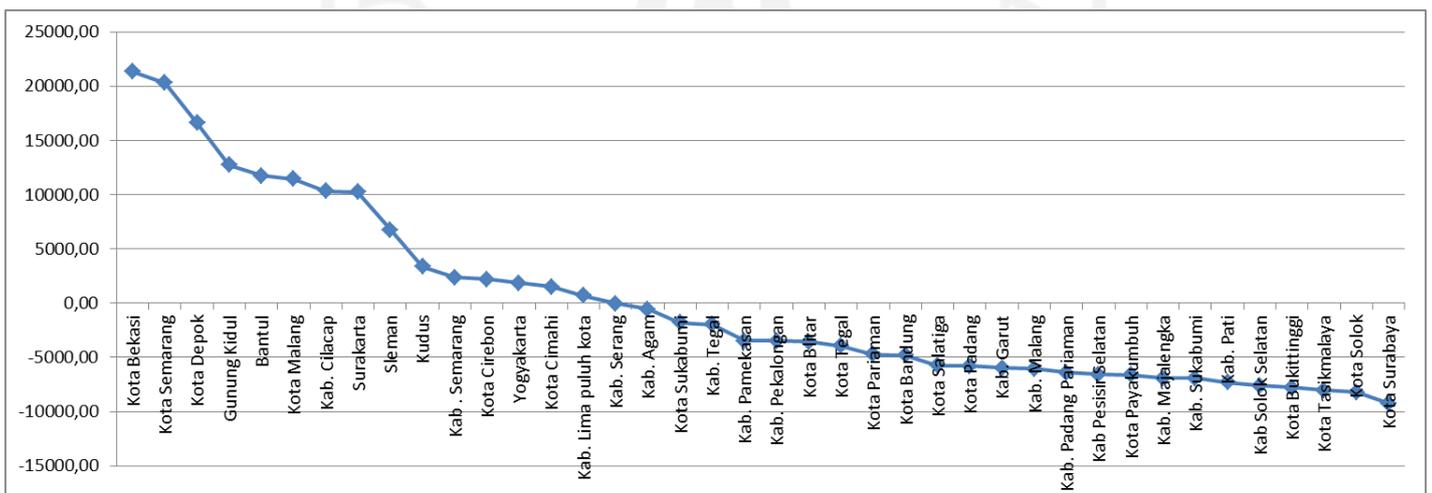
Adapun nilai koefisien *cross effect* untuk setiap kota/kabupaten adalah sebagai berikut

Tabel 4. 3. Nilai Koefisien *Cross Effect* dengan variabel dependen jumlah UMKM dan variabel independen 6 variabel.

KABUPATEN_KOTA	Ci	KABUPATEN_KOTA	Ci
Kota Bekasi	21335,34	Kab. Pekalongan	-3475,72
Kota Semarang	20301,37	Kota Blitar	-3578,85
Kota Depok	16614,93	Kota Tegal	-3929,56
Gunung Kidul	12732,78	Kota Pariaman	-4727,94
Bantul	11749,01	Kota Bandung	-4807,03
Kota Malang	11457,09	Kota Salatiga	-5751,38
Kab. Cilacap	10337,67	Kota Padang	-5808,06
Surakarta	10219,32	Kab. Garut	-5980,78
Sleman	6778,89	Kab. Malang	-6046,13
Kudus	3341,56	Kab. Padang Pariaman	-6381,54
Kab . Semarang	2354,52	Kab Pesisir Selatan	-6561,11
Kota Cirebon	2195,38	Kota Payakumbuh	-6602,77
Yogyakarta	1849,57	Kab. Majalengka	-6905,77
Kota Cimahi	1523,59	Kab. Sukabumi	-6935,31
Kab. Lima puluh kota	703,22	Kab. Pati	-7321,15
Kab. Serang	-43,43	Kab Solok Selatan	-7596,84
Kab. Agam	-532,01	Kota Bukittinggi	-7781,38
Kota Sukabumi	-1790,39	Kota Tasikmalaya	-8046,9
Kab. Tegal	-1966,23	Kota Solok	-8207,25
Kab. Pamekasan	-3473,62	Kota Surabaya	-9243,12

Jika tabel di atas digambarkan di dalam bentuk grafik, maka bentuknya adalah sebagai berikut:

Grafik 4 1. Koefisien *Cross Effect* pada berbagai kabupaten/kota



Adapun sebaran jumlah UMKM kota/ kabupaten dapat dilihat pada peta berikut :

Peta 4 1. Sebaran Jumlah UMKM di Sumatera Barat dan Jawa



Keterangan :

Bintang: Nilai Koefisien Cross Section Tinggi

Kotak: Nilai Koefisien Cross Section Menengah

Bulat: Nilai Koefisien Cross Section Rendah

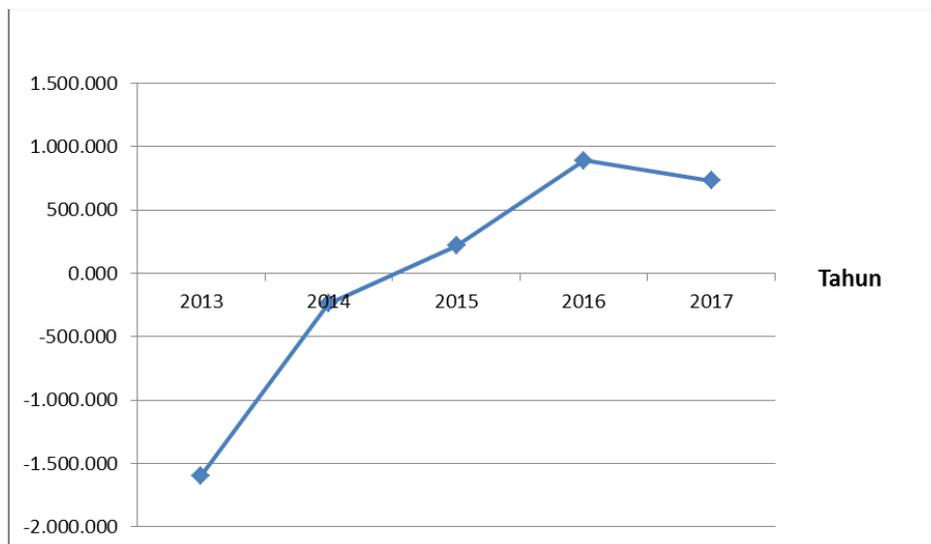
Adapun nilai koefisien *period effect* seperti terlihat pada tabel 4.4. berikut ini

Tabel 4. 4. Nilai Koefisien *Period Effect* dengan variabel dependen jumlah UMKM dan variabel independen 6 variabel.

TAHUN	JML_UKM
2013	-1551,286
2014	-257,5219
2015	158,0963
2016	917,2410
2017	733,4701

Jika nilai tersebut digambarkan di dalam bentuk grafik, maka grafiknya seperti berikut :

Grafik 4 2. Nilai Koefisien *Period Effect* dengan variabel dependen jumlah UMKM dan variabel independen 6 variabel.



Berdasarkan tabel 4.3. dan grafik 4.1, dapat diketahui bahwa ada 15 kabupaten/kota mempunyai nilai C_i yang positif, tiga kota yang mempunyai nilai *cross section effect* paling tinggi adalah kota Bekasi, kota Semarang, dan kota Depok. Terdapat 25 kabupaten/kota yang lain mempunyai nilai C_i yang negatif, yang terkecil adalah kota Tasikmalaya, Solok, dan Surabaya. Sebagian besar kabupaten/ kota yang mempunyai nilai C_i positif ada di pulau Jawa, dan hanya ada satu kabupaten di luar pulau Jawa yang mempunyai nilai C_i yang positif. Berdasarkan tabel 4.4. dan grafik 4.2, dapat diketahui bahwa secara umum terjadi peningkatan nilai koefisien *period effect* dari tahun 2013 sampai tahun 2016, meskipun pada tahun 2017 terjadi penurunan dibanding tahun 2016.

Besarnya $F_{stat} = 3,722889$ dengan prob = 0,000141, *adjusted R squared* = 0,120360. Uji parameter individual hasilnya untuk $t_{BPS} = -0,457152$ dengan prob = 0,6481, $t_{BSS} = 1,718702$ dengan prob = 0,0873, $t_{USS} = 0,439537$ dengan prob = 0,6608, $t_{PDRB} = -1,219412$ dengan prob = 0,2242, $t_{IS} = -0,402084$ dengan prob = 0,6881, $t_{APBD} = -1,499144$ dengan prob = 0,1355.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Hasil uji t dari masing-masing variabel independen diperoleh hasil sebagai berikut:

Variabel BPS (*Banking penetration* di Bank Syariah) memiliki tingkat probabilitas: 0,6481 yang berarti lebih besar daripada α (0,05). *Banking penetration* di bank syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah UMKM. Variabel BSS (*Availability of banking*

service bank syariah) memiliki tingkat probabilitas 0,0873, yang berarti lebih besar daripada α (0,05). *Availability of banking service bank syariah* tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah UMKM. Variabel USS (*Usage di bank syariah*) memiliki tingkat probabilitas 0,6608, yang berarti lebih besar daripada α (0,05). *Usage di bank syariah* tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah UMKM. Variabel PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) memiliki tingkat probabilitas 0,2242, berarti lebih besar daripada α (0,05). Jumlah Produk Domestik Regional Bruto tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah UMKM. Variabel IS (Infrastruktur) memiliki tingkat probabilitas 0,6881, berarti lebih besar daripada α (0,05). Infrastruktur tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah UMKM. Variabel APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) memiliki tingkat probabilitas 0,1355, berarti lebih besar daripada α (0,05), sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah UMKM.

Pengujian kebaikan model dengan uji F

Hasil uji F dari model fixed effect diperoleh $F_{\text{statistic}} = 3,722889$ dengan Prob ($F_{\text{statistic}}$) sebesar 0,000141 yang berarti lebih kecil daripada α (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa model regresi *random effect* adalah baik, 6 variabel independen yaitu: *banking penetration* di bank syariah, *availability of banking service bank syariah*, *usage di bank syariah*, Produk Domestik Regional Bruto, infrastruktur, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, secara bersama-sama berpengaruh terhadap jumlah UMKM.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Hasil uji Koefisien Determinasi (R²) sebesar 0,120360, berarti variabel independen: *banking penetration* di bank syariah, *availability of banking service bank syariah*, *usage di bank syariah*, Produk Domestik Regional Bruto, infrastruktur, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memiliki tingkat pengaruh terhadap jumlah UMKM sebesar 12,03%, sisanya sebesar 87,97% pengaruh dari faktor residu yang merupakan variabel tidak diteliti.

4.3. Analisis Regresi: dengan variabel dependen jumlah tenaga kerja pada UMKM dan 6 variabel independen.

Pada analisis regresi ini, variabel dependen adalah jumlah tenaga kerja pada UMKM sebagai indikator kinerja UMKM. Adapun variabel independen terdiri dari enam variabel, tiga variabel merupakan dimensi inklusi keuangan bank syariah (*banking penetration*,

availability of banking service, usage) dan tiga variabel kontrol yang terdiri dari PDRB, infrastruktur dan APBD.

Untuk memilih model yang terbaik dilakukan uji Chow lebih dulu. Pada uji Chow dinyatakan bahwa H_0 : *common effect* dan H_a : *fixed effect*. Berdasarkan hasil uji Chow sebagaimana ada pada lampiran 7, diperoleh probability = 0,0000, lebih kecil dari α (0,05) berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian model *fixed effect* lebih baik daripada *common effect*. Selanjutnya dilakukan uji Hausman untuk memilih apakah model *fixed effect* atau *random effect*. Pada uji Hausman dinyatakan bahwa H_0 adalah *random effect* dan H_a adalah *fixed effect*. Hasil uji Hausman seperti tertera dalam lampiran 8, diperoleh probabilitas = 0,0241, artinya lebih kecil daripada α (0,05), sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian model *fixed effect* lebih baik daripada *random effect*.

Proses berikutnya adalah uji Breusch Pagan untuk melihat apakah terdapat efek *cross section*, *period* atau keduanya di dalam model. Terdapat 3 hipotesis yang digunakan, yaitu:

H_0 : tidak terdapat efek *cross section* dan *period*

H_a : terdapat efek *cross section* dan *period*

H_0 : tidak terdapat efek *cross section*

H_a : terdapat efek *cross section*

H_0 : tidak terdapat efek *period*

H_a : terdapat efek *period*

Hasil uji Breusch Pagan dalam output “Both” sebagaimana yang bisa dilihat di dalam lampiran 9, nilai probabilitas atau p value sebesar 0,0000, berarti lebih kecil daripada 0,05 (α) sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga terdapat efek *cross section* dan *period*.

Untuk melihat apakah terdapat efek *cross section* di dalam model dapat dilihat pada output “*cross section*” sebagaimana yang bisa dilihat di dalam lampiran 9, nilai probabilitas adalah 0,0000 berarti lebih kecil daripada 0,05 sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga terdapat efek *cross section* di dalam model. Untuk melihat apakah terdapat efek *period* dalam model dapat dilihat dari output “*period*” sebagaimana dalam lampiran 9, nilai probabilitas sebesar 0,1767 lebih besar daripada 0,05 sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. Berarti tidak terdapat efek *period* di dalam model. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan adalah *fixed effect* dengan terdapat efek *cross section*

Berdasarkan hasil olah data pada uji *fixed effect*, terdapat beberapa variabel independen yang signifikan dan sebagian yang lain tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen (jumlah UMKM). Jika probabilitas variabel independen tersebut lebih kecil daripada 0,05 (α), variabel tersebut signifikan. Berdasarkan hal tersebut di atas, variabel independen yang signifikan mempengaruhi variabel dependen karena nilainya kurang dari 0,05 adalah: USS (0,0473), APBD (nilai 0,0001). Adapun variabel independen yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen karena nilainya lebih besar daripada 0,05 adalah BPS (0,5491), BSS (0,8151), PDRB (0,6436), dan infrastruktur (0,1849).

Hasil analisis model fixed effect

Hasil analisis regresi dengan *fixed effect* sebagai model terpilih dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 4. 5. Hasil Regresi *Fixed Effect* dengan variabel dependen jumlah tenaga kerja pada UMKM dan 6 variabel independen.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	35760.92	3.778.984	9.463.104	0,0000
BPS	-3.847.731	6.408.492	-0.600411	0.5491
BSS	2.498.693	10665.72	0.234273	0.8151
USS	-11878.11	5.939.262	-1.999.931	0.0473
PDRB	1.033.934	2.230.321	0.463581	0.6436
IS	-1.445.656	1.085.259	-1.332.084	0.1849
APBD	9.746.698	2.364.914	4.121.374	0.0001
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
Period fixed (dummy variables)				
R-squared	0.877274	Mean dependent var	23019.67	
Adjusted R-squared	0.837184	S.D. dependent var	21337.78	
S.E. of regression	8.609.903	Akaike info criterion	2.117.153	
Sum squared resid	1.11E+10	Schwarz criterion	2.199.611	
Log likelihood	-2.067.153	Hannan-Quinn criter.	2.150.523	
F-statistic	2.188.235	Durbin-Watson stat	1.263.321	
Prob(F-statistic)	0			

Hasil analisis tersebut memiliki persamaan regresi sebagai berikut :

Tenaga Kerja = 35760,92 – 3847,731 (banking penetration bank syariah) + 2498,693 (availability of banking service bank syariah) – 11878,11 (usage bank syariah) + 10,33934 (Produk Domestik Regional Bruto) – 1445,656 (infrastruktur) + 97,46698 (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) + Ci + e1.

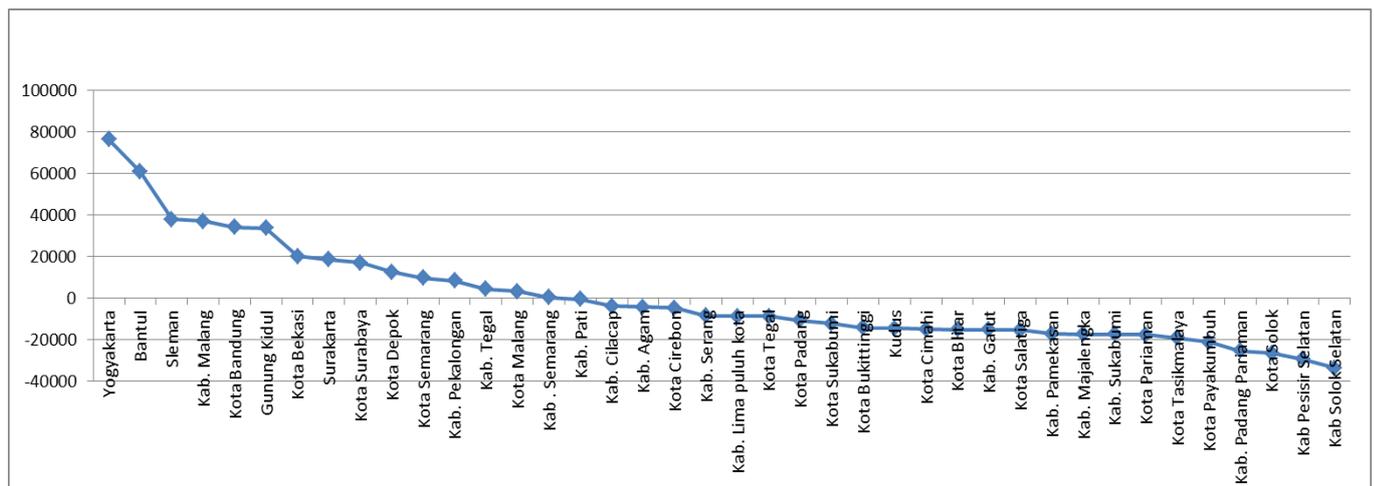
Adapun nilai koefisien *cross effect* (Ci) adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 6. Nilai Koefisien *Cross Effect* dengan variabel dependen jumlah tenaga kerja pada UMKM dan 6 variabel independen.

KABUPATEN_KOTA	Ci	KABUPATEN_KOTA	Ci
Yogyakarta	76481,66	Kab. Lima puluh kota	-8679,68
Bantul	60926,31	Kota Tegal	-8697
Sleman	37899,35	Kota Padang	-10640,7
Kab. Malang	37070,45	Kota Sukabumi	-12286,7
Kota Bandung	34174,66	Kota Bukittinggi	-14286,1
Gunung Kidul	33843,82	Kudus	-14371,4
Kota Bekasi	20294,19	Kota Cimahi	-14865,2
Surakarta	18694,38	Kota Blitar	-15062,8
Kota Surabaya	17145,74	Kab. Garut	-15081,8
Kota Depok	12672,66	Kota Salatiga	-15388,5
Kota Semarang	9692,092	Kab. Pamekasan	-17178,8
Kab. Pekalongan	8521,622	Kab. Majalengka	-17308,5
Kab. Tegal	4453,425	Kab. Sukabumi	-17402,6
Kota Malang	3384,754	Kota Pariaman	-17683,1
Kab . Semarang	422,726	Kota Tasikmalaya	-19139,7
Kab. Pati	-557,184	Kota Payakumbuh	-21188,1
Kab. Cilacap	-3804,94	Kab. Padang Pariaman	-25258,9
Kab. Agam	-4142,93	Kota Solok	-26522,3
Kota Cirebon	-4690,28	Kab Pesisir Selatan	-29338
Kab. Serang	-8469,78	Kab Solok Selatan	-33632,9

Jika data tersebut disajikan dalam bentuk grafik , bentuknya sebagai berikut

Grafik 4 3. Nilai Koefisien *Cross Effect* dengan variabel dependen jumlah tenaga kerja pada UMKM dan 6 variabel independen.



Adapun sebaran jumlah tenaga kerja pada UMKM kota kabupaten dapat dilihat pada peta berikut :

Peta 4 2. Sebaran Jumlah Tenaga Kerja UMKM di Sumatera Barat dan Jawa



Bintang : Nilai Koefisien Cross Section Tinggi

Kotak : Nilai Koefisien Cross Section Menengah

Bulat : Nilai Koefisien Cross Section Rendah

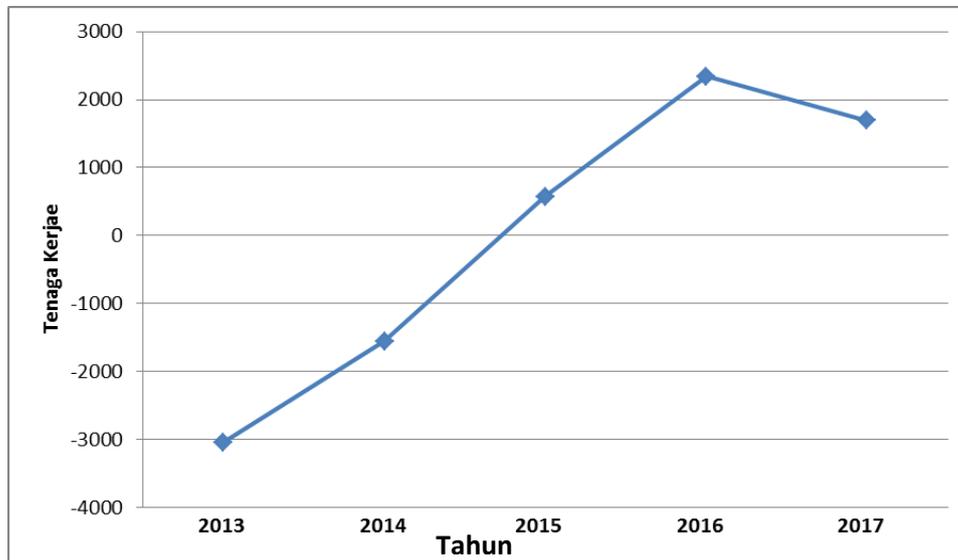
Adapun nilai koefisien *period effect* dapat dilihat pada tabel 4.7. berikut ini.

Tabel 4. 7. Nilai Koefisien *Period Effect* dengan variabel dependen jumlah tenaga kerja pada UMKM dan 6 variabel independen.

TAHUN	Nilai Koefisien
2013	-3040,549
2014	-1559,086
2015	573,0692
2016	2338,899
2017	1687,668

Jika data tersebut disajikan dalam bentuk grafik, maka hasilnya adalah seperti pada grafik 4.3 berikut ini

Grafik 4 4. Nilai Koefisien *Period Effect* dengan variabel dependen jumlah tenaga kerja pada UMKM dan 6 variabel independen.



Berdasarkan tabel 4.6. dan grafik 4.2, dapat diketahui bahwa ada 15 kabupaten/ kota mempunyai nilai Ci positif, dengan 3 kabupaten/kota yang tertinggi adalah kota Yogyakarta, kabupaten Bantul, dan kabupaten Sleman. Terdapat 25 kabupaten/ kota yang lain mempunyai nilai Ci negatif, yang terkecil adalah kabupaten Solok Selatan. Kabupaten/ kota yang mempunyai nilai Ci positif semuanya ada di pulau Jawa. Semua kabupaten/kota di luar pulau Jawa mempunyai nilai Ci negatif. Berdasarkan tabel 4.7. dan grafik 4.3. diketahui bahwa dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 nilai koefisien *period effect* mengalami kenaikan, sedang pada tahun 2017 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.

Besarnya $F_{stat} = 21,88235$ dengan prob = 0,0000, *ajusted R squared* = 0,837184. Uji parameter individual hasilnya untuk $t_{BPS} = -0,600411$ dengan prob = 0,5491, $t_{BSS} = 0,234273$ dengan prob = 0,8151, $t_{USS} = -1,999931$ dengan prob = 0,0473, $t_{PDRB} = 0,463581$ dengan prob = 0,6436, $t_{IS} = -1,33284$ dengan prob = 0,1849, $t_{APBD} = 4,121374$ dengan prob = 0,0001.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Hasil uji t dari masing-masing variabel independen diperoleh hasil sebagai berikut:

Variabel BPS (*Banking penetration* di Bank Syariah) memiliki tingkat probabilitas: 0,5491 yang berarti lebih besar daripada α (0,05). *Banking penetration* di bank syariah tidak

berpengaruh signifikan terhadap jumlah tenaga kerja UMKM. Variabel BSS (*Availability of banking service* bank syariah) memiliki tingkat probabilitas 0,8151, yang berarti lebih besar daripada α (0,05). *Availability of banking service* bank syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah UMKM. Variabel USS (*Usage* di bank syariah) memiliki tingkat probabilitas 0,0473, yang berarti lebih kecil daripada α (0,05). *Usage* di bank syariah berpengaruh signifikan terhadap jumlah UMKM. Pengaruhnya negatif signifikan dengan koefisien -11878,11. Berarti jika *usage* di bank syariah naik 1 (satu) satuan, maka jumlah tenaga kerja UMKM turun sebesar 11878,11. Variabel PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) memiliki tingkat probabilitas 0,6436, berarti lebih besar daripada α (0,05). Jumlah Produk Domestik Regional Bruto tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah UMKM. Variabel IS (Infrastruktur) memiliki tingkat probabilitas 0,1849, berarti lebih besar daripada α (0,05). Infrastruktur tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah tenaga kerja UMKM. Variabel APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) memiliki tingkat probabilitas 0,0001, berarti lebih kecil daripada α (0,05), sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap jumlah UMKM. Pengaruhnya positif signifikan dengan koefisien 97,44698, berarti jika APBD naik 1 (satu) satuan, maka jumlah tenaga kerja UMKM naik 97,44698.

Pengujian kebaikan model dengan uji F

Hasil uji F dari model fixed effect diperoleh $F_{\text{statistic}} = 21,88235$ dengan Prob ($F_{\text{statistic}}$) sebesar 0,0000 yang berarti lebih kecil daripada α (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa model regresi *fixed effect* adalah baik, 6 variabel independen yaitu: *banking penetration* di bank syariah, *availability of banking service* bank syariah, *usage* di bank syariah, Produk Domestik Regional Bruto, infrastruktur, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, secara bersama-sama berpengaruh terhadap jumlah UMKM.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil uji Koefisien Determinasi (R^2) sebesar 0,837184, berarti variabel independen: *banking penetration* di bank syariah, *availability of banking service* bank syariah, *usage* di bank syariah, Produk Domestik Regional Bruto, infrastruktur, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memiliki tingkat pengaruh terhadap jumlah UMKM sebesar 83,71%, sisanya sebesar 16,29 % pengaruh dari faktor residu yang merupakan variabel tidak diteliti.

4.4. Analisis regresi dengan jumlah UMKM sebagai variabel dependen dan 9 variabel independen.

Tahap selanjutnya adalah analisis regresi dengan jumlah UMKM sebagai variabel dependen dan 9 variabel independen meliputi: *banking penetration* di bank syariah (BPS), *availability of banking service* bank syariah (BSS), *usage* di bank syariah (USS), *banking penetration* di bank konvensional (BPK), *availability of banking service* bank konvensional (BSK), *usage* di bank konvensional (USK), Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD), infrastruktur (IS), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Seperti pada tahap sebelumnya untuk mendapatkan dan memilih model terbaik, dilakukan pengujian beberapa tahap. Tahap pertama adalah uji Chow untuk menguji dan memilih antara *common effect* atau *fixed effect*. Jika ternyata *fixed effect* yang lebih baik, dilanjutkan pengujian tahap kedua, yaitu uji Hausman untuk memilih apakah *fixed effect* atau *random effect*. Pada uji Chow, dinyatakan bahwa H_0 : adalah *common effect* dan H_a : adalah *fixed effect*. Hasil uji Chow sebagaimana dalam lampiran 10 diperoleh Prob = 0,0000, lebih kecil dari α (0,05), berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian model *fixed effect* lebih baik daripada *common effect*. Uji diteruskan untuk memilih apakah model regresi *fixed effect* atau model regresi *random effect* dengan menggunakan uji Hausman. Pada uji Hausman dinyatakan bahwa H_0 adalah *random effect* dan H_a adalah *fixed effect*. Hasil uji Hausman sebagaimana ada dalam lampiran 11, diperoleh probabilitas = 0,0421 yang artinya probabilitas lebih kecil daripada α (0,05), sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian model regresi *fixed effect* lebih baik daripada *random effect*.

Proses berikutnya adalah uji Breusch Pagan untuk melihat apakah terdapat efek *cross section*, *period*, atau keduanya di dalam model. Pada uji Breusch Pagan terdapat 3 hipotesis yang digunakan, yaitu:

- 1) H_0 : tidak terdapat efek cross section dan period
 H_a : terdapat efek cross section dan period
- 2) H_0 : tidak terdapat efek cross section
 H_a : terdapat efek cross section
- 3) H_0 : tidak terdapat efek period
 H_a : terdapat efek period

Hasil uji Breusch Pagan dalam output “Both” sebagaimana yang bisa dilihat di dalam lampiran 12, nilai probabilitas atau p value sebesar 0,0000, berarti lebih kecil daripada 0,05

(α) sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga terdapat efek kali silang dan waktu. Untuk melihat apakah terdapat efek kali silang di dalam model dapat dilihat pada output “*cross section*” sebagaimana yang bisa dilihat di dalam lampiran 12, nilai probabilitas adalah 0,0000 berarti lebih kecil daripada 0,05 sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga terdapat efek *cross section* di dalam model. Untuk melihat apakah terdapat efek period dalam model dapat dilihat dari output “*period*” sebagaimana dalam lampiran 12, nilai probabilitas sebesar 0,1809 lebih besar daripada 0,05 sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. Berarti tidak terdapat efek period di dalam model. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan adalah *fixed effect* dengan terdapat efek *cross section*.

Berdasarkan hasil olah data pada uji *fixed effect*, terdapat beberapa variabel independen yang signifikan dan sebagian yang lain tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen (jumlah UMKM). Jika probabilitas variabel independen tersebut lebih kecil daripada 0,05 (α), variabel tersebut signifikan. Berdasarkan hal tersebut di atas, variabel independen yang signifikan mempengaruhi variabel dependen karena nilainya kurang dari 0,05 adalah: BSS (nilai 0,0005), USS (0,0341), BSK (nilai 0,0375), PDRB (0,0480), APBD (0,0385). Variabel yang lain tidak signifikan karena nilainya lebih besar dari pada 0,05. BPS (nilai 0,2929), BPK (0,4662), USK (0,2591), IS (nilai 0,2607).

Hasil analisis model fixed effect

Hasil analisis regresi dengan *fixed effect* sebagai model yang terpilih dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 8. Hasil Analisis Regresi dengan jumlah UMKM sebagai variabel dependen dan 9 variabel independen.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	10637.82	1.219.053	8.726.295	0,0000
BPS	-1.881.811	1.782.785	-1.055.546	0.2929
BSS	26633.04	7.466.946	3.566.792	0.0005
USS	-4176,110	1.909.073	-2,187506	0.0341
BPK	-11989.13	16413.36	-0.730449	0.4662
BSK	32452.22	15460.07	2.099.100	0.0375
USK	2.110.376	1.863.034	1.132.763	0.2591
PDRB	-12785,04	6.377.482	-2,004602	0.048
IS	-3.631.342	3.216.438	-1.128.995	0.2607
APBD	13,91561	6.936.714	2.006.081	0.0385
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.940347	Mean dependent var	8.157.910	
Adjusted R-squared	0.921384	S.D. dependent var	8.981.717	
S.E. of regression	2.518.335	Akaike info criterion	1.870.955	
Sum squared resid	9.58E+08	Schwarz criterion	1.951.763	
Log likelihood	-1.821.955	Hannan-Quinn criter.	1.903.657	
F-statistic	4.958.971	Durbin-Watson stat	1.794.742	
Prob(F-statistic)	0			

Hasil analisis tersebut memiliki persamaan regresi:

$$\begin{aligned} \text{Jml_UKM} = & 10637,82 - 1881,811 (\text{Banking Penetration Bank Syariah}) + 26633,04 \\ & (\text{Availability of banking service Bank syariah}) - 4176,1100 (\text{Usage bank Syariah}) - 11989,13 (\text{Banking Penetration bank Konvensional}) + 32452,22 \\ & (\text{Availability of banking Service bank konvensional}) + 2110,376 (\text{Usage Bank konvensional}) - 12785,04 (\text{Produk Domestik Regional Bruto}) - \\ & 363,1342 (\text{Infrastruktur}) + 7,672567 (\text{APBD}) + C_i + e_i \end{aligned}$$

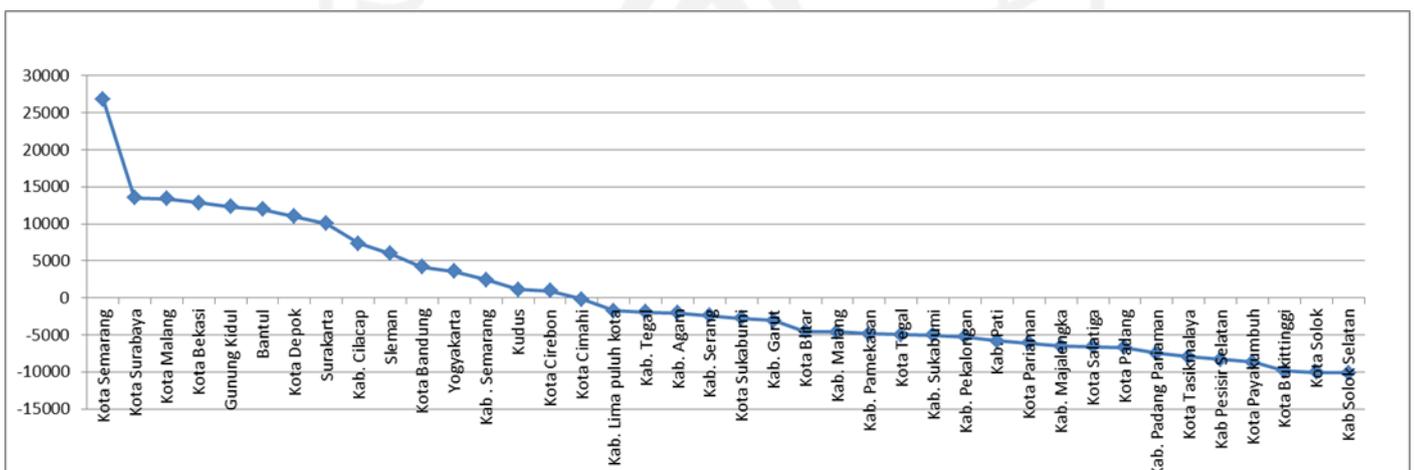
Dimana nilai koefisien cross section (C_i) untuk setiap wilayah adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 9. Nilai Koefisien *Cross Effect* dengan jumlah UMKM sebagai variabel dependen dan 9 variabel independen.

KABUPATEN_KOTA	Ci	KABUPATEN_KOTA	Ci
Kota Semarang	26775,98	Kota Sukabumi	-2768,39
Kota Surabaya	13516,32	Kab. Garut	-3081
Kota Malang	13409,78	Kota Blitar	-4549,53
Kota Bekasi	12873,42	Kab. Malang	-4605,54
Gunung Kidul	12289,43	Kab. Pamekasan	-4821,74
Bantul	11946,21	Kota Tegal	-4984,89
Kota Depok	10978,79	Kab. Sukabumi	-5020,73
Surakarta	10046,63	Kab. Pekalongan	-5273,75
Kab. Cilacap	7370,103	Kab. Pati	-5779,1
Sleman	6003,996	Kota Pariaman	-6088,02
Kota Bandung	4187,06	Kab. Majalengka	-6546,93
Yogyakarta	3593,52	Kota Salatiga	-6566,83
Kab . Semarang	2463,611	Kota Padang	-6710,36
Kudus	1136,8	Kab. Padang Pariaman	-7502,07
Kota Cirebon	944,7806	Kota Tasikmalaya	-7963,08
Kota Cimahi	-154,194	Kab Pesisir Selatan	-8320,19
Kab. Lima puluh kota	-1720,4	Kota Payakumbuh	-8685,49
Kab. Tegal	-1936,18	Kota Bukittinggi	-9865,04
Kab. Agam	-2063,98	Kota Solok	-10027,3
Kab. Serang	-2371,19	Kab Solok Selatan	-10130,5

Jika data tersebut disajikan dalam bentuk grafik, bentuknya sebagai berikut

Grafik 4 5. Nilai Koefisien *Cross Effect* dengan jumlah UMKM sebagai variabel dependen dan 9 variabel independen.



Adapun sebaran jumlah UMKM kota kabupaten dapat dilihat pada peta berikut :

Peta 4 3. Sebaran Jumlah UMKM di Sumatera Barat dan Jawa



Keterangan :

Bintang : Nilai Koefisien Cross Section Tinggi

Kotak : Nilai Koefisien Cross Section Menengah

Bulat : Nilai Koefisien Cross Section Rendah

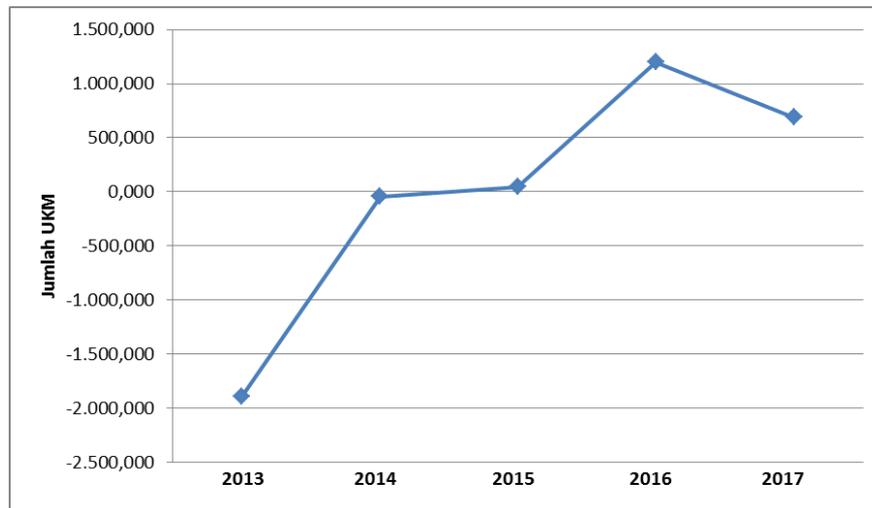
Adapun nilai koefisien *period effect* dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut ini :

Tabel 4. 10. Nilai Koefisien *Period Effect* dengan jumlah UMKM sebagai variabel dependen dan 9 variabel independen.

TAHUN	Nilai Koefisien
2013	-1.889,771
2014	-43,190
2015	47,242
2016	1.197,650
2017	688,069

Jika data tersebut disajikan dalam bentuk grafik, maka grafiknya adalah sebagai berikut :

Grafik 4.6. Nilai Koefisien *Period Effect* dengan jumlah UMKM sebagai variabel dependen dan 9 variabel independen.



Berdasarkan data pada tabel 4.9 dan grafik 4.4, dapat diketahui bahwa terdapat 15 kabupaten/kota dengan nilai C_i positif, tiga kota tertinggi adalah kota Semarang, kota Surabaya, dan kota Malang. Terdapat 25 kabupaten/ kota yang lain nilai C_i nya negatif, terkecil adalah kabupaten Solok Selatan. Kabupaten/ kota yang nilai C_i nya positif semuanya ada di pulau Jawa. Berdasarkan pada tabel 4.10 dan grafik 4.5, diketahui bahwa nilai koefisien *period effect* dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 mengalami kenaikan, sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Besarnya $F_{stat} = 49,58971$ dengan prob = 0,0000, *adjusted R squared* = 0,921384. Uji parameter individual hasilnya untuk $t_{BPS} = -1,055546$ dengan prob = 0,2929, $t_{BSS} = 3,566792$ dengan prob = 0,0005, $t_{USS} = -2,187506$ dengan prob = 0,0341, $t_{BPK} = -0,730449$ dengan prob = 0,4662, $t_{BSK} = 2,099100$ dengan prob = 0,0375, $t_{USK} = 1,132763$ dengan prob = 0,2591, $t_{PDRB} = -2,0044$ dengan prob = 0,048, $t_{IS} = -1,128995$ dengan prob = 0,2607, $t_{APBD} = 2,006081$ dengan prob = 0,0385.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Hasil uji t dari masing-masing variabel independen diperoleh hasil sebagai berikut:

Variabel BPS (*Banking penetration* di Bank Syariah) memiliki tingkat probabilitas: 0,2929 yang berarti lebih besar daripada α (0,05). *Banking penetration* di bank syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah UMKM. Variabel BSS (*Availability of banking service* bank syariah) memiliki tingkat probabilitas 0,0005, yang berarti lebih kecil daripada α (0,05). *Availability of banking service* bank syariah berpengaruh signifikan terhadap jumlah

UMKM. Pengaruhnya positif signifikan dengan koefisien 26633,04. Berarti jika jumlah cabang bank syariah naik 1 (satu) satuan, maka jumlah UMKM naik sebesar 26633,04. Variabel USS (*Usage* di bank syariah) memiliki tingkat probabilitas 0,0341, yang berarti lebih kecil daripada α (0,05). Jika USS naik sebesar 1 satuan, jumlah UMKM turun sebesar 4176.. Variabel BPK (*Banking penetration* di bank konvensional) memiliki tingkat probabilitas 0,4662, yang berarti lebih besar daripada α (0,05). *Banking penetration* di bank konvensional tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah UMKM. Variabel BSK (*Availability of banking service* bank konvensional) memiliki tingkat probabilitas 0,0375, yang berarti lebih kecil daripada α (0,05). *Availability of banking service* bank konvensional berpengaruh signifikan terhadap jumlah UMKM. Pengaruhnya positif dengan koefisien 32452,22. Berarti jika *availability of banking service* bank konvensional naik 1 (satu) satuan, maka jumlah UMKM naik sebesar 32452,22. Variabel USK (*Usage* bank konvensional) memiliki tingkat probabilitas 0,2591, berarti lebih besar daripada α (0,05). *Usage* bank konvensional tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah UMKM. Variabel PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) memiliki tingkat probabilitas 0,048, berarti lebih kecil daripada α (0,05). Jumlah Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh signifikan terhadap jumlah UMKM. Variabel IS (Infrastruktur) memiliki tingkat probabilitas 0,2607, berarti lebih besar daripada α (0,05). Infrastruktur tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah UMKM. Variabel APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) memiliki tingkat probabilitas 0,0385, berarti lebih kecil daripada α (0,05), sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap jumlah UMKM.

Pengujian kebaikan model dengan uji F

Hasil uji F dari model fixed effect diperoleh $F_{\text{statistic}} = 49,58971$ dengan Prob ($F_{\text{statistic}}$) sebesar 0,0000 yang berarti lebih kecil daripada α (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa model regresi *fixed effect* adalah baik, 9 variabel independen yaitu: *banking penetration* di bank syariah, *availability of banking service* bank syariah, *usage* di bank syariah, *banking penetration* di bank konvensional, *availability of banking service* bank konvensional, *usage* bank konvensional, produk domestik regional bruto, infrastruktur, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, secara bersama-sama berpengaruh terhadap jumlah UMKM.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil uji Koefisien Determinasi (R^2) sebesar 0,923184, berarti variabel independen: *banking penetration* di bank syariah, *availability of banking service* bank syariah, *usage* di bank syariah, *banking penetration* di bank konvensional, *availability of banking service* bank konvensional, *usage* bank konvensional, produk domestik regional bruto, infrastruktur, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah memiliki tingkat pengaruh terhadap jumlah UMKM sebesar 92,31%, sisanya sebesar 7,69 % pengaruh dari faktor residu yang merupakan variabel tidak diteliti.

4.5. Analisis regresi dengan jumlah tenaga kerja pada UMKM sebagai variabel dependen dan 9 variabel independen.

Untuk memilih model regresi yang paling baik dilakukan dengan uji Chow. Pada hasil uji Chow sebagaimana ada di dalam lampiran 13, diperoleh Prob = 0,0000, lebih kecil daripada α (0,05), berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian *fixed effect* lebih baik daripada *common effect*. Selanjutnya diteruskan dengan uji Hausman untuk memilih apakah model regresi *fixed effect* atau *random effect*. Hasil uji sebagaimana dalam lampiran 14 diperoleh probabilitas 0,0664 yang artinya lebih besar dari α (0,05), sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. Dengan demikian model regresi *random effect* lebih baik daripada *fixed effect*.

Proses berikutnya adalah uji Breusch Pagan untuk melihat apakah terdapat efek *cross section*, efek period, atau terdapat keduanya.

Pada uji Breusch Pagan terdapat 3 hipotesis yang digunakan, yaitu:

- 1) H_0 : tidak terdapat efek cross section dan period
 H_a : terdapat efek cross section dan period
- 2) H_0 : tidak terdapat efek cross section
 H_a : terdapat efek cross section
- 3) H_0 : tidak terdapat efek period
 H_a : terdapat efek period

Hasil uji Breusch Pagan dalam output “Both” sebagaimana yang bisa dilihat di dalam lampiran 15, nilai probabilitas atau p value sebesar 0,0000, lebih kecil daripada 0,05 (α) sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, terdapat efek *cross section* dan *period*. Untuk melihat apakah terdapat efek *cross section* di dalam model dapat dilihat pada output “*cross section*” sebagaimana dalam lampiran 15. Nilai probabilitas adalah 0,0000,

berarti lebih kecil daripada 0,05 sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, terdapat efek *cross section* di dalam model. Untuk melihat apakah terdapat efek period di dalam model dapat dilihat dari output “period”, nilai probabilitas sebesar 0,2588, sehingga lebih besar daripada 0,05. Dengan demikian, H_0 diterima dan H_a ditolak, berarti tidak terdapat efek period di dalam model. Kesimpulan yang dapat diambil adalah model yang digunakan adalah *random effect* dengan terdapat efek (*cross section*).

Berdasarkan hasil olah data pada uji *random effect*, terdapat beberapa variabel independen yang signifikan mempengaruhi variabel dependen (jumlah tenaga kerja UMKM), dan sebagian variabel yang lain tidak signifikan. Suatu variabel independen dikatakan signifikan mempengaruhi variabel dependen, jika nilai probabilitasnya lebih kecil daripada α (0,05). Sebaliknya, jika nilai probabilitas variabel independen lebih besar daripada 0,05, maka variabel tersebut tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen. Adapun variabel independen yang signifikan mempengaruhi variabel dependen adalah: BSS(0,0482), USS (0,025), BPK (nilai 0,0001), BSK (nilai 0,0000), APBD (0,0093). Sedangkan variabel yang tidak signifikan adalah BPS (0,1867), USK (0,1673), PDRB (0,6273), IS (0,6845).

Hasil analisis model random effect

Hasil analisis regresi dengan *random effect* sebagai model yang terpilih dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 11. Hasil Regresi *Random Effect* dengan jumlah tenaga kerja pada UMKM sebagai variabel dependen dan 9 variabel independen.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	27456.27	3.150.843	8.713.946	0,0000
BPS	-7.901.455	5.961.722	-1.325.365	0.1867
BSS	-41897,38	19513.48	-2,147100	0.0482
USS	-15093,58	6.191.857	-2,437604	0.025
BPK	-187490.6	48091.13	-3.898.652	0.0001
BSK	212448.4	49583.29	4.284.677	0,0000
USK	-9.985.295	7.203.219	-1.386.227	0.1673
PDRB	1.009.327	2.075.597	0.486283	0.6273
IS	-3.421.568	8.407.763	-0.406953	0.6845
APBD	4.826.686	1.837.309	2.627.041	0.0093
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			19640.94	0.8533
Period fixed (dummy variables)				
Idiosyncratic random			8.142.955	0.1467
Weighted Statistics				
R-squared	0.216421	Mean dependent var	23019.67	
Adjusted R-squared	0.161655	S.D. dependent var	9.043.170	
S.E. of regression	8.280.034	Sum squared resid	1.28E+10	
F-statistic	3.951.722	Durbin-Watson stat	1.154.050	
Prob(F-statistic)	0.000011			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.00772	Mean dependent var	23019.67	
Sum squared resid	8.99E+10	Durbin-Watson stat	0.163688	

Hasil analisis tersebut memiliki persamaan regresi:

$$\begin{aligned} \text{Tenaga Kerja} = & 27456,27 - 7901,455(\text{BPS}) - 41897,39(\text{BSS}) - 15093,58 (\text{USS}) - 187490,6 \\ & (\text{BPK}) + 212248,4(\text{BSK}) - 9985,296(\text{USK}) + 10,09327(\text{PDRB}) - 342,1568 \\ & (\text{IS}) + 48,26686(\text{APBD}) + C_i + e_i \end{aligned}$$

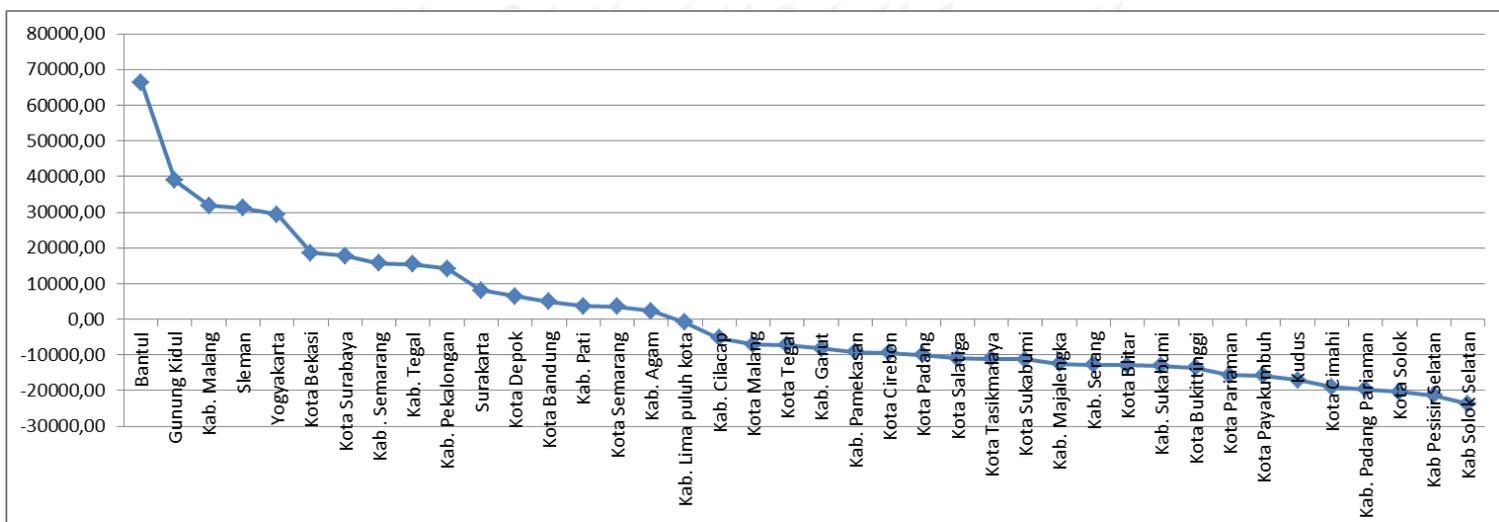
Dimana nilai koefisien cross section (C_i) untuk setiap wilayah adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 12. Nilai Koefisien *Cross Effect* dengan jumlah tenaga kerja pada UMKM sebagai variabel dependen dan 9 variabel independen.

KABUPATEN_KOTA	Ci	KABUPATEN_KOTA	Ci
Bantul	66380,57	Kab. Garut	-8277,88
Gunung Kidul	38897,67	Kab. Pamekasan	-9183,02
Kab. Malang	31809,25	Kota Cirebon	-9409,36
Sleman	31195,88	Kota Padang	-9969,55
Yogyakarta	29382,22	Kota Salatiga	-10983,7
Kota Bekasi	18537,42	Kota Tasikmalaya	-11166,1
Kota Surabaya	17831,83	Kota Sukabumi	-11245,2
Kab . Semarang	15694,52	Kab. Majalengka	-12483,8
Kab. Tegal	15420,33	Kab. Serang	-12734
Kab. Pekalongan	14132,11	Kota Blitar	-12929,6
Surakarta	8129,74	Kab. Sukabumi	-12996,7
Kota Depok	6418,09	Kota Bukittinggi	-13590,8
Kota Bandung	4844,9	Kota Pariaman	-15698,3
Kab. Pati	3672,88	Kota Payakumbuh	-15872
Kota Semarang	3510,39	Kudus	-17046,8
Kab. Agam	2266,95	Kota Cimahi	-19025,2
Kab. Lima puluh kota	-897,11	Kab. Padang Pariaman	-19630,4
Kab. Cilacap	-5259,64	Kota Solok	-20353
Kota Malang	-7160,52	Kab Pesisir Selatan	-21281,2
Kota Tegal	-7285,47	Kab Solok Selatan	-23645,3

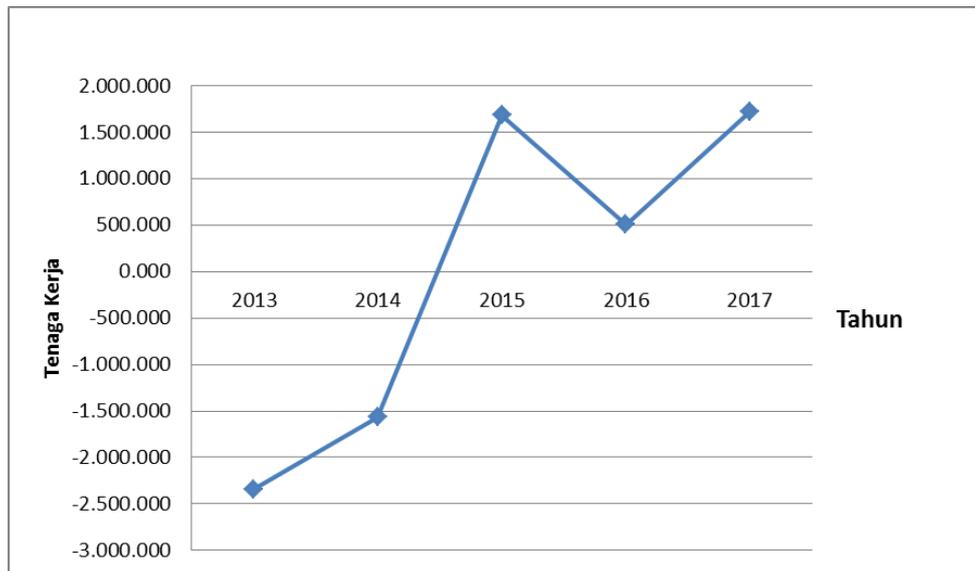
Jika data tersebut disajikan dalam bentuk grafik, bentuknya sebagai berikut

Grafik 4 7. Nilai Koefisien *Cross Effect* dengan jumlah tenaga kerja pada UMKM sebagai variabel dependen dan 9 variabel independen.



Jika data tersebut disajikan dalam bentuk grafik, maka grafiknya adalah :

Grafik 4.8. Nilai Koefisien *Period Effect* dengan jumlah tenaga kerja pada UMKM sebagai variabel dependen dan 9 variabel independen.



Berdasarkan data pada tabel 4.12 dan grafik 4.6, dapat diketahui bahwa ada 16 kabupaten/kota yang mempunyai nilai koefisien yang positif, dan 3 kabupaten/kota yang paling tinggi nilainya adalah kabupaten Bantul, kabupaten Gunung Kidul, kabupaten Malang. Sebagian besar kabupaten/kota yang mempunyai nilai koefisien yang positif ada di pulau Jawa. Terdapat 24 kabupaten/kota mempunyai nilai C_i negatif, kabupaten dengan nilai koefisien terkecil adalah kabupaten Solok Selatan. Berdasarkan pada tabel 4.13 dan grafik 4.8 diketahui bahwa nilai koefisien *period effect* dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 mengalami kenaikan, pada tahun 2016 sempat mengalami penurunan, namun pada tahun 2017 mengalami kenaikan lagi.

Besarnya $F_{stat} = 3,951722$ dengan prob = 0,00011, *ajusted R squared* = 0,161655. Uji parameter individual hasilnya untuk $t_{BPS} = -1,325365$ dengan prob = 0,1867, $t_{BSS} = -2,14710$ dengan prob = 0,0482, $t_{USS} = 2,4376$ dengan prob = 0,0250, $t_{BPK} = -3,898652$ dengan prob = 0,0001, $t_{BSK} = 4,284677$ dengan prob = 0,0000, $t_{USK} = -1,386227$ dengan prob = 0,1673, $t_{PDRB} = 0,486283$ dengan prob = 0,6273, $t_{IS} = -0,406953$ dengan prob = 0,6845, $t_{APBD} = 2,627041$ dengan prob = 0,0093.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Hasil uji t dari masing-masing variabel independen diperoleh hasil sebagai berikut:

Variabel BPS (*Banking penetration* di Bank Syariah) memiliki tingkat probabilitas: 0,1867 yang berarti lebih besar daripada α (0,05). *Banking penetration* di bank syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah tenaga kerja pada UMKM. Variabel BSS (*Availability of banking service* bank syariah) memiliki tingkat probabilitas 0,0481, yang berarti lebih kecil daripada α (0,05). *Availability of banking service* bank syariah berpengaruh signifikan terhadap jumlah tenaga kerja pada UMKM. Variabel USS (*Usage* di bank syariah) memiliki tingkat probabilitas 0,0250, yang berarti lebih kecil daripada α (0,05). *Usage* di bank syariah berpengaruh signifikan terhadap jumlah tenaga kerja pada UMKM. Variabel BPK (*Banking penetration* di bank konvensional) memiliki tingkat probabilitas 0,0001, yang berarti lebih kecil daripada α (0,05), berarti *banking penetration* di bank konvensional berpengaruh signifikan terhadap jumlah tenaga kerja pada UMKM. Pengaruhnya negatif signifikan dengan dengan koefisien 187490,6. Berarti jika *banking penetration* bank konvensional naik sebesar 1 (satuan), maka jumlah tenaga kerja pada UMKM turun sebesar 187490,6. Variabel BSK (*Availability of banking service* bank konvensional) memiliki tingkat probabilitas 0,0000, yang berarti lebih kecil daripada α (0,05). *Availability of banking service* bank konvensional berpengaruh signifikan terhadap jumlah tenaga kerja pada UMKM. Pengaruhnya positif signifikan dengan koefisien 212448,4. Berarti jika *availability of banking service* bank konvensional naik 1 (satu) satuan, maka jumlah tenaga kerja pada UMKM naik sebesar 212448,4.

Beberapa variabel lain dikarenakan nilai probabilitasnya lebih besar daripada 0,05, maka variabel-variabel ini tidak berpengaruh secara signifikan. Variabel USK (*Usage* bank konvensional) memiliki tingkat probabilitas 0,1673, berarti lebih besar daripada α (0,05). *Usage* bank konvensional tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah tenaga kerja pada UMKM. Variabel PDRB memiliki tingkat probabilitas 0,6273, berarti lebih besar daripada α (0,05). PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah tenaga kerja pada UMKM. Variabel IS (Infrastruktur) memiliki tingkat probabilitas 0,6845, berarti lebih besar daripada α (0,05). Infrastruktur tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah tenaga kerja pada UMKM. Variabel APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) memiliki tingkat probabilitas 0,0093, berarti lebih kecil daripada α (0,05), sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap jumlah tenaga kerja pada UMKM.

Pengaruhnya negatif signifikan dengan koefisien 48,26686 berarti jika PDRB naik 1 satuan maka jumlah tenaga kerja turun 48,26686.

Pengujian kebaikan model dengan uji F

Hasil uji F dari model random effect diperoleh $F_{\text{statistic}} = 3,951722$ dengan Prob ($F_{\text{statistic}}$) = 0,000011 yang berarti lebih kecil daripada α (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa model regresi random effect adalah baik. Sembilan variabel independen yaitu: *banking penetration* di bank syariah, *availability of banking service* bank syariah, *usage* di bank syariah, *banking penetration* di bank konvensional, *availability of banking service* bank konvensional, *usage* bank konvensional, produk domestik regional bruto, infrastruktur, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap jumlah tenaga kerja pada UMKM.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil uji Koefisien Determinasi (R^2) sebesar 0,161655, berarti variabel independen yang terdiri dari: *banking penetration* di bank syariah, *availability of banking service* bank syariah, *usage* di bank syariah, *banking penetration* di bank konvensional, *availability of banking service* bank konvensional, *usage* bank konvensional, produk domestik regional bruto, infrastruktur, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah memiliki tingkat pengaruh terhadap jumlah tenaga kerja pada UMKM sebesar 16,16%, sedangkan sisanya 83,84% pengaruh dari faktor residu yang merupakan variabel yang tidak diteliti.

Nested Test

Pada tahap ini akan dipilih persamaan regresi yang terbaik dengan melakukan *Nested Test*. *Nested Test* adalah metode untuk memilih suatu model yang dianggap lebih baik. Uji ini dilakukan dengan menggunakan uji Wald dengan menggunakan distribusi *chi square* dengan melihat probabilitas *chi square*. *Nested test* dilakukan dua kali, yaitu *nested test* dengan variabel dependen Jumlah UMKM dan *Nested test* dengan variabel dependen jumlah tenaga kerja.

Nested Test dengan variabel dependen jumlah UMKM .

Model 3

$$UMKM_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 BPS_{1it} + \alpha_2 BSS_{2it} + \alpha_3 USS_{3it} + \alpha_4 BPK_{4it} + \alpha_5 BSK_{5it} + \alpha_6 USK_{6it} + \alpha_7 PDRB_{7it} + \alpha_8 IS_{8it} + \alpha_{10} APBD_{10it} + \varepsilon_{it}$$

Model 1

$$UMKM_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 BPS_{1it} + \alpha_2 BSS_{2it} + \alpha_3 USS_{3it} + \alpha_4 PDRB_{4it} + \alpha_5 IS_{5it} + \alpha_6 APBD_{6it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana UMKM = jumlah UMKM; *BPS*= *banking penetration* di bank syariah, *BSS* : *availability of banking service* perbankan syariah, *USS*: *usage* bank syariah, *BPK*: *banking penetration* perbankan konvensional, *USK*: *usage* bank konvensional, *PDRB* = Produk Domestik Regional Bruto; *IS* = Infrastruktur; *APBD* = Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, α = koefisien regresi; ε = error. Setelah dilakukan uji Wald terhadap 2 model tersebut , hasilnya adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 14. Uji Wald

Test Statistic	Value	df	Probability
F-statistic	4.574461	(3, 151)	0.0043
Chi-square	13.72338	3	0.0033
Null Hypothesis: C(4)=0, C(5)=0, C(6)=0			
Null Hypothesis Summary:			
Normalized Restriction (= 0)	Value	Std. Err.	
C(4)	-9.307.765	1909.073	
C(5)	-11989.13	16413.36	
C(6)	-32452.22	15460.07	

Nilai probabilitas *chi square* adalah 0,0033 berarti signifikan, sehingga menurut uji Wald ini kita menolak hipotesis nol, sehingga *banking penetration* bank konvensional, *availability of banking service* bank konvensional, dan *usage* bank konvensional mempunyai pengaruh terhadap kinerja UMKM.

Nested Test dengan variabel dependen adalah jumlah tenaga kerja pada UMKM.

Model 4

$$JTUMKM_{it1} = \beta_0 + \beta_1 BPS_{1it} + \beta_2 BSS_{2it} + \beta_3 USS_{3it} + \beta_4 BPK_{4it} + \beta_5 BSK_{5it} + \beta_6 USK_{6it} + \beta_7 PDRB_{7it} + \beta_8 IS_{8it} + \beta_{10} APBD_{10it} + \varepsilon_{it}$$

Model 2

$$JTUMKM_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 BPS_{1it} + \alpha_2 BSS_{2it} + \alpha_3 USS_{3it} + \alpha_4 PDRB_{4it} + \alpha_5 IS_{5it} + \alpha_6 APBD_{6it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana JTUMKM = jumlah tenaga kerja UMKM ; BPS= *banking penetration* di bank syariah, BSS : *availability of banking service* perbankan syariah, USS: *usage bank syariah*, BPK: *banking penetration* perbankan konvensional, USK: *usage bank konvensional* , PDRB = Produk Domestik Regional Bruto; IS = Infrastruktur ;APBD = Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, α = koefisien regresi ; ε = error.

Setelah dilakukan uji Wald terhadap ke 2 model tersebut , hasilnya adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 15. Uji Wald

Test Statistic	Value	df	Probability
F-statistic	9.578257	(3, 190)	0.0000
Chi-square	28.73477	3	0.0000
Null Hypothesis: C(4)=0, C(5)=0, C(6)=0			
Null Hypothesis Summary:			
Normalized Restriction (= 0)	Value	Std. Err.	
C(4)	-10803.32	5935.565	
C(5)	-217042.3	43896.88	
C(6)	224484.1	46681.69	

Nilai probabilitas *chi square* adalah 0,0000 berarti signifikan, sehingga menurut uji Wald ini kita menolak hipotesis nol, sehingga *banking penetration* bank konvensional, *availability of banking service* bank konvensional, dan *usage bank konvensional* mempunyai pengaruh terhadap kinerja UMKM.

Dengan demikian model yang terpilih berdasarkan uji Wald tersebut adalah model dengan variabel dependen jumlah UMKM dan 9 variabel, dan model dengan variabel dependen jumlah tenaga kerja pada UMKM dan 9 variabel.

Uji Asumsi Klasik

Setelah itu proses berikutnya adalah melakukan uji asumsi klasik terhadap dua model regresi yang terpilih. Adapun uji asumsi klasik yang akan diberlakukan adalah uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.

Uji autokorelasi terhadap model 3 : Variabel dependen jumlah UMKM

Uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan LM Test. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 16. Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test

F-statistic	1.251.736	Prob. F(2,188)	0,0000
Obs*R-squared	1.142.232	Prob. Chi-Square(2)	0,0000
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic
C	-5.730.742	7.478.299	-0.076632
BPS	1.186.315	2.015.912	0.588476
BSS	-7.920.640	4.631.361	-1.710.219
USS	1.870.377	2.132.481	0.87709
BPK	-7.258.020	12431.41	-0.583845
BSK	12710.44	14872.95	0.854601
USK	-1.673.049	2.455.591	-0.681322
PDRB	2.805.132	9.944.724	0.282072
IS	7.903.262	1.713.496	0.461236
APBD	0.172735	3.627.639	0.047616
RESID(-1)	0.785141	0.072387	1.084.645
RESID(-2)	-0.028204	0.072409	-0.389506
R-squared	0.571116	Mean dependent var	3.68E-12
Adjusted R-squared	0.546022	S.D. dependent var	7.272.736
S.E. of regression	4.900.216	Akaike info criterion	1.989.007
Sum squared resid	4.51E+09	Schwarz criterion	2.008.797
Log likelihood	-1.977.007	Hannan-Quinn criter.	1.997.016
F-statistic	2.275.883	Durbin-Watson stat	1.906.019
Prob(F-statistic)	0		

Berdasarkan hasil tersebut, probabilitas *chi square* adalah 0,0000, lebih kecil daripada 0,05, sehingga pada model 3 terjadi autokorelasi, perlu disembuhkan. Penyembuhan dilakukan dengan menggunakan metode Newey-West Adapun hasilnya adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 17. Hasil Newey-West

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.344.716	2.237.338	2.835.832	0.0051
BPS	-2.077.074	3.283.380	-0.632602	0.5278
BSS	46350.21	12422.83	3.731.051	0.0003
USS	-7.703.923	4.547.946	-1.693.935	0.0919
BPK	-34138.18	35164.35	-0.970818	0.3329
BSK	-15657.13	45259.14	-0.345944	0.7298
USK	7.915.908	6.234.176	1.269.760	0.2057
PDRB	3.268.002	1.585.373	2.061.346	0.0406
IS	-2.373.790	4.195.832	-0.56575	0.5722
APBD	-6.012.610	6.248.855	-0.962194	0.3372
R-squared	0.344343	Mean dependent var		8.157.910
Adjusted R-squared	0.313285	S.D. dependent var		8.981.717
S.E. of regression	7.442.992	Akaike info criterion		2.071.664
Sum squared resid	1.05E+10	Schwarz criterion		2.088.156
Log likelihood	-2.061.664	Hannan-Quinn criter.		2.078.338
F-statistic	1.108.728	Durbin-Watson stat		0.505061
Prob(F-statistic)	0	Wald F-statistic		5.786.747
Prob(Wald F-statistic)	0			

Setelah autokoelasi disembuhkan dengan metode Newey West, maka model 3 sudah terbebas dari masalah autokorelasi. Tahap berikutnya adalah uji heteroskedastisitas terhadap model 3.

Uji Heteroskedastisitas terhadap model 3 : variabel dependen jumlah UMKM

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan metode Breusch Godfrey. Hasilnya adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 18. Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	4.165.204	Prob. F(9,190)	0.0001
Obs*R-squared	3.295.737	Prob. Chi-Square(9)	0.0001
Scaled explained SS	5.986.171	Prob. Chi-Square(9)	0,0000

Berdasarkan hasil uji tersebut, diperoleh hasil probabilitas *chi square* 0,0001, sehingga model 3 terjadi heteroskedastisitas, maka perlu disembuhkan. Penyembuhan dilakukan dengan menggunakan metode Huber White. Hasilnya adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 19. Hasil Huber White

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.344.716	1.217.323	5.212.025	0,0000
BPS	-2.077.074	2.218.978	-0.93605	0.3504
BSS	46350.21	8.197.123	5.654.449	0,0000
USS	-7.703.923	3.173.454	-2.427.614	0.0161
BPK	-34138.18	25469.04	-1.340.379	0.1817
BSK	-15657.13	32624.19	-0.479924	0.6318
USK	7.915.908	4.394.904	1.801.156	0.0733
PDRB	32,68002	1.579.325	2.069.240	0.0399
IS	-2.373.790	2.759.288	-0.860291	0.3907
APBD	-6,012610	4,176614	-1,439590	0.1516
R-squared	0.344343	Mean dependent var	8.157.910	
Adjusted R-squared	0.313285	S.D. dependent var	8.981.717	
S.E. of regression	7.442.992	Akaike info criterion	2.071.664	
Sum squared resid	1.05E+10	Schwarz criterion	2.088.156	
Log likelihood	-2.061.664	Hannan-Quinn criter.	2.078.338	
F-statistic	1.108.728	Durbin-Watson stat	0.505061	
Prob(F-statistic)	0	Wald F-statistic	1.250.155	
Prob(Wald F-statistic)	0			

Setelah disembuhkan dengan Huber White, maka model 3 tersebut terbebas dari heteroskedastisitas. Berdasarkan hal tersebut maka persamaan regresi model 3 dengan variabel dependen jumlah UMKM dan sembilan variabel independen menjadi seperti ini :

$$\text{Jml UMKM} = 6344,716 - 2077,074 (\text{BPS}) + 46350,21 (\text{BSS}) - 7703,923 (\text{USS}) - 34138,18 (\text{BPK}) - 15657,13 (\text{BSK}) + 7915,908 (\text{USK}) + 32.68002 (\text{PDRB}) - 237,3790 (\text{IS}) - 6,012610 (\text{APBD}).$$

Adapun variabel independen yang signifikan berpengaruh terhadap jumlah UMKM adalah BSS (0,0000), USS (0,0161), PDRB (0,0399).

Uji autokorelasi terhadap model 4 : variabel dependen jumlah tenaga kerja pada UMKM

Uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan LM Test. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 20. Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test

F-statistic	1.183.168	Prob. F(2,188)	0,0000	
Obs*R-squared	1.114.531	Prob. Chi-Square(2)	0,0000	
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.725.001	2.025.524	-0.851632	0.3955
BPS	5.717.414	5.453.528	1.048.388	0.2958
BSS	-14803.56	12472.6	-1.186.886	0.2368
USS	1.224.778	5.768.414	0.212325	0.8321
BPK	-21694.04	33645.31	-0.644786	0.5199
BSK	27397.44	40256.8	0.680567	0.497
USK	-4.546.488	6.626.223	-0.006861	0.9945
PDRB	7.273.580	2.684.240	0.270974	0.7867
IS	5.194.468	4.648.222	1.117.517	0.2652
APBD	-3.624.794	9.817.307	-0.369225	0.7124
RESID(-1)	0.71742	0.072429	9.905.103	0,0000
RESID(-2)	0.048547	0.072917	0.665784	0.5064
R-squared	0.557265	Mean dependent var	-8.91E-13	
Adjusted R-squared	0.531361	S.D. dependent var	19338.39	
S.E. of regression	13238.53	Akaike info criterion	2.187.777	
Sum squared resid	3.29E+10	Schwarz criterion	2.207.567	
Log likelihood	-2.175.777	Hannan-Quinn criter.	2.195.786	
F-statistic	2.151.214	Durbin-Watson stat	1.971.817	
Prob(F-statistic)	0			

Berdasarkan hasil uji tersebut , diperoleh hasil probabilitas *chi square* = 0,0000, maka model 4 terjadi autokorelasi, sehingga perlu disembuhkan. Penyembuhan dilakukan dengan menggunakan metode Newey –West. Hasilnya adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 21. Hasil Newey-West

Variable	Coefficien	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	28407.55	7.027.989	4.042.059	0.0001
BPS	-17207.7	10362.42	-1.660.588	0.0984
BSS	57335.38	17364.38	3.301.897	0.0011
USS	-19753,61	9.429.221	-2.094.936	0.0359
BPK	-88135.03	58586.54	-1.504.356	0.1342
BSK	64542.37	64397.68	1.002.247	0.3175
USK	-15773.39	12618.11	-1.250.060	0.2128
PDRB	1.495.917	2.272.588	0.658244	0.5112
IS	-1.095.446	9.633.462	-1.137.126	0.2569
APBD	13,32940	8.367.177	1,593058	0.1128
R-squared	0.178624	Mean dependent var	23019.67	
Adjusted R-squared	0.139716	S.D. dependent var	21337.78	
S.E. of regression	19791.1	Akaike info criterion	2.267.256	
Sum squared resid	7.44E+10	Schwarz criterion	2.283.748	
Log likelihood	-2.257.256	Hannan-Quinn criter.	2.273.930	
F-statistic	4.591.002	Durbin-Watson stat	0.519238	
Prob(F-statistic)	0.000017	Wald F-statistic	3.243.507	
Prob(Wald F-statistic)	0.001092			

Setelah model 4 disembuhkan dengan metode Newey West, maka model 4 sudah terbebas dari masalah autokorelasi. Tahap berikutnya adalah uji heteroskedastisitas terhadap model 4.

Uji heteroskedastisitas terhadap model 4 : variabel dependen jumlah tenaga kerja UMKM

Tabel 4. 22. Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	1.015.615	Prob. F(9,190)	0.4290
Obs*R-squared	9.179.986	Prob. Chi-Square(9)	0.4208
Scaled explained SS	2.554.195	Prob. Chi-Square(9)	0.0024

Berdasarkan uji tersebut, diperoleh hasil probabilitas *chi square* 0,4208 berarti lebih besar daripada 0,05, maka model 4 tidak terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan hal tersebut maka persamaan regresi dengan variabel dependen jumlah tenaga kerja pada UMKM dan sembilan variabel independen menjadi seperti ini :

Jml Tenaga Kerja UMKM = 28407,55 – 17207,70 (BPS) + 57335,38 (BSS) -19.753,61 (USS) – 88135,03 (BPK) +64542,37 (BSK) – 15773,39(USK) +14,95917 (PDRB) -1095,446 (IS) + 13,32940 (APBD).

Berdasarkan *Nested Test* tersebut maka pembahasan akan dilakukan terhadap persamaan regresi dengan variabel dependen kinerja UMKM dan 9 variabel independen

4.6. Pembahasan

Pengaruh banking penetration bank syariah terhadap kinerja UMKM.

Variabel *banking penetration* bank syariah merupakan variabel baru di dalam penelitian ini. Di dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa *banking penetration* bank syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM, baik ketika kinerja UMKM diukur dengan jumlah UMKM maupun kinerja UMKM diukur dengan jumlah tenaga kerja. *Banking penetration* diukur dengan jumlah rekening bank syariah. Artinya jumlah rekening di bank syariah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja UMKM. Hal ini disebabkan karena tidak setiap pemilik rekening di bank syariah mengajukan pembiayaan ke bank syariah. Sebagian orang memanfaatkan rekening bank syariah dalam bentuk menyimpan uang tabungan, bukan untuk keperluan transaksi bisnis. Menurut Budiman et al.,(2018), yang melakukan penelitian di Banjarmasin, diperoleh hasil bahwa dari seluruh sampel, 52,5% responden telah mempunyai rekening di bank syariah. Dari responden yang telah mempunyai rekening tersebut, hanya 46,3% yang pernah mengajukan pembiayaan di bank syariah. Pemilik rekening di bank syariah tidak banyak yang memanfaatkan akses jasa pembiayaan di bank syariah, maka kepemilikan rekening tidak berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Penelitian yang lain juga mendapatkan hasil bahwa penggunaan rekening bank untuk keperluan bisnis kurang dari sepuluh persen, sedangkan mayoritas orang mempunyai rekening di bank digunakan untuk keperluan menyimpan uang saja yaitu 40% (Tambunan, 2015). Penyebab lain pemilik rekening di bank syariah tidak mengajukan pembiayaan dikarenakan minimnya pengetahuan nasabah mengenai jasa pembiayaan bank syariah sebagaimana hasil penelitian Mariyono (2013). Nasabah tidak mempunyai informasi yang cukup untuk memilih produk jasa keuangan syariah yang sesuai kebutuhan mereka (Nkundabayanga et al.,2014).

Pengaruh availability of banking service bank syariah terhadap kinerja UMKM.

Availability of banking service bank syariah ditemukan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM, baik ketika kinerja UMKM diukur dengan jumlah UMKM maupun ketika kinerja UMKM diukur dengan jumlah tenaga kerja UMKM.

Availability of banking service menggunakan indikator jumlah kantor cabang bank syariah. Pengaruh *availability of banking service* bank syariah positif signifikan berarti jika *availability of banking service* bank syariah naik, maka kinerja UMKM akan naik, sebaliknya, jika *availability of banking service* bank syariah turun, maka kinerja UMKM akan turun.

Availability of banking service bank syariah merupakan salah satu tolak ukur inklusi keuangan perbankan syariah. Makin banyak *availability of banking service* bank syariah, berarti perbankan syariah makin inklusif, makin mudah diakses oleh masyarakat, terutama UMKM, sehingga diharapkan makin memudahkan UMKM mendapatkan bantuan pendanaan. Pada akhirnya hal ini akan meningkatkan kinerja UMKM. Faktor utama yang besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan pengembangan UMKM adalah akses pada lembaga keuangan formal (Govori, 2013; Krasniqi, 2007; Mateev dan Anastasov, 2010).

Hasil penelitian dari Ono et.al. (2016) menyebutkan bahwa kedekatan kantor cabang bank berpengaruh terhadap penggunaan jasa perbankan. Faktor jauh dekatnya jarak bank dengan UMKM menjadi penentu keberlangsungan hubungan antara bank dan UMKM. Jumlah cabang bank syariah yang makin bertambah akan mendekatkan bank syariah pada UMKM yang banyak berlokasi bukan di pusat kota, sehingga memudahkan mereka memanfaatkan jasa perbankan syariah untuk keberhasilan usaha UMKM. Hal ini disebabkan karena pembukaan kantor cabang bank syariah di daerah akan mengurangi jarak transportasi, sehingga bisa menghemat biaya transportasi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan keuntungan UMKM dan meningkatkan kinerja UMKM (Degryse dan Ongena, 2005). Hal ini diperkuat oleh penelitian Evanoff (1988), yang menyatakan bahwa banyaknya kantor cabang akan mempermudah akses UMKM terhadap perbankan, sehingga bisa mempermudah transaksi bisnis UMKM, dan dapat meningkatkan kinerja UMKM. Keberadaan kantor cabang bank syariah diharapkan dekat dengan lokasi dimana pengusaha UMKM berada, sehingga bisa menjadi solusi pembiayaan.

Masalah yang dihadapi oleh UMKM adalah bahwa sebagian besar dari mereka tinggal di pedesaan, sehingga berada jauh dari lokasi kantor cabang bank syariah. Kalau hanya mengandalkan kedekatan fisik kantor cabang dengan lokasi dimana UMKM berada, bank syariah mengalami kesulitan, karena lokasi kantor cabang bank syariah yang tidak berada di dekat lokasi UMKM. Untuk mengatasi masalah ini bank syariah bekerja sama dengan agen bank untuk jemput bola kepada nasabah UMKM. Hal ini sesuai dengan Program pemerintah LAKU PANDAI (*branchless banking*) yang ditetapkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 03/POJK.03/2014. Pada kenyataannya sebagian pengusaha

UMKM dalam kegiatan usahanya lebih sering berada di pasar atau di toko dan sulit meninggalkan usaha mereka untuk mendatangi bank (Puteri dan Harfandi, 2015).

Pengaruh usage di bank syariah terhadap kinerja UMKM.

Usage di bank syariah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja UMKM, baik kinerja itu diukur dengan menggunakan jumlah UMKM, maupun kinerja itu diukur dengan jumlah tenaga kerja pada UMKM. Hal ini disebabkan karena penetapan *margin murabahah* yang ditetapkan relatif tinggi kepada nasabah, sehingga angsuran bulanan pada bank syariah menjadi tinggi (Sairally, B.S., 2002), sehingga hal itu akan menjadi beban tetap bagi para pengusaha UMKM. Padahal skema pembiayaan yang paling banyak dipakai oleh bank syariah adalah skema *murabahah*. Hasil penelitian ini mendukung temuan dari Amin et al.(2011) yang menyatakan bahwa minat nasabah untuk mendapatkan pembiayaan di bank syariah dipengaruhi salah satunya oleh *pricing* pembiayaan di bank syariah. Jika *pricing*, dalam arti penetapan margin dalam skema *murabahah* terlalu tinggi, akan mengurangi keuntungan nasabah, sehingga dapat menurunkan kinerja UMKM. Bagi bank syariah *murabahah* adalah salah satu produk jasa perbankan syariah yang memberikan kepastian jumlah pemasukan uang dan waktu dalam angsuran pembiayaan nasabah, sehingga risikonya kecil. Sedangkan akad yang lain seperti *mudharabah* dan *musyarakah* tidak memberikan kepastian jumlah pemasukan uang bagi bank syariah. Bagi bank syariah *mudharabah* dan *musyarakah* mempunyai kelemahan, yaitu kedua produk jasa bank syariah ini sangat dipengaruhi oleh akhlaq, moral dan kejujuran nasabah. Kedua produk ini sangat rawan bagi bank jika nasabahnya mempunyai niat tidak baik. Sebagai contoh yang sering terjadi adalah suatu bisnis usaha yang mendapatkan pembiayaan ini sebenarnya memperoleh keuntungan, tetapi nasabah melaporkan keadaan rugi, sehingga bank syariah tidak memperoleh bagi hasil. Pada hal sebenarnya kedua produk jasa perbankan syariah ini merupakan *core product* bank syariah dan diharapkan kedua produk ini memberikan dampak yang besar terhadap sektor riil, khususnya UMKM. Dahulu sebelum bank syariah dikenal dengan sebutan bank syariah seperti sekarang ini, bank syariah lebih dikenal dengan sebutan bank bagi hasil. *Mudharabah* dan *musyarakah* adalah bentuk investasi langsung pada sektor riil (Kara, 2013).

Dusuki dan Abdullah (2007) juga menyatakan bahwa salah satu pertimbangan nasabah untuk memilih jasa perbankan syariah adalah harga, berupa margin dalam skema pembiayaan *murabahah*. Ahmad dan Harun (2002), menyatakan bahwa faktor paling penting bagi pengusaha di dalam memilih jasa di bank syariah adalah biaya jasa pembiayaan. Padahal sebenarnya produk jasa perbankan syariah yang membedakannya dengan bank konvensional

adalah produk yang berbasis bagi hasil, bukan jual beli. Namun demikian karena menghindari resiko yang lebih besar, maka bank syariah lebih banyak mengarahkan pembiayaannya pada skema *murabahah* dengan margin yang relatif tinggi.

Pengaruh banking penetration di bank konvensional terhadap kinerja UMKM.

Banking penetration di bank konvensional diketahui tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM, baik kinerja diukur dengan jumlah UMKM maupun diukur dengan jumlah tenaga kerja pada UMKM. Hal ini disebabkan karena motivasi utama seseorang membuka rekening di bank untuk kepentingan berjaga-jaga, bukan untuk keperluan bisnis (Canova et al., 2005). Dengan demikian maka *banking penetration* dengan jumlah rekening tidak mempengaruhi jumlah UMKM. Menurut Dina dan Prasetyono (2019), para pelaku UMKM di Indonesia masih termasuk kategori *underbanked*, yaitu hanya memiliki akses minim atau bahkan tidak memiliki akses terhadap layanan keuangan, termasuk tidak mempunyai rekening, hal tersebut dikarenakan baru sekitar 36% (tiga puluh enam persen) penduduk dewasa Indonesia yang memiliki akses kepada lembaga keuangan formal. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan wajar jika *banking penetration* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja UMKM.

Pengaruh availability of banking service bank konvensional terhadap kinerja UMKM.

Availability of banking service bank konvensional diketahui tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM. Hal ini disebabkan karena pengusaha UMKM yang sebagian besar tidak tinggal di perkotaan sehingga kurang mendapatkan akses jasa keuangan perbankan konvensional, karena letak bank yang jauh dari UMKM. Bank konvensional juga lebih banyak melayani usaha besar daripada UMKM, (Rosengard dan Prasetyantoko, 2011). Selain itu juga disebabkan karena tidak meratanya sebaran kantor bank, berdampak pada penyaluran kredit UMKM, sehingga penyaluran kredit menjadi tidak maksimal dan mempengaruhi kinerja UMKM (Dina dan Prasetyono, 2019).

Pengaruh usage di bank konvensional terhadap kinerja UMKM.

Usage di bank konvensional diketahui tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM, baik kinerja diukur dengan menggunakan jumlah UMKM maupun kinerja diukur dengan jumlah tenaga kerja pada UMKM. Hal ini disebabkan karena tingginya biaya kredit sehingga terlalu berat bagi UMKM untuk menggunakan bantuan kredit perbankan. Selain itu

jasa kredit yang ditawarkan oleh pihak bank konvensional sering tidak sesuai dengan kebutuhan pengusaha UMKM (Kempson et al., 2004). Menurut Wahyudiono (2016), kadang kredit juga sering disalahgunakan oleh penerimanya. UMKM sering tergoda membelanjakan uang pinjaman tersebut bukan untuk keperluan yang produktif dalam pengembangan usaha mereka, tetapi uang itu dipergunakan untuk keperluan konsumtif. Akibatnya uang pinjaman tak dapat dikembalikan, karena pembayaran hutang dan bunganya bukan berasal dari hasil usaha, namun dari aset, yang pada akhirnya berujung kepada kebangkrutan. Menurut Dina dan Prasetiono (2019), sekitar 60 – 70% para pelaku UMKM tidak memiliki akses pinjaman atau kredit pada lembaga keuangan formal, dan hanya 30% pelaku UMKM yang mempunyai akses kredit di perbankan.

Pengaruh Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah terhadap kinerja UMKM.

Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah diketahui tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja UMKM, baik kinerja diukur dengan jumlah UMKM maupun kinerja diukur dengan jumlah tenaga kerja pada UMKM. Hal ini dikarenakan pemilik UMKM berpendapat bahwa terdapat kesulitan untuk akses terhadap sumber permodalan pemerintah, belum adanya kegiatan pembinaan usaha dari pemerintah seperti pelatihan yang sesuai keperluan UMKM, dan kurangnya informasi yang detail tentang kebijakan UMKM di Indonesia (Purwidiyanti dan Rahayu (2018). Selain itu juga dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten di Dinas Koperasi dan UKM dalam pembinaan UMKM serta terbatasnya anggaran, sehingga beberapa program pembinaan UMKM yang dicanangkan Dinas Koperasi dan UKM tidak bisa dilaksanakan (Pertiwi et al., 2018).

Pengaruh infrastruktur terhadap kinerja UMKM.

Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa infrastruktur tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja UMKM. Hal ini disebabkan karena pemerintah belum mampu menyediakan infrastruktur jalan yang memadai, sehingga beberapa daerah terutama di luar pulau Jawa sarana transportasi darat masih belum memadai, oleh karena itu kondisi jalan tidak signifikan mempengaruhi produktivitas ekonomi (Widayati, 2010). Selain itu jenis infrastruktur yang berpengaruh besar terhadap perekonomian adalah infrastruktur listrik dan air, sedangkan infrastruktur jalan menempati urutan ketiga. Gibson and Olivia (2008), menyatakan bahwa hanya lima puluh persen jalan yang ada di pulau Jawa di aspal, dan empat puluh persen jalan yang lain mengalami kerusakan.

Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap kinerja UMKM.

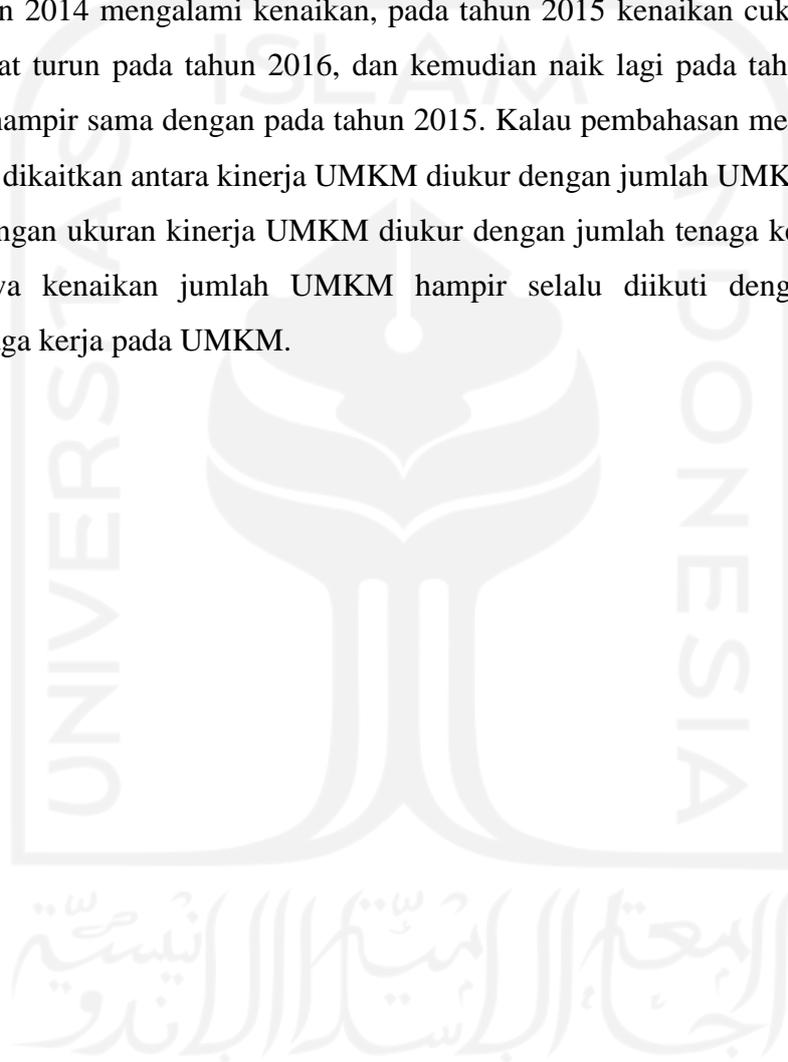
Apabila kinerja UMKM diukur dengan menggunakan jumlah UMKM, maka Produk Domestik Regional Bruto di suatu daerah diketahui berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja UMKM. Hal ini mendukung temuan hasil penelitian Mukorera dan Mahadea (2014), bahwa pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan *money supply* mempengaruhi pertumbuhan UMKM di suatu negara. Demikian pula Osakwe et al. (2016) yang menyatakan ada hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan UMKM.

Jika kinerja UMKM diukur dengan jumlah tenaga kerja pada UMKM, maka Produk Domestik Regional Bruto tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah tenaga kerja pada UMKM. Menurut Munizu (2010), hal ini disebabkan karena faktor-faktor internal pada UMKM lebih mempengaruhi kinerja UMKM dibandingkan dengan faktor-faktor eksternal. Faktor eksternal hanya berpengaruh sebesar 25,4%, sedangkan faktor internal berkontribusi lebih besar daripada faktor eksternal.

Berdasarkan koefisien *cross effect*, dengan indikator jumlah UMKM, dari 40 kabupaten/ kota yang diteliti terdapat 15 kabupaten/kota yang memiliki koefisien intersep yang positif. Semuanya ada di pulau Jawa.. Adapun daerah-daerah tersebut adalah: kota Semarang, kota Surabaya, Kota Malang, kota Bekasi, kabupaten Gunungkidul, kabupaten Bantul, kota Depok, kota Surakarta, kabupaten Cilacap, kabupaten Sleman, kota Bandung, kota Yogyakarta, kabupaten Semarang, kabupaten Kudus, kota Cirebon. Hal ini menunjukkan bahwa di kota-kota yang nilai koefisiennya positif tersebut UMKM menunjukkan keadaan yang lebih baik. Jika menggunakan indikator kinerja UMKM adalah jumlah tenaga kerja pada UMKM, koefisien *cross effect*, beberapa kabupaten/ kota mempunyai nilai positif. Dari 40 kabupaten/kota yang diteliti terdapat 16 kabupaten/kota yang memiliki koefisien intersep yang positif, dan 24 kabupaten/kota yang lain koefisien *cross effect* negatif. Hal ini menunjukkan daerah - daerah tersebut memiliki kinerja UMKM yang relatif lebih baik. Kabupaten/ kota tersebut adalah:, kabupaten Bantul, kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Malang, kabupaten Sleman, kota Yogyakarta, kota Bekasi, kota Surabaya, kabupaten Semarang, kabupaten Tegal, kabupaten Pekalongan, Surakarta, kota Depok, kota Bandung, kabupaten Pati, kota Semarang, kabupaten Agam. Dari 16 kabupaten / kota tersebut, hanya ada satu kabupaten di luar Jawa yang positif, yaitu kabupaten Agam. Hal ini disebabkan karena di pulau Jawa UMKM punya peluang lebih banyak untuk berkolaborasi dengan usaha besar, misalnya dengan menjadi penyedia *spare part* dan berbagai macam input bagi usaha berskala besar melalui pola sub kontrak (Sulistiyastuti, 2004). Di luar Jawa, karena usaha

besar jumlahnya tidak sebanyak di pulau Jawa, maka peluang untuk berkolaborasi dengan usaha besar kurang.

Berdasarkan koefisien *period effect*, jika kinerja UMKM diukur dengan jumlah UMKM, maka kinerja UMKM cenderung mengalami kenaikan cukup signifikan pada tahun 2014, pada tahun 2015 mengalami kenaikan tapi tidak signifikan, dan tahun 2016 mengalami kenaikan cukup tinggi, walaupun kemudian mengalami penurunan pada tahun 2017. Jika kinerja UMKM diukur dengan menggunakan jumlah tenaga kerja, maka koefisien *period effect* pada tahun 2014 mengalami kenaikan, pada tahun 2015 kenaikan cukup tinggi, untuk kemudian sempat turun pada tahun 2016, dan kemudian naik lagi pada tahun 2017 dengan kenaikan yang hampir sama dengan pada tahun 2015. Kalau pembahasan mengenai koefisien *period effect* ini dikaitkan antara kinerja UMKM diukur dengan jumlah UMKM dan koefisien *period effect* dengan ukuran kinerja UMKM diukur dengan jumlah tenaga kerja, maka dapat dikatakan bahwa kenaikan jumlah UMKM hampir selalu diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja pada UMKM.



BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Kesimpulan

Temuan dari penelitian disertasi yang berjudul “Peran Inklusi Keuangan Perbankan Syariah terhadap Kinerja UMKM”, kesimpulannya sebagai berikut :

Inklusi keuangan perbankan syariah terdiri dari tiga dimensi, yaitu dimensi *banking penetration*, dimensi *availability of banking service*, dan *usage*. Dari hasil penelitian ini diketahui *banking penetration* bank syariah tidak berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kinerja UMKM. Hal ini disebabkan karena pemegang rekening bank syariah membuka rekeningnya dalam bentuk tabungan, bukan untuk keperluan bisnis. Selain itu, pengetahuan pembiayaan syariah yang minim dari UMKM menjadi penyebab minimnya pengajuan pembiayaan, meskipun mereka telah membuka rekening di bank syariah.

Availability of banking service bank syariah berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM. Kedekatan kantor cabang dengan UMKM berpengaruh terhadap penggunaan jasa perbankan, sehingga memudahkan UMKM untuk mendapatkan pelayanan yang pada akhirnya meningkatkan kinerja UMKM. Meskipun kantor cabang bank syariah tidak berada di dekat lokasi pengusaha UMKM, tetapi bank syariah menggunakan agen bank untuk menggantikan fungsi kantor cabang secara fisik untuk berada di dekat pengusaha UMKM, sehingga pengusaha UMKM tetap bisa mengakses jasa layanan bank syariah melalui agen bank syariah tersebut.

Usage perbankan syariah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja UMKM. Hal ini karena skema *murabahah* yang menjadi produk utama pembiayaan dari bank syariah mengenakan margin yang relatif tinggi. Pengenaan margin yang tinggi ini menyebabkan pengusaha UMKM terkena beban tetap yang relatif tinggi, dikarenakan dalam *murabahah* nasabah mempunyai kewajiban untuk mengangsur pembiayaan dalam jumlah tetap, sehingga akan mengurangi keuntungan UMKM, akhirnya berpengaruh negatif terhadap kinerja UMKM.

Variabel kontrol *banking penetration* pada bank konvensional tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM karena banyaknya rekening di bank konvensional tidak

selalu mencerminkan bahwa pemilik rekening tersebut, selain memiliki tabungan, juga mengajukan pembiayaan usaha. Variabel *availability of banking service* pada bank konvensional tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM, karena lokasi UMKM banyak di pedesaan, sulit terjangkau bagi bank konvensional. Selain itu bank konvensional juga lebih banyak melayani usaha besar. Variabel *usage* pada bank konvensional tidak berpengaruh signifikan terhadap UMKM, karena sulitnya UMKM memenuhi persyaratan kredit yang ditawarkan. Selain itu juga disebabkan sering kredit disalahgunakan untuk tujuan konsumtif. Variabel kontrol lain, yaitu infrastruktur dan dukungan pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja UMKM, baik dinilai dengan jumlah UMKM maupun dinilai dengan jumlah tenaga kerja pada UMKM sebagai indikator kinerja UMKM.

Jika kinerja UMKM menggunakan jumlah tenaga kerja pada UMKM variabel kontrol Produk Domestik Regional Bruto tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja UMKM karena faktor internal UMKM lebih berpengaruh terhadap keberhasilan UMKM dibanding dengan faktor eksternal. Namun jika kinerja UMKM menggunakan indikator jumlah UMKM Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh secara signifikan terhadap UMKM. Menurut Mukorera dan Mahadea (2014) pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pertumbuhan UMKM di suatu negara.

Berdasarkan koefisien *cross effect*, pada umumnya kabupaten/ kota yang ada di pulau Jawa mempunyai kinerja UMKM yang lebih baik dari pada kabupaten/ kota yang ada di luar pulau Jawa. Demikian pula penyerapan tenaga kerja yang berkerja di UMKM, kabupaten/ kota yang ada di pulau Jawa relatif lebih tinggi daripada kabupaten/ kota yang ada di luar pulau Jawa. Berdasarkan *period effect*, jumlah UMKM dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan, demikian pula jumlah tenaga kerja yang bekerja pada UMKM dari tahun ke tahun mengalami kecenderungan yang meningkat.

Implikasi

Implikasi Teoritis.

Banking penetration bank syariah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja UMKM, baik kinerja UMKM diukur dengan jumlah UMKM maupun diukur dengan jumlah tenaga kerja pada UMKM. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Budiman et al.(2018) yang menemukan bahwa hanya 46,3% pemilik rekening bank yang mengajukan pembiayaan di bank. Pengusaha UMKM banyak yang belum

memanfaatkan pembiayaan yang disediakan oleh bank syariah dikarenakan minimnya pengetahuan mereka terhadap jasa pembiayaan yang tersedia di bank syariah (Nkundabayanga, et al., 2014). Selain itu sebagian besar pengusaha UMKM membuka rekening di bank syariah untuk keperluan berjaga-jaga saja.

Availability of banking service bank syariah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM, baik kinerja diukur dengan jumlah UMKM maupun diukur dengan jumlah tenaga kerja pada UMKM. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Degryse dan Ongena (2005) yang menemukan bahwa pembukaan kantor cabang di daerah akan mengurangi jarak transportasi, sehingga bisa menghemat biaya dan akhirnya meningkatkan kinerja UMKM. Hal ini juga diperkuat oleh hasil penelitian Puteri dan Harfandi (2015) yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah UMKM, bank syariah bekerja sama dengan agen bank dalam program LAKU PANDAI ke lokasi dimana UMKM berada, karena sebagian pengusaha UMKM dalam kegiatan usahanya sering tidak bisa meninggalkan pasar atau tokonya untuk mendatangi bank syariah.

Usage bank syariah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja UMKM, baik kinerja diukur dengan jumlah UMKM maupun diukur dengan jumlah tenaga kerja pada UMKM. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sairally, B.S (2002) yang menemukan bahwa penetapan margin pada skema pembiayaan murabahah pada bank syariah kadang relatif tinggi, sehingga ini akan berpengaruh pada beban tetap yang tinggi, dan pada akhirnya menurunkan kinerja UMKM.

Adapun variabel kontrol, yaitu *banking penetration* bank konvensional, tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM, baik kinerja diukur dengan jumlah UMKM, maupun kinerja diukur dengan jumlah tenaga kerja UMKM tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Canova et al. (2005), yang menemukan bahwa motivasi seseorang membuka rekening di bank untuk sebagian besar keperluan berjaga-jaga, bukan untuk keperluan bisnis. Selain itu menurut Dina dan Prasetyono (2019) baru sekitar 36% penduduk dewasa Indonesia yang memiliki akses pada lembaga keuangan formal, sehingga karena jumlahnya kecil, maka pengaruhnya tidak signifikan.

Variabel kontrol lain, *availability of banking service* bank konvensional tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM, baik diukur dengan jumlah UMKM maupun jumlah tenaga kerja pada UMKM. Hasil penelitian ini menguatkan hasil penelitian

Rosengard dan Prasetyantoko (2011), yang menemukan bahwa bank konvensional, lebih banyak melayani usaha besar daripada UMKM.

Variabel kontrol lain, *usage* bank konvensional tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM, baik kinerja diukur dengan jumlah UMKM maupun diukur dengan jumlah tenaga kerja pada UMKM. Hal ini disebabkan karena tingginya biaya kredit dan kredit yang ditawarkan oleh pihak bank konvensional sering tidak sesuai dengan kebutuhan pengusaha UMKM (Kempson et al., 2004). Bahkan menurut hasil penelitian Wahyudiono (2016), terkadang kredit sering disalahgunakan oleh penerimanya. Pengusaha UMKM sering tergoda membelanjakan uang pinjaman tersebut, bukan untuk keperluan produktif, tetapi untuk keperluan konsumtif.

Dukungan pemerintah yang diukur dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah diketahui tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM, baik kinerja diukur dengan jumlah UMKM maupun kinerja diukur dengan jumlah tenaga kerja pada UMKM. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Pertiwi, Gani, dan Said (Pertiwi et al., 2018).

Infrastruktur tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja UMKM, baik kinerja diukur dengan jumlah UMKM maupun kinerja diukur dengan jumlah tenaga kerja pada UMKM. Hasil ini sejalan dengan penelitian Widayati (2010) yang mendapatkan hasil bahwa infrastruktur yang berpengaruh besar terhadap perekonomian adalah infrastruktur listrik dan air, infrastruktur jalan menempati urutan ketiga yang mempengaruhi perekonomian.

Pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja UMKM jika kinerja UMKM diukur dengan jumlah UMKM. Hasil ini mendukung temuan dari Mukorera dan Mahadea (2014) yang mendapatkan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan *money supply* mempengaruhi pertumbuhan UMKM di suatu negara. Osakwe et al. (2016) juga menyatakan ada hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan UMKM. Jika kinerja UMKM diukur dengan jumlah tenaga kerja pada UMKM, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM. Hasil ini mendukung penelitian Munizu (2010) yang memperoleh hasil bahwa faktor-faktor internal pada UMKM lebih mempengaruhi kinerja UMKM dibandingkan dengan faktor eksternal.

Berdasarkan koefisien *cross effect*, pada umumnya kabupaten/ kota yang ada di pulau Jawa mempunyai kinerja UMKM yang lebih baik dari pada kabupaten/ kota yang ada

di luar pulau Jawa. Demikian pula penyerapan tenaga kerja yang berkerja di UMKM, kabupaten/ kota yang ada di pulau Jawa relatif lebih tinggi daripada kabupaten/ kota yang ada di luar pulau Jawa. Berdasarkan *period effect*, jumlah UMKM dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan, demikian pula jumlah tenaga kerja yang bekerja pada UMKM dari tahun ke tahun mengalami kecenderungan yang meningkat.

Kebijakan Pemerintah

Berdasarkan hasil penelitian ini, dimensi inklusi keuangan perbankan syariah yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM adalah *availability of banking service* bank syariah dan *usage* bank syariah., sedangkan *banking penetration* bank syariah tidak berpengaruh signifikan. *Availability of banking service* adalah ketersediaan pelayanan bank syariah. Pemerintah perlu melonggarkan peraturan yang mendorong bank syariah agar memperluas pelayanan bank syariah dengan melonggarkan aturan yang membolehkan bank syariah secara luas menjalankan program *branchless banking*. Saat ini OJK dan BI ini sudah menyepakati peraturan penerapan program *branchless banking* dan layanan keuangan digital sebagai solusi untuk meningkatkan akses masyarakat ke perbankan. Namun demikian bank yang diperbolehkan menjalankan program *branchless banking* harus memenuhi syarat bank tersebut termasuk kategori bank BUKU 2,3, dan 4. Adapun untuk bank yang termasuk kategori BUKU 1 belum diperbolehkan.

Usage adalah pemanfaatan jasa keuangan perbankan syariah. Pemerintah perlu mendorong bank syariah untuk lebih menyalurkan pembiayaan dalam bentuk skema bagi hasil, *musyarakah* dan *mudharabah*. Selama ini bank syariah lebih banyak menyalurkan pembiayaan dalam skema *murabahah*. Dari sudut pandang perbankan syariah, skema pembiayaan *murabahah* memang lebih menarik dibandingkan dengan skema *musyarakah* dan *mudharabah*. Hal ini terjadi karena pada skema pembiayaan *murabahah*, bank mendapatkan kepastian uang masuk dan kepastian waktu, sedangkan pada skema *musyarakah* dan *mudharabah*, jumlah uang masuk sering tidak dapat dipastikan, karena harus melihat hasil usaha lebih dahulu.

Strategi Bank Syariah

Berdasarkan kesimpulan diatas, dimana terdapat 2 variabel atau 2 dimensi dari inklusi perbankan syariah yang mempengaruhi kinerja UMKM, yaitu *availability of banking service* dan *usage* bank syariah, maka strategi bank syariah agar pembiayaan UMKM lebih meningkat lagi, yaitu :

Pertama, perbankan syariah perlu meningkatkan kualitas pelayanan dan kuantitas sehingga dapat meningkatkan perannya untuk meningkatkan kinerja dan kemajuan UMKM dengan cara lebih banyak meningkatkan *availability of banking service* kepada UMKM dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi kepada UMKM dalam bentuk *branchless banking*. Meskipun keberadaan kantor cabang bank syariah terbatas, tetapi dengan memanfaatkan jaringan teknologi informasi dan memperbanyak agen, akan dapat menjangkau UMKM yang letaknya jauh dari lokasi kantor cabang.

Kedua, bank syariah perlu meningkatkan literasi keuangan syariah kepada masyarakat yang bisa dilakukan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebanyak mungkin. *Ketiga*, bank syariah perlu meningkatkan porsi pembiayaan kepada nasabah UMKM dalam bentuk skema *musyarakah* dan *mudhorobah*, sehingga nasabah UMKM tidak hanya mengenal *murabahah*, yang berbasis beli saja, tetapi juga *musyarakah* dan *mudhorobah* yang berbasis bagi hasil.

Saran

Penelitian ini mengkaji inklusi keuangan pada perbankan syariah dan perannya terhadap kinerja UMKM secara makro, dengan menggunakan alat analisis regresi data panel. Padahal sebagaimana diketahui bahwa selain lembaga keuangan perbankan syariah, seperti Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, ada juga lembaga keuangan mikro seperti Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) yang menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat, dan jumlahnya mungkin lebih banyak daripada perbankan syariah. Oleh karena itu pada masa yang akan datang perlu ada penelitian yang mengkaji peran Baitul Maal wat Tamwil dalam meningkatkan inklusi keuangan dan seberapa besar peran Baitul Maal Wat Tamwil di masyarakat, khususnya terhadap perkembangan UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Abor, J. and Quartey, P., (2010), "Issues in SME Development in Ghana and South Africa", *International Research Journal of Finance and Economics*(39).
- ADB, (2015), "Financial Inclusion, Poverty and Income Inequality in Developing Asia", *ADB Economics Working Paper Series No 426*.
- Ahmad, N., dan Haron,S.,(2002), "Perceptions Of Malaysian Corporate Customers Towards Islamic banking Products & Services", *International Journal of Islamic Financial Services*, Vol 3 No4.
- Alhabashi, K.,(2015), Financing For Small And Medium Enterprise: The Role of Islamic Financial Institutions in Kuwait, University of Gloucestershire.
- Amah, N., (2013), "Bank Syariah dan UMKM Dalam Menggerakkan Roda Perekonomian Indonesia: Suatu Kajian Literatur",*Jurnal Akuntansi dan Pendidikan Vol 2(1)*.
- Amidzic,G., Massara, and Mialou, (2014), "Assesing Countries Financial Inclusion Standing: A New Composite Index", *International Monetary Found Working Paper No 14/36*.
- Amin, H. Rahman,A.R.,Sondoh,S.,Hwa,S.L.(22011), "Determinants of Customers' Intention To Use Islamic Personal Financing", *Journal Of Islamic Accounting And Business Reserach*, Vol 2,No 1.
- Ayyagari, Kunt, Maksimovic,(2008), "How Important Are Financing Constraints? The Role of Finance in The Business Environment", *World Bank Econ Rev 22 (3): 483-516*.
- Aysan,A.,Disli, M.,Ozturk,H.,(2016), "Is Small The New Big ? Islamic Banking For SMEs in Turkey", *Economic Modelling 54*, pp: 187 – 194.
- Ayub, M. (2007), *Understanding Islamic Finance*. John Wiley & Sons Ltd.
- Banarjee and Newman, A., (1993), "Occupational Choice And The Process of Development", *The Journal of Political Economy* 101 (2) 274-298.
- Bank Indonesia, (2014), *Booklet Financial Inclusion*, Jakarta: Bank Indonesia.
- Baporikar, N., Nambira,G.,Gomxos,G.,(2016), "Exploring Factors Hindering SMEs' Growth: Evidence From Namibia", *Journal of Science And Technology Policy Management Vol 7 No 2*, pp 190-211.
- Bazza,M.,Maiwada,B., Daneji,B., (2014),"Islamic Financing: A Panacea To Small And Medium Scale Enterprises Financing Problems in Nigeria", *European Scientific Journal*, 10(10).
- Beaver,G.and Prince,C.,(2004), "Management,Strategy and Policy in The UK Small Business Sector : A Critical Review", *Journal of Small Business And Enterprise Development*, 11(1), 34-39.
- Beck, T and Kunt, D.,(2006),"Small and Medium Size Enterprises: Acess To Finance As A Growth Constraint", *Journal of Banking and Finance* 30, 2931-2943.

- Berry,A.,Rodriguez, sandee,H.,(2001), “ Small and Medium Enterprises Dynamics”, bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol 37, No 3,p 363-384
- Bilal,,A., Khan, A., Akoorie, M.,(2016), “Constraints To Growth: A Cross Country Analysis of Chinese, Indian, and Pakistani SMEs”, *Chinese Management Studies*, Vol 19, No 2, pp 365- 386.
- Binswanger and Khandker,(1995), “The Impact of Formal Finance On The Rural Economy of India”, *Journal of Development Studies*: 32 (2) : 234 – 265.
- Bouazza, A., Ardjouman, D. ,and Abada,O., (2015), “Establishing The Factors Affecting The Growth of Small and Medium Sized Enterprises In Algeria”, *American International Journal of Social Science*, Vol 4 No 2.
- Bradshaw, J et al.(1998), “ *Perception of Poverty & Social Exclusion*”, Bristol: Townsend Centre for International Poverty Research.
- Brune, L ., Gioe , J.,Goldberg, D.,Yang, (2011), “Commitment To Save: A Field Exeperiment in Rural Malawi ”, *World Bank Policy Reserach Working paper No 5748*: Washington DC.
- Budiman,M., Marijani, Mahyuni, Herlinawati, (2018), “Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah Di Lingkungan Perguruan Tinggi: Studi Pada Politeknik Negeri Banjarmasin”, *Prosiding Seminar Nasional ASBIS*.
- Burges and Pande, (2005), “ Do Rural Banks Matter ? Evidence From The Indian Social Banking.” *Experiment American Economic Review* 95 (3): pp: 780 – 795.
- Canova, L.,Rattazi,A.,M.,Webey,P., (2005), “The Hierarchial Structure Of Saving Motives”, *Journal of Economic Psychology*, Vol 26, p 21-34
- Chittithaworn ,C., Islam,A.,Keawachana,T.,Yusuf,D., (2011), “Factors Affecting Business Success of Small and Medium Enterprises (SMEs) in Thailand ”, *Asian Social Science*, Vol 7, No 5, May.
- Cnaan, R., Nmoodithaya , M., and Handy ,F., (2012), “ Financial Inclusion: Lessons From Rural South India”, *Jnl.Soc.Pol* 41,1, 183-205, Cambridge University Press.
- Davis,G. and Cobb, J.,(2010), “ Resource Dependence Theory: Past And Future”. Research in The Sociology of Organization (28), 21-42.
- Degryse,Hans, and Ongena, (2005), “Distance, Lending Relationship, and Competition.”, *Journal of Finance* Vol 60, 231-266.
- Dina, A., dan Prasetiono , (2019), “Pengaruh Pendapatan Masyarakat , Penetrasi Geografis Perbankan, Penetrasi Demografis Perbankan, Penggunaan Rekening Kredit Dan Penggunaan Rekening DPK Bank Umum Terhadap Kredit UMKM Di Indonesia Periode Tahun 2013-2017, *Diponegoro Journal of Management*, Vol 8, Nomor 4, hal 28-42.
- Dusuki,A,W,. dan Abdullah,N,I.,(2007), “Why Do Malaysian Customers Patronise Islamic Banks ”, *International Journal of Bank Marketing*, Vol 25, No 3.

- Eastwood, R. and Kohli R, (1999), “ Directed Credit and Investment In Small Scale Industry in India : Evidence From Firm Level Data 1965 – 1978”, *Journal Of Development Studies* 35 (4).
- Elasrag,(2016), “Islamic Finance For SMEs”, *Munich Personal RePEc Archive (MPRA) Paper No 73913*, 22 September.
- Elsenhardt, K.,Martin J., (2000), “Dynamic Capabilities, What Are They ?”, *Strategic Management J*, 21(1) : 1105-1121.
- Ene, E.E.,and Inemesit,U.A.(2015),”Impact of Microfinance In Promoting Financial Inclusion in Nigeria.”, *Journal of Business Theory and Practice*, 3(2), 139-159.
- Evanoff, D.D.,(1988),” The Impact of Branch Banking on Service Accessibility”, *Journal of Money, Credit and Banking*, JSTOR
- Fahmy,O.,Rustam,M.,Asmayadi,E.,(2016),”Pengaruh Keuangan Inklusif Terhadap Kredit Yang Disalurkan Pada Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 5(2): 118-125.
- Fatoki O, (2011), “The Impact Of Human,Social, and Financial Capital On The Performance of Small and Medium Sized Enterprises (SMEs) in South Africa”, *J Soc Sci*, 29(3) : 193 – 204.
- Fouad ,M., (2013), “Factors Affecting The Performance Of Small And Medium Enterprises (SMES) In The Manufacturing Sector Of Cairo, Egypt”, *International Journal Of Business And Management Studies*, Vol 5, No 2, pp:157-166.
- Gait,A.H., and Worthington,A.C.,(2007), “ An Empirical Survey of Individual Consumer, Business Firm And Financial Institution Attitudes Towards Islamic Methods”, *Accountung & Finance Working Paper 07/08*, School of Accounting & Finance, University of Wollongong.
- Gibson, J. And Olivia,S.,(2008), “The Effect of Infrastructure Access and Quality on Non Farm Enterprises in Rural Indonesia” , *Department of Economic Working Paper in Economics 17/08*, University of Waikato, Hamilton New Zealand.
- Govori, and Arbiana, (2013), “Factors Affecting The Growth and Development of SMEs : Experiences From Kosovo”, *Mediterranean Journal of Social Science* Vol 4 No 9, October.
- Gujarati,D.,(1995), *Basic Econometric*, Third Edition, Mc Graw Hill
- Hadiyati, P., (2013), “Pengaruh Non Performing Financing Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia”, *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol 1 No 1, Oktober.
- Hakim,A. (2010), *Ekonomi Pembangunan*, Ed 1, Yogyakarta : Penerbit Ekonisia.
- Hakim, A. (2014), *Pengantar Ekonometrika Dengan Aplikasi Eviews*. Yogyakarta : Penerbit Ekonisia.

- Haneef, T. (2010), "Barriers To Growth of SMES in Lahore And Their Effects On SME", *Paradigms . A Research,* *Journal of Commerce, Economics, and Social Sciences* , Vol 4 No 1, pp 64 – 79.
- Harash, E., Tamimimi, S., Alsaadi, J., (2014), "The Influence of Finance on Performance of Small and Medium Enterprise (SMES)", *International Journal of Engineering and innovative Technology (IJEIT)*, Vol 4 , Issue 3, September pp : 161-165.
- Hariyati ,N, (2010), "Peran Bank Syariah Dalam Mengoptimalkan UMKM Kota Yogyakarta", UIN Sunan Kalijaga tidak dipublikasikan.
- Hartono, J. (2004), *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaparah Dan Pengalaman-pengalaman*, Edisi 6, Yogyakarta: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.
- Hastak and Gaikwad, (2015), "Issues Relating To Finanacial Inclusion And Banking Sector In India", *The Business & Management Review*, vol 5 (4) pp: 194-203.
- Hendri,L (2018)," Evaluasi Pemerataan Pembiayaan Perbankan Syariah Untuk UMKM di Seluruh Indonesia", *EKONOMIKA SYARIAH : Journal of Economic Studies*, Vol 3 No 2, Juli-Desember.
- Huda,N.,(2012), "The Development of Islamic Financing Scheme For SMEs In A Developing Country: The Indonesian Case", *Procedia Social and Behavioral Sciences* 52, 179-186.
- Hudson, M.,Smart, A.,Bourne,M.(2001),"Theory and Practice in SME : performance Measurement Systems.", *International Journal of Operation and Production Management*, 21(8), 1096-1115.
- Indarti,N.and Langenberg,(2005), "Factors Affecting Business Success Among SMES: Empirical Evidences From Indonesia".
- Insani F,(2013), "Family Funding dan Formal Funding Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jepara".
- Inyang,B.,(2013), "Defining The Role Engagement of Small and Medium Sized Enterprises (SMEs) in Corporate Social Responsibility (CSR)", *International Business Research* ,6(5), p 123.
- Irmawati,S.,Damelia,D.,Puspita,D.W.(2013),"Model Inklusi Keuangan Pada UMKM Berbasis Pedesaan.", *Journal of Economics and Policy (Jejak)*, 6(2) : 103-213
- Islam, Md., Khan,M., Obaidullah, A., Alam.(2011), "Effect of Enterpreuner And Firm Characteristics On Business Success Of Small And Medium Enterprises (SMEs) in Bangladesh", *International Journal of Business And Management* Vol 6 No 3, March: 289 – 299.
- Islam, M., Yousuf,S. and Rahman,M.,(2014), "SME Financing in Bangladesh; A Comparative Analysis of Conventional and Islamic Banks", *Journal of Islamic Banking and Finance* ,2(1),79-92.

- Jasra,J., Khan,M., Hunjra, A., Rehman,R., Azam., (2011), “Determinants Of Business Success Of Small And Medium Enterprise”, *International Journal Of Business And Social Science* , Vol 2, No 20, Nopember , p : 274-280.
- Kamunge,S.,Njeru,A.,Tirimba,O.,(2014),”Factors Affecting The Performance of Small and Micro Enterprises in Limuru Town Market of Kiambu County Kenya”, *International Journal of Scientific and Research Publications*, Vol 4 Issue 12, Desember.
- Kara,M., (2013), “Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah’, *Ahkam*, Vol XIII, No 2, Juli.
- Karim,A. (2006), *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi 3, Jakarta :PT Raja Grafindo Persada.
- Kaynak, E., Whiteley, A.,(1999), “A Retail bank Marketing in Western Australia”, *International Journal of Bank Marketing*, 17(5) : 221-232.
- Kemayel, L., (2015), “Success Factors of Lebanese SMEs: an Empirical Study”, *Procedia Social and Behavioral Sciences* , 195 pp 1123 – 1128.
- Kementrian Negara Koperasi dan UKM, (2005), “Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Pengembangan Ekonomi Nasional.”.
- Kempson,E., Atkinson and Pilley, (2004), “Policy Level Response To Financial Exclusion In Developed Economics: Lesson For Developing Countries”, *Report of Personal Finance Research Centre*, University of Bristol.
- Krasniqi, B. (2007),”Barriers To Enterpreunership And SME Growth In Transition: The Case Of Kosova”, *Journal of Development Enterpreunership* Vol 12, No 1, p 71-94.
- Kristanto,D.,(2006), “Peranan Perbankan Syariah Dalam Membantu Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Akibat Krisis Multi Dimensi Di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan* Vol 6 No 1 April , hal 86-97.
- Kuncoro, M.,(2009), *Metode Riset Untuk Bisnia & Ekonomi: Bagaimana Meneliti & Menulis Tesis ?*,Edisi 3 , Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kunt.A.and Klepper, L., (2012), “Measuring Financial Inclusion”, *The Global Findex Database, Policy Research Working Paper* No 6025.
- Kunt,A, and Klapper, L., 2012, “Financial Inclusion In Africa An Overview,” *Policy Research Working Paper* 6088, The World Bank Development Reserach Group Finance and Private Sector Development Team.
- Leyshon,A.and Thrift,N.,(1995),“Geographies Of Financial Exclusion: Financial Abandonment in Britain and The United States”, *Transactions of The Institute of British Geographis, New Series* 20/3: 312 – 418.
- Lupasc,I.,(2013), “Analysis And Challenges Regarding Women Contribution To The SME Development in Romania“, *International Conference Risk in Contemporary Economy*, XIV Edition, University of Galati, Faculty of Economics and Business Adminsitrattion , Romania.

- Malaysia World's Islamic Finance Market Place,(2016), *Islamic Finance Bridging The SME and MSME*, Funding Gap.
- Majumdar,S.,(1997), “The Impact of Size and Age on Firm Level Performance: Some Evidence from India”,*Review of Industrial Organization* 12: pp:231- 241.
- Mambula, C.,(200)2, “Perceptions of SME Growth Constraints in Nigeria” , *Journal of Small Business Management* 40(1), pp 58-65.
- Maqin, A., (2011), “ Pengaruh Kondisi Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Barat” , *Trikonomika* Vol 19, No 1, hal 10-18, Juni.
- Mariyono,J.,(2013), “Determinants of Customers In Selecting Sharia banking Sysytem For Saving In East Java-Indonesia”, *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura* Vol 16, No 3, December pages 457-472.
- Mary,I., Okulue,U., Nweze, Uche, A., (201)2, “Investment in Fixed Assets and Firm Profitability: Evidence from the Nigerian Brewery Industry” , *European Journal of Business and Management*,Vol 4(20),,pp 10-17.
- Mateev, M.and Anastasov,Y.,(2010), “Determinants of Small And Medium Sized Fast Growing Enterprises In Central And Eastern Europe: A Panel Data Analysis”, *Financial Theory And Practice* 34 (3) 269 – 295.
- Mazzarol,T., Volery,T., Doss, N.,and Thein,V.,(1999),”Factors Influencing Small Business Start Ups: A Comparison With Previous Reserach”, *International Journal of Enterpreurial Behaviior & Reserach*, Vol 5 No 2, pp 48 -63.
- Mohammed,A.,(2015), ”Talent Attraction and Retention In Saudi Arabian Family Owned Small and Medium Scale Enterprises (SMEs)”..*Journal of Business Management & Social Sciences Reserach* ,4(2),182-189.
- Mohieldin,M.,Iqbal,Z.,Rostom, A., Fu, X., (2011), “The Role of Islamic Finance in Enhancing Financial Inclusion in Organization of Islamic Corporation Countries”, *Policy Reserach Working Paper 5920*, The World Bank Islamic Economic and Finance Working Group,
- Moorthy K.,Tan,A.,Choo,C.,Wei,C., Ping,J., Leong, T., (2012), ”A Study On Factors Affecting The Performance of SMEs in Malaysia”, *International Journal Of Academic Research in Business and Social Sciences*,Vol 2,No 4, April.
- Muharam, A.,(2017), “Arah Kebijakan Koperasi dan Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah”, Kementrian Koperasi dan UKM.
- Mukumba, T,. (2014), “Overcoming SMES Challenges Through Critical Success Factors : A Case of SMES In The Western Cape Province, South Africa”, *Economic and Business Review* Vol 16, No 1, pp : 19 – 88.
- Mukorea and Mahadea (2014), “Linking Entrepreneurial Activity To Economic Meltdown in Zimbabwe”, *Mediterranian Journal of Social Sciences*, 5(3 : 42 – 50.
- Mulaga,A., (2013), “Analysis of External Financing Use: A Study of Small And Medium Enterprises in Malawi”, *International Journal of Business And Management* , Vol 8, No 7, pp: 55 – 64.

- Mumani, (2014), "Islamic Finance For SMEs In Jordan 1978-2014", Eastern Mediteranean University. Gazimagusa, Nirth Cyprus.
- Munizu, M, (2010), "Pengaruh Faktor-faktor Eksternal dan Internal terhadap Kinerja Usaha Mikro dan Kecil di Sulawesi Selatan", *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan* , Vol 12, No 1, Maret, hal : 33-41.
- Naceur,S., Barajas, A., Massara, A.,(2015), "Can Islamic Banking Increase Financial Inclusion " , *IMF Working Paper WP/15/31*.
- Nengsih,N., (2015), "Peran Perbankan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusi Di Indonesia" ,*Etikonomi* ,Vol 14(2), Oktober, hal 221-240.
- Ngalim,S.and Ismail, A., (2015), "An Islamic Vision Development Based Indicators in Analysing The Islamic Banks Performance: Evidence From Malaysia, Indonesia, and Selected GCC Countries " , *IRTI Working Paper Series No 1436-2*.
- Nkundabayanga,K.S., Kasozi,D. Dan Nalukenge,I.(2014), "Lending Terms,Financial Literacy and Formal Credit Accessibility", *International Journal of Social Economics*, 41(5), 342-361.
- Nichter, S. and Golmark, L., (2009), "Small Firm Growth in Developing Countries", *Forthcoming World Development*, March 4.
- OJK, (2017), "Arah dan Kebijakan OJK Dalam Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia", Makalah Seminar Refleksi 25 tahun Perbankan Syariah.
- Nugroho,L.,dan Tamala,D., (2018), "Persepsi Pengusaha UMKM Terhadap Peran Bank Syariah", *SIKAP*, Vol 3 (no 1), hal 49 – 62.
- Onaolapo,A.R.,(2015), "Effects of Financial Inclusion on The Economic Growth of Nigeria (1982-2012).", *International Journal of Business and Management Review*, Vol 3,No 8,pp:11-28.
- Ono et al.,(2016), "Does Geographical Proximity Matter in Small Business Lending? Evidence From Changes in Bank Relationships", *Working Paper Series No 40*.Hit Refined Project Institute of Economic Research Hitotsubashi University Naka 2-1 Kunitaci, Tokyo, 186-8603, JAPAN.
- Osakwe,N.,Verter,N.,Becvarova,V., Chovancova,M.,(2015), "SMES Growth In The Czech Republic: Some Macro Economic Perspectives", *ACTA Universitatis Agriculturae Et Silviculturae Mendelianae Brunensis*, Vol 63 Number 6 p 2077-2084.
- Pervan, I., Pervan, M., Qurak, M.,(2017),"The Influence of Age On Firm Performance: Evidence From the Croatian Food Industry", *Journal Of Eastern Europe Research In Business And Economics*, Vol 2017, Article ID618681.
- Philip, M.,(2010),"Factors Affecting Business Success of Small and Medium Enterprise (SMEs)," *APJRBM*, Volume (1)2.
- Plehn-Dujowich, J., and Grove, W., (2012), "The Dynamic Relationship Between Enterpreunership, Unemployment, And Growth: Evidence From US Industries", *Research Issues* No 394.

- Prastowo, (2018), “Analisis Regional Keuangan Inklusi Perbankan Syariah Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 4 (1): 51 – 57.
- Purwidiyanti, W., Rahayu, T.S.M., (201), “Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Kinerja UMKM di Purwokerto Utara.”, *Jurnal Kinerja*, 19910, 149-159.
- Puteri, H., E., dan Harfandi., (2015), “Indikasi Financial Inclusion Di pedesaan dan Kontribusi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Pengembangan Sektor-sektor Produktif”, *Jurnal Ekonomi STIE Haji Agus Salim Bukittinggi*, Vol XVII, No 1, Maret.
- Putri, E., (2016), “The Outreach of Islamic Rural Banks in Indonesia”, *Jurnal Islam Transformatif LPPM Itenas* No 1, Vol 1.
- Rangorajan Committee, (2008), “Report of The Committee on Financial Inclusion,” Government of India.
- Rawal, Nabin., (2008), “Social Inclusion and Exclusion: A Review”, *Dhaulagiri Journal of Sociology and Anthropology*, Vol 2.
- Reyes, G., (2010), “Financial Inclusion Indicators for Developing Countries, The Peruvian Case”, *Peru Superintendency of Banking*.
- Rosengard, J., and Prasetyantoko, A., (2011), “If The Banks Are Doing So Well, Why Can't I Get A Loan? Regulatory Constraints To Financial Inclusion in Indonesia”, *Asian Economic Policy Review*, 6, 273-296.
- Sahroni, O., dan Karim, A., (2015), *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, Ed 1, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sairally, B.S., (2002), Murabahah Financing : Some Controversial Issue, *Review of Islamic Economics*, No 12, pp 73-86
- Sanjaya, I., dan Nursechafia, (2016), “Inklusi Keuangan Dan Pertumbuhan Inklusif: Analisis Antar Propinsi Indonesia”, *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Volume 18, Nomor 3.
- Sarma, M., (2008), “Index of Financial Inclusion”, *ICRIER Working Paper* 215.
- Sarma, M., (2012), “Index of Financial Inclusion: A Measure of Financial Sector Inclusiveness”, *Working Paper No 07/2012*, Berlin Working paper on Money, Trade and Development.
- Sekaran dan Bougie, R., (2017), *Metode Penelitian Untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan Keahlian*, Jakarta : Penerbit Salemba Empat
- Shah, S., Nazir, T., Zaman, K., and Shobir, M., (2013), “Factors Affecting The Growth of Enterprises : A Survey Of The Literature From The Perspective Of Small And Medium Sized Enterprises”, *Journal Of Enterprises Transformation* 3, 53-75.
- Shava, and Rungani, (2016), “Influence of Gender on SME Performance in Emerging Economies”, *Acta Comercii* 16 (1).408.

- Siamat,D., (2005), *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan*, Edisi 5, Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sinclair, S., (2001), “Financial Exclusion: An Introductory Survey”, Report Of Centre For Research in Socially Inclusive Services. Heriot Watt University Edinburg.
- Sitaram,S., And Hoque, M., (2016), “Factors Affecting The Performance Of Small And Medium Enterprise in KwaZulu-Natal, South Africa”, *Problems and Perspectives in Management*, Vol 4, Issue 2, pp : 277 – 288.
- Soekarni,M.,(2014), “Dinamika Pembiayaan Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan Dunia Usaha”, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* Vol 22 No 1.
- Solo, (2008). “Financial Exclusion in Latin America Or The Social Cost of Not Banking The Urban Poor” , *Environment and Urbanization*, 20:1, 47-66.
- Susilo, Y.,(2010), “Peran Perbankan Dalam Pembiayaan UMKM di Propinsi DIY,” *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol 14, No 3 September, hal 467-478.
- Susilo, Y.,dan Sutarta,A., (2004), “Masalah dan Dinamika Industri Kecil Pasca Krisis Ekonomi,” *Jurnal Ekonomi Pembanguna,n* Vol 9 No 1, hala 65-78.
- Sriyana, J., (2014), *Metode Regresi Data Panel*, Yogyakarta : Penerbit Ekonisia.
- Steelyana,E., (2013), “Perempuan dan Perbankan: Sebuah Tinjauan Tentang Peran Inklusi Keuangan Terhadap Pengusaha UMKM Perempuan Di Indonesia”, *Journal The Winners*, Vol 14 No 2 September hal 95-103.
- Sudarsono, H.,(2009), “Dampak Krisis Keuangan Global terhadap Perbankan di Indonesia : Perbandingan Antara bank Konvensional dan Bank Syariah,”, *La Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Vol III No 1 , hal 12-23.
- Sudaryo , Y.,dan Purnamasari, D., (2017), “Strategy Development Micro Small And Medium Business Performance In Small And Medium Enterprises (Smes) Cibaduyut Shoe Bandung”, *International Journal Of Scientific & Technology Reserach* , Vol 6, Issue 03, March, pp: 102-105.
- Sudiarta, Kirya,I., Cipta, I., (2014), ”Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Bangli”, *e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol 2.
- Sulistiyastuti, D., (2004), “Dinamika Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Analisis Konsentrasi Regional UKM di Indonesia 1999-2001”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol 9 No 2, Desember, hal 143-164.
- Tambunan, T., (2005), “Promoting Small And Medium Enterprises With a Clustering Approach: A Policy Experience From Indonesia”, *Journal of Small Business Management*, 43(2), pp : 138 – 154.
- Tambunan, T., (2011), “Development of Micro, Small, and Medium Enterprises and Their Constraints : A Story From Indonesia”, *Gadjah Mada International Journal of Business*, Vol 13, No 1,January – April, pp : 21-43.

- Tambunan, T., (2015), "Financial Inclusion, Financial Education and Financial Regulation: A Story From Indonesia", *Asian Development Bank Institute (ADBI) Working Paper Series*, No 535, June.
- Thrikawala, S., (2011), "Impact of Strategic Networks For The Success of SMES in Srilanka", *World*, 1(2), 108-119.
- Toyin, E., dan Tajudeen, A., (2014), "Investment in Fixed Assets and Firm Profitability: Empirical Evidence from the Nigerian Banking Sector", *Asian Journal of Social Sciences and Management Studies*, Vol 1, No 3, pp : 78-82.
- Umar,A.I.,(2017), "Index of Syariah Fiancial Inclusion in Indonesia", *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Vol 20, No 1.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Wahyudiono,B.,(2016), "Rekomendasi Design Analisis Kredit Mikro Melalui Evaluasi Penyebab Kebangkrutan dan Kesalahan pendekatan Debitur", *Jurnal Ilmiah Manajemen*, Vol2, No1,ed 1, Hal 1-17.
- Wanambisi, A.N., and Bwisa,H.M.,(2013)," Effects of Microfinance Lending on Business Performance: A Survey of Micro and Small Enterprises in Kitale Municipality, Kenya",*International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, Vol 3, No 7, July.
- Wang, Y., (2016), "What Are The Biggest Obstacles To Growth of SMEs in Developing Countries ? An Empirical Evidence From An Enterprise Survey", *Borsa Istanbul Review* 16-3 : 167 – 176.
- Watson, J., (2007), "Modelling Relationship Between Networking And Firm Performance", *Journal Of Business Venturing*, 22 (6), 852-874.
- Widarjono,A., (2013), "Ekonometrika : Pengantar dan Aplikasinya", UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Widayati,E., (2010), "Pengaruh Infrastruktur Terhadap Produktivitas Ekonomi Di Pulau Jawa Periode 2000 – 2008", *Jurnal Media Ekonomi* Vol 18 No 1, April.
- Widarwati,E.,Sari,P.,Nurmalasari,N.,(2019), Role of Financial Inclusion To Stability: The Case of Indonesia's Sharia Banking, *Holistica*, 10 (1): 7-15.
- Wijono,Wiloejo Wirjo., (2005)," Pemberdayaan Lembaga Sebagai Salah Satu Pilar Resmi Keuangan Nasional: Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan.", *Jurnal Kajian ekonomi dan Keuangan*, Jakarta.
- World Bank, (2014), *Financial Inclusion, Global Financial Development Report* , Washington D C.
- Yorulmaz,R.,(2013), "Construction Of A Regional Financial Inclusion Index In Turkey", *EDDK Bankacilik ve Finansal Flyasalart* Cit:7, Say:1,pp: 79 – 101.
- Yusuf,A., (1995), "Critical Success Factors For Small Business Perception Of South Pacific Entrepreneurs", *Journal Of Small Business Management*, 33(2), 68 – 73.

Zhou H, Chen, X., (2008), “Resouce Capabilities And New Venture Choice,” Diakses dari <http://74.125.132/search?q=cache:mgr4d29qtqpQ5:www.ceauk.org.uk/20>>diakses tanggal 8 Maret 2018.

Zuhaili, W., (2011), *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani Darul Fikir.

